



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENENTUAN FOKUS KEBIJAKAN KABUPATEN-KABUPATEN
DI PROVINSI BENGKULU DENGAN MANFAAT BIAYA
ANALISIS KUALITATIF (AHP)**

TESIS

**ANDREAS
0906586335**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MEGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENENTUAN FOKUS KEBIJAKAN
KABUPATEN-KABUPATEN DI PROVINSI BENGKULU
DENGAN MANFAAT BIAYA ANALISIS KUALITATIF (AHP)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Ekonomi**

**ANDREAS
0906586335**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2011

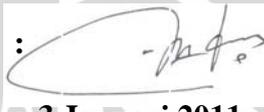


(Andreas)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Andreas
NPM : 0906586335

Tanda Tangan : 

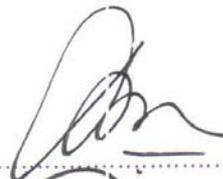
Tanggal : 3 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Andreas
NPM : 0906586335
Program Studi : MPKP FE UI
Judul Tesis : Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten-Kabupaten
di Provinsi Bengkulu Dengan Manfaat Biaya
Analisis Kualitatif (AHP)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP), Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Sri Mulyono, SE., M.SS. ()
Penguji : Iman Rozani, SE., M Soc.Sc ()
Penguji : Paksi C.K. Walandouw, SE., MA ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2011

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini merupakan karya akhir penulis sebagai mahasiswa pada program pasca sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan judul **Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan Manfaat Biaya Analisis Kualitatif (AHP)**. Dengan selesainya tesis ini, penulis berharap persyaratan dalam meraih gelar Magister Ekonomi dapat terpenuhi.

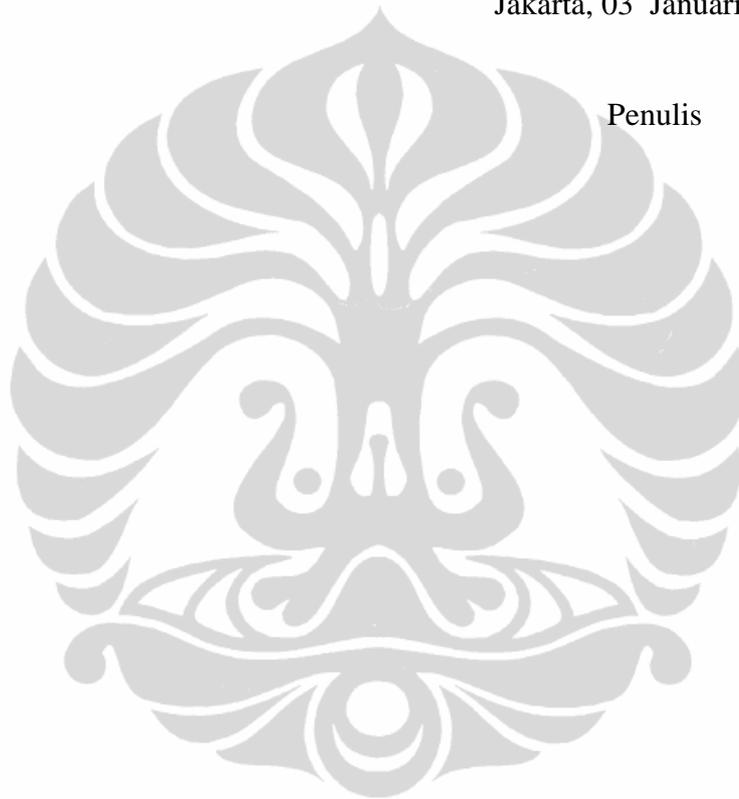
Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Istri dan anakku tercinta yang senantiasa mendampingi dan memotivasi serta atas semua bantuan, semangat, kesabaran dan pengorbanan selama menyelesaikan pendidikan mulai dari awal perkuliahan hingga selesai.
- (2) Kedua orang tua yang selalu memberikan dorongan dan do'a serta bantuan moril dan materiil kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya karya ilmiah ini.
- (3) Bapak Arindra A. Zainal, Ph.D, selaku Ketua Program Studi MPKP Universitas Indonesia, dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program MPKP Universitas Indonesia.
- (4) Bapak Sri Mulyono, SE., M.SS. selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
- (5) Ir. Tantawi Jauhari yang telah banyak memberi masukan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dan bersedia menjadi responden.
- (6) Pemerintah Daerah, khususnya Bappeda Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu atas bantuannya dalam memberikan data kepada penulis.
- (7) Semua pihak yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian sehingga dapat terselesainya karya ilmiah ini dimana tidak dapat disebut satu persatu.

- (8) Kakak dan adik-adikku yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
- (9) Teman-teman se-angkatan atas dukungan dan kebersamaannya selama ini sarta memberikan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.

Jakarta, 03 Januari 2011

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andreas
NPM : 0906586335
Program Studi : Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan Manfaat Biaya Analisis Kualitatif (AHP).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2011

Yang menyatakan,



(ANDREAS)

ABSTRAK

Nama : Andreas
Program Studi : MPKP
Judul : Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan Manfaat Biaya Analisis Kualitatif (AHP)

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya kemampuan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan terutama dalam menggali potensi yang ada di daerah. Provinsi Bengkulu yang terletak di pantai sebelah barat pulau Sumatera memiliki keanekaragaman sumber daya alam maupun budaya yang dapat dikembangkan sebagai potensi dalam pembangunan daerah, dengan adanya otonomi daerah diharapkan potensi yang dimiliki dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Desentralisasi pembangunan memberikan peluang kepada daerah untuk menggali dan merumuskan strategi pembangunan dengan melibatkan stakeholders yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Penelitian ini selain melihat dampak positif dan dampak negatif pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun 2005-2009, juga merumuskan strategi yang tepat untuk dijadikan sebagai fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu yang didasarkan atas pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai "*the experts*". Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah terutama dalam upaya menyusun rencana pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan analisis *Benefit Cost* melalui pendekatan *Analitycal Hierarchy Proses* (AHP), dirumuskan strategi yang dapat dijadikan fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah mengembangkan sektor pertanian, untuk masing-masing kabupaten dengan rasio manfaat biaya adalah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 2,620, Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 2,480, Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 1,877 dan Kota Bengkulu sebesar 2,991.

Kata kunci:

Potensi, fokus kebijakan, mengembangkan sektor pertanian

ABSTRACT

Name : Andreas
Study Program : MPKP
Title : Determination of Policy Focus in The Districts of Bengkulu Province With Benefit Cost Qualitative Analysis (AHP)

The implementation of regional autonomy demands a regional capability in formulating development policies, especially in tapping the potency in a region. Bengkulu Province which is located on the west coast of Sumatra Island has diversity of natural resources and culture that can be developed as potency in regional development, with regional autonomy, it is expected that the utilization of the potency can be optimized. Decentralization of development provides an opportunity for region to explore and formulate development strategies which is involving stakeholders in order to create a prosperous society.

This research is not only finding the positive and negative impacts of districts development in Bengkulu Province for 2005-2009, but also formulating appropriate strategy for the focus of districts' policy in Bengkulu Province based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts". The result of this research is expected to be used as contribution to local governments, especially in efforts to formulate development plans.

Based on the analysis result using the Cost Benefit analysis through Analytical Hierarchy Process (AHP), a strategy that can be used as the focus of districts' policy in Bengkulu Province is formulated. It is to develop the agricultural sector for each district with the benefit cost ratio for Rejang Lebong is at 2.620, North Bengkulu regency at 2.480, South Bengkulu Regency at 1.877, and Bengkulu City at 2.991.

Key word:

Potency, focus of districts' policy, develop the agricultural sector

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5.2 Jenis dan Sumber Data	9
1.5.3 Metode Analisis	9
1.5.3.(1) Analytical Hierarchy Process (AHP).....	9
1.5.3.(2) Benefit Cost Analysis	14
1.6. Sistematika Penulisan	15
2. TINJAUAN TEORITIS	16
2.1. Konsep Pembangunan Daerah	16
2.2. Pengertian Analisis Kebijakan	18
2.3. Pengertian Alokasi Sumber Daya	19
2.4. Pengertian dan Peranan Ilmu Pembangunan Wilayah	20
2.5. The Analytic Hierarchy Process (AHP)	21
2.5.1 Prinsip Dasar AHP	21

2.5.2 Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)	25
2.5.2.(1) Menyusun Hirarki	26
2.5.2.(2) Comparative Judgement	27
2.5.2.(3) Synthesis of Priority	28
2.5.2.(4) Logical Consistency	28
3. DESKRIPSI PROVINSI BENGKULU	29
3.1. Letak Geografis dan Pembagian Wilayah Administrasi	29
3.2. Kondisi Demografi	30
3.3. Perkonomian Provinsi Bengkulu	32
3.4. Pendapatan Perkapita	34
3.5. Potensi-Potensi Daerah	36
3.5.1 Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu	36
3.5.2 Pariwisata	37
3.5.3 Sosial Budaya Provinsi Bengkulu	38
3.6. Profil Kabupaten/Kota	39
3.6.1 Kabupaten Rejang Lebong	39
3.6.2 Kabupaten Bengkulu Utara	41
3.6.3 Kabupaten Bengkulu Selatan	41
3.6.4 Kota Bengkulu	43
4. ANALISA FOKUS KEBIJAKAN KABUPATEN-KABUPATEN DI PROVINSI BENGKULU	44
4.1. Penyusunan Hirarki	44
4.2. Identifikasi dan Definisi Level dalam Hirarki	48
4.3. Comparative Judgement	49
4.4. Rata-Rata Ukur	51
4.5. Hasil Sintesa Akhir Global	51
4.5.1 Kabupaten Rejang Lebong	51
4.5.2 Kabupaten Bengkulu Utara	58
4.5.3 Kabupaten Bengkulu Selatan	64
4.5.4 Kota Bengkulu	70

4.6. Analisa Fokus Kebijakan Untuk Masing-Masing Kategori Dampak	77
4.6.1 Analisa Fokus Kebijakan untuk Kategori Ekonomi	77
4.6.2 Analisa Fokus Kebijakan untuk Kategori Sosial	78
4.6.3 Analisa Fokus Kebijakan dilihat dari Kategori Lingkungan	79
5. KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran-Saran (Rekomendasi)	83
DAFTAR PUSTAKA	85



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
Tabel 1.1	Struktur Perekonomian Provinsi Bengkulu	4
Tabel 1.2	Pendapatan Perkapita dengan Migas Wilayah Sumatera Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	5
Tabel 1.3	Skala Preferensi AHP	12
Tabel 2.1	Matriks Perbandingan	28
Tabel 3.1	Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Luas Wilayah per Kabupaten di Provinsi Bengkulu	30
Tabel 3.2	PDRB Bengkulu Tahun 2004-2008 Berdasarkan Harga Konstan	33
Tabel 3.3	Perkembangan Pendapatan Perkapita Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2008 atas dasar harga konstan Tahun 2000	35
Tabel 3.4	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong	40
Tabel 3.5	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan	42
Tabel 4.1	Bobot Prioritas Global dan Rasio Manfaat-Biaya Kabupaten Rejang Lebong	52
Tabel 4.2	Bobot Prioritas Global dan Rasio Manfaat-Biaya Kabupaten Bengkulu Utara	58
Tabel 4.3	Bobot Prioritas Global dan Rasio Manfaat-Biaya Kabupaten Bengkulu Selatan	64
Tabel 4.4	Bobot Prioritas Global dan Rasio Manfaat-Biaya Kota Bengkulu	70
Tabel 4.5	Fokus Kebijakan Sisi Positif Kategori Ekonomi	77
Tabel 4.6	Fokus Kebijakan Sisi Negatif Kategori Ekonomi	77
Tabel 4.7	Rasio Manfaat-Biaya untuk Kategori Ekonomi	77
Tabel 4.8	Fokus Kebijakan Sisi Positif Kategori Sosial	78
Tabel 4.9	Fokus Kebijakan Sisi Negatif Kategori Sosial	78
Tabel 4.10	Rasio Manfaat-Biaya untuk Kategori Sosial	79
Tabel 4.11	Fokus Kebijakan Sisi Positif Kategori Lingkungan	79
Tabel 4.12	Fokus Kebijakan Sisi Negatif Kategori Lingkungan	79
Tabel 4.13	Rasio Manfaat-Biaya untuk Kategori Lingkungan	80

DAFTAR BAGAN

Bagan	Judul	Hal
Bagan 4.1	Hirarki Sisi Positif Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Bengkulu	46
Bagan 4.2	Hirarki Sisi Negatif Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Bengkulu	47
Bagan 4.3	Hirarki Sisi Positif Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	54
Bagan 4.4	Hirarki Sisi Negatif Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	55
Bagan 4.5	Hirarki Sisi Positif Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu	60
Bagan 4.6	Hirarki Sisi Negatif Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu	61
Bagan 4.7	Hirarki Sisi Positif Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu	66
Bagan 4.8	Hirarki Sisi Negatif Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu	67
Bagan 4.9	Hirarki Sisi Positif Penentuan Fokus Kebijakan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu	72
Bagan 4.10	Hirarki Sisi Negatif Penentuan Fokus Kebijakan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
Gambar 1.1	Distribusi Persentase Penduduk Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten dan Kota 2008	6
Gambar 1.2	PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2008	7
Gambar 1.3	Model Pembuatan AHP	10
Gambar 3.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu Hirarki Sisi Positif Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten	31
Gambar 3.2	Kepadatan Penduduk Tiga Kabupaten Induk dan Kota Bengkulu Tahun 2008	32
Gambar 3.3	PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2008	34
Gambar 3.4	Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu 2006-2008	36
Gambar 4.1	Rasio Manfaat Biaya Fokus Kebijakan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks perbandingan rata-rata	87
Lampiran 2. Hasil analisis dengan Expert Choice	92
Lampiran 3. Kuesioner responden dengan metode AHP	100



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sangatlah penting. Sejak otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), termasuk dalam mengelola perekonomian di daerah otonom seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung tumbuhnya perekonomian, karena salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah.

Salah satu indikator yang digunakan dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah adalah dengan melihat Pertumbuhan ekonominya, karena pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan sejauhmana aktifitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktifitas ekonomi merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, dimana pemilik faktor produksi akan mendapatkan balas jasa. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat sebagai pemilik faktor produksi.

Dengan adanya desentralisasi pembangunan dimana peran pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan sudah diserahkan kepada daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal serta agama. Sehingga persaingan dalam pembangunan tidak dapat dihindari lagi, masing-masing daerah ingin menunjukkan bahwa merekalah yang terbaik. Motivasi ini sangat berguna untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, dimana pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional, dengan kata lain persaingan antar daerah akan membantu Indonesia dalam persaingan antar negara.

Pembangunan merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menuju keadaan yang lebih baik, namun keadaan yang lebih baik ini dapat tercapai

apabila dalam menentukan fokus kebijakan pembangunan melalui perencanaan yang baik dan matang karena pembangunan yang tidak terencana dengan baik akan menyebabkan tidak akan tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Dalam merancang kebijakan pembangunan, Pemerintah Daerah perlu melihat potensi yang ada di daerahnya, terutama potensi sumber daya manusia dalam upaya menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang akan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian agar tidak tertinggal dari daerah-daerah lainnya. Sumber daya manusia yang ada di daerah juga mempunyai peranan yang penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Evaluasi terhadap kebijakan yang diambil dalam menentukan arah pembangunan diperlukan untuk menilai sejauhmana pembangunan yang dilakukan pemerintah mampu menggali potensi yang ada, karena apabila fokus kebijakan tidak memperhatikan potensi yang ada, disamping akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan, juga menyebabkan pemborosan dalam penggunaan sumber daya, dana dan waktu. Dengan mengevaluasi kebijakan pembangunan diharapkan dapat mengukur sudah tepatkah fokus kebijakan yang telah diambil.

Provinsi Bengkulu yang ekonominya cukup tertinggal dari daerah lain perlu memperhatikan arah kebijakan untuk dapat memacu perekonomian daerah. Potensi daerah harus dioptimalkan pemanfaatannya, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Penelitian mendalam mengenai potensi daerah juga diperlukan untuk dapat dengan tepat memberikan rekomendasi potensi daerah yang dapat dikembangkan.

Visi pembangunan Provinsi Bengkulu sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2010, adalah *”Terwujudnya Provinsi Bengkulu yang berubah lebih maju, bermartabat, lebih sejahtera dan bebas korupsi dengan landasan iman dan taqwa serta industri rakyat sebagai penggerak utamanya.”* Untuk mewujudkan visi tersebut maka Provinsi Bengkulu mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai aspek kehidupan, didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
3. Mengembangkan sarana dan prasarana daerah untuk mendukung pencapaian masyarakat yang sejahtera, adil, produktif dan kompetitif.
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang merakyat secara professional, transparan, akuntabel, sinergis, bersih, dan berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Mendorong berkembangnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan religius.
6. Mewujudkan sistem politik dan hukum yang memperhatikan dan mengayomi masyarakat, serta mampu membawa kemajuan dan stabilitas daerah.
7. Menumbuh kembangkan budaya kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
8. Mendorong terciptanya sistem pertahanan dan keamanan daerah yang mampu menangkal disintegrasi bangsa, menjamin keutuhan NKRI, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun jika dilihat dari struktur perekonomian Bengkulu masih sangat didominasi sektor pertanian, diikuti dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa. Pada tahun 2008, kontribusi ketiga sektor ini terhadap perekonomian Bengkulu mencapai 76,35% dimana 40,85% adalah kontribusi dari sektor pertanian (tabel 1.1).

TABEL 1.1
STUKTUR PEREKONOMIAN PROVINSI BENGKULU 2005-2008

No.	Sektor	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	40,24	40,07	40,06	40,85
2	Pertambangan & Penggalian	3,20	3,25	3,08	3,14
A.	Sektor Primer	43,44	43,32	43,14	43,99
3.	Industri Pengolahan	3,96	4,00	3,98	3,94
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	0,49	0,48	0,49	0,47
5.	Bangunan/Kontruksi	2,97	2,99	3,08	3,05
B.	Sektor Sekunder	7,27	7,47	7,55	7,46
6.	Perdagangan,Hotel&Restoran	19,56	19,69	19,87	19,70
7.	Pengangkutan & Komunikasi	9,39	9,21	9,02	8,67
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,72	4,65	4,50	4,38
9.	Jasa-jasa	15,48	15,66	15,38	15,80
C.	Sektor Tersier	49,15	49,21	48,77	48,55

Sumber : PDRB Prov. Bengkulu

”Walaupun sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, sektor tersebut belum mampu menunjukkan hasil nyata terutama bila ditinjau dari aspek kesejahteraan petani. Petani tetap dalam kemiskinan dan cenderung kian kehilangan tanah sebagai assetnya yang menyebabkan banyaknya keluarga miskin di pedesaan” (BPS Prov. Bengkulu:2008).

Jika kita melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita untuk wilayah Sumatera, semua Provinsi kecuali NAD sejak tahun 2004 sampai tahun 2009 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi kalau dilihat perbandingan PDRB per kapita antar provinsi terlihat adanya ketimpangan yang cukup tinggi. Pendapatan per kapita Provinsi Riau dan Kepulauan Riau jauh di atas daerah-daerah lainnya di wilayah Sumatera. Provinsi Kepulauan Riau memiliki PDRB per kapita tertinggi, Sedangkan Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan PDRB per kapita terendah. Sebagai gambaran, besar PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau adalah sekitar enam kali PDRB per kapita Bengkulu (Tabel 1.2).

TABEL 1.2
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
(DALAM RIBU RUPIAH)

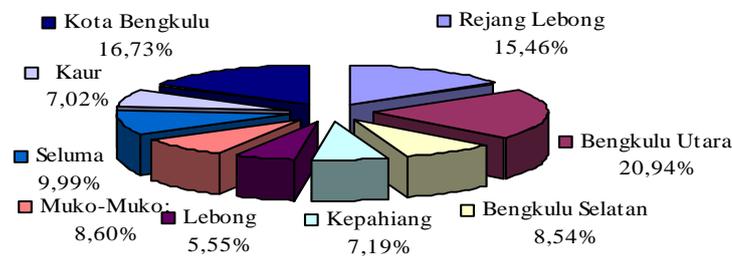
Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
NAD	9.874	8.886	8.873	8.519	7.938
Sumatera Utara	6.873	7.078	7.393	7.775	8.141
Sumatera Barat	6.081	6.385	6.681	7.006	7.350
Riau	16.642	16.396	16.832	17.001	17.553
Jambi	4.553	4.762	4.956	5.206	5.486
Sumatera Selatan	7.143	7.282	7.548	7.872	8.155
Bengkulu	3.806	3.984	4.154	4.335	4.479
Lampung	4.001	4.148	4.293	4.485	4.656
Kep. Babel	8.219	8.101	8.300	8.552	8.806
Kep. Riau	23.916	23.756	24.304	24.478	25.478

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Husni Hasanuddin mengatakan, sebanyak 800 dari 1.300 desa di Provinsi Bengkulu masih tertinggal. Desa-desa yang tertinggal tersebut tersebar di sembilan kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu dan terbanyak terdapat pada Kabupaten Bengkulu Utara dan Kaur. Jumlah warga miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) 22,18 persen dari jumlah penduduk 1,7 juta jiwa, sementara data versi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Bengkulu mencapai 44 persen (www.tvone.co.id:2009).

Dengan adanya otonomi daerah, wilayah kabupaten di Bengkulu banyak terjadi pemekaran. Sebelum adanya otonomi daerah, Provinsi Bengkulu terdiri dari tiga kabupaten dan satu kota, namun sejak adanya otonomi daerah kabupaten/kota di Bengkulu menjadi sembilan kabupaten dan satu kota. Meskipun mengalami pemekaran wilayah, kabupaten induk (Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu) tetap mempunyai peranan penting dalam memacu perekonomian kabupaten-kabupaten pemekaran. hal ini dikarenakan kabupaten induk telah menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan sebelum terjadinya pemekaran, selain itu kabupaten induk juga akan menjadi contoh dan motivator bagi kabupaten-kabupaten yang baru dimekarkan.

Dilihat dari penyebaran penduduk, penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2008 lebih banyak terdapat pada di tiga wilayah, yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong. Total proporsi penduduk di tiga daerah tersebut mencapai 53,13 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun telah terjadi pemekaran wilayah, jumlah penduduk lebih banyak terdapat pada kabupaten induk dan kota kecuali untuk Kabupaten Bengkulu Selatan. Rincian penyebaran penduduk Provinsi Bengkulu menurut kabupaten dan kota dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

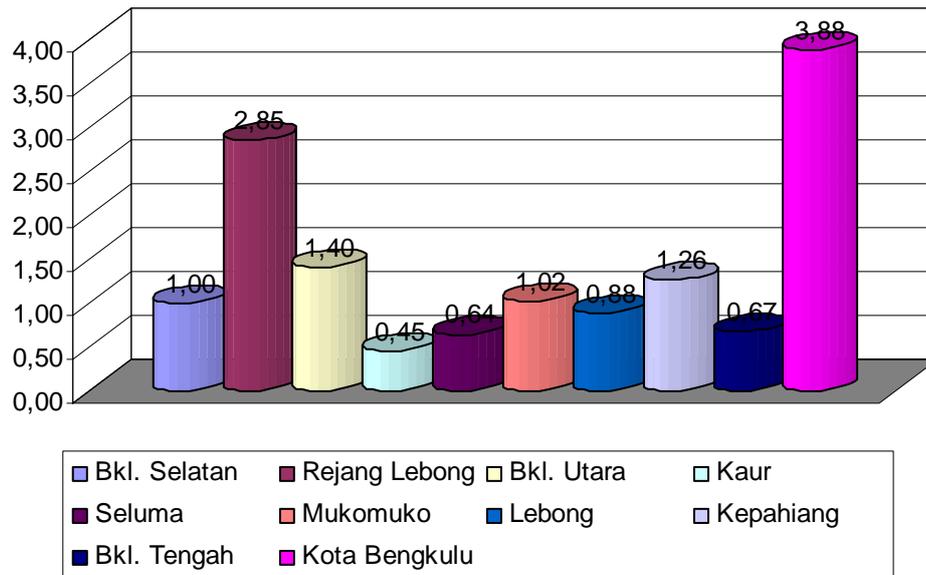


Gambar 1.1

Distribusi Persentase Penduduk Provinsi Bengkulu
Menurut Kabupaten dan Kota 2008

(Sumber: BPS 2009, Bengkulu Tengah masih tergabung dengan Bengkulu Utara)

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu tahun 2008 masih didominasi tiga kabupaten induk dan kota, dimana masing-masing berada di atas wilayah pemekarannya. PDRB terbesar pada Kota Bengkulu dan diikuti oleh Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini:



Gambar 1.2
PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2008

Dari gambar 1.1 dan gambar 1.2 di atas terlihat bahwa walaupun telah terjadi pemekaran wilayah, kabupaten dan kota yang lama tetap mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam perekonomian Provinsi Bengkulu. 61,67% penduduk di Provinsi Bengkulu berada di empat daerah tersebut dan 64,98% dari PDRB Provinsi Bengkulu merupakan kontribusi dari daerah tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan fokus kebijakan yang tepat dalam pembangunan sangat penting guna membangun perekonomian suatu daerah. Menggali potensi dalam mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Masih banyaknya desa-desa yang tertinggal di Provinsi Bengkulu menyebabkan tingginya angka kemiskinan terutama di pedesaan dan bekerja pada sektor pertanian. Tidak menjanjikannya hidup diperdesaan membuat orang banyak berpindah ke kota, sehingga banyak potensi yang ada di desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, padahal peran sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian di Bengkulu. Apalagi mengingat Provinsi Bengkulu masih tertinggal dengan daerah lainnya dalam pembangunan

terutama pembangunan ekonomi. Dengan demikian timbul pertanyaan “bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu dan kebijakan apa yang tepat untuk menjadi fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

Melihat dampak positif dan negatif dari pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu serta mengkaji dan merumuskan sektor yang tepat untuk dijadikan fokus kebijakan dalam pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. mengetahui potensi daerah yang dapat dikembangkan dalam pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.
2. sebagai sumbuangan pemikiran bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan dan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar tujuan yang hendak dicapai tidak melebar dan keluar dari permasalahan yang diteliti, maka pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Provinsi Bengkulu dengan unit terkecil adalah Kabupaten/Kota yaitu kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu.
2. Kebijakan pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun 2005-2009.

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

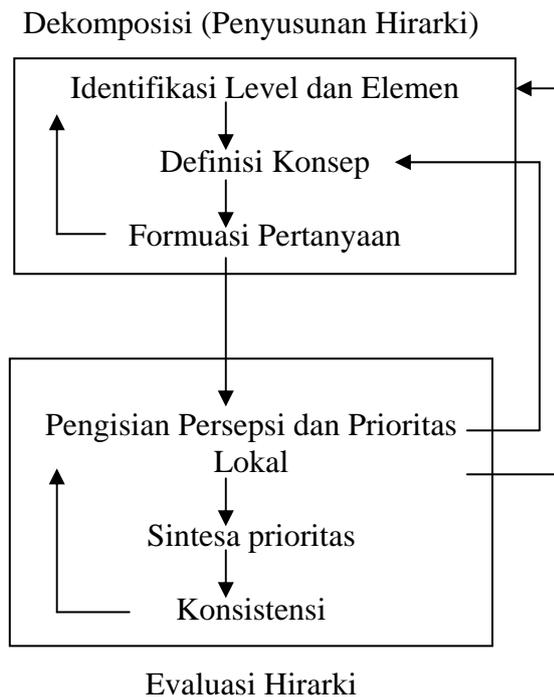
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang bersifat ordinal dari persepsi/opini para responden yang dianggap expert di bidang pembangunan daerah. Data ini diperoleh melalui survey lapangan di Provinsi Bengkulu baik di instansi pemerintah maupun asosiasi profesional di bidang pembangunan daerah. Data sekunder diperoleh dari data publikasi BPS, Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan dan bappeda Kota Bengkulu.

1.5.3. Metode Analisis

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan analisis benefit-cost yang diselesaikan dengan pendekatan *Analytical Hierarchy Proses* (AHP). Pendekatan ini dapat mengakomodasi *benefit* maupun *cost* yang non komersial, sehingga sangat sesuai digunakan dalam analisa manfaat biaya untuk kasus ini.

1.5.3.(1) Analytical Hierarchy Proses (AHP)

Secara garis besar, aplikasi dari model AHP dilakukan dalam dua tahap, yaitu: penyusunan Hirarki (dekomposisi) dan evaluasi Hirarki (expert Choice). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 Model pembuatan AHP di bawah ini:



Gambar 1.3
Model Pembuatan AHP

1. Penyusunan Hirarki (Dekomposisi)

Setelah persoalan didefinisikan maka perlu dilakukan dekomposisi, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini maka proses analisis ini dinamai hirarki (*Hierarchy*). Pembuatan hirarki tersebut tidak memerlukan pedoman yang pasti berapa banyak hirarki tersebut dibuat, tergantung dari pengambil keputusan-lah yang menentukan dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian yang diperoleh jika keadaan tersebut diperinci lebih lanjut.

Mengingat manfaat dan biaya adalah dua hal yang sangat berbeda dan bertolak belakang, maka pemecahan masalah tidak mungkin dilakukan dalam satu hirarki. Manfaat adalah hal-hal yang sifatnya positif atau menguntungkan sedangkan biaya adalah hal-hal yang sifatnya negatif atau merugikan bagi suatu pihak, karena itu pemecahan masalah yang optimal dalam analisis manfaat dan biaya perlu dibuat dua hirarki terpisah dimana satu hirarki khusus

membahas manfaat suatu tindakan dan hirarki lainnya membahas biaya yang timbul dari tindakan tersebut.

Penyusunan hirarki yang lazim disebut dekomposisi mencakup tiga proses yang berurutan dan saling berhubungan:

- Identifikasi level dan elemen
mengidentifikasi level-level dan elemen-elemen yang akan ditempatkan dalam suatu level. Tidak ada konsep baku yang menjadi acuan dalam mengidentifikasi level dan elemen, tapi tergantung pada masalah yang ingin diselesaikan. Hirarki dari manfaat dan biaya harus tetap berpegang pada suatu prinsip bahwa harus ada level dari hirarki tersebut yang menjelaskan aspek manfaat dan juga aspek biaya secara terpisah.
- Definisi konsep
Semua level dan elemen didefinisikan, pembuatan konsep untuk mengisi setiap level dan elemen pada hirarki dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman seseorang.
- Formulasi pertanyaan
Untuk mengontrol hirarki yang telah dibuat, kalau si pembuat hirarki menghadapi kesulitan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan, maka level-level dan konsep-konsep tadi harus direvisi dan dimodifikasi.

2. Evaluasi Hirarki

Masing-masing hirarki, baik yang menjelaskan aspek manfaat maupun yang menjelaskan aspek biaya dilakukan evaluasi. Pada tahap evaluasi hirarki, dilakukan proses sebagai berikut:

- Pengisian persepsi responden
Merupakan proses penilaian atau perbandingan antar dua elemen (pairwise comparison) dalam suatu level sehubungan dengan level di atasnya, sehingga diperoleh prioritas elemen dalam suatu level. Dilakukan dengan memakai skala rasio 1-9, yang menggambarkan relatif pentingnya satu elemen terhadap elemen lainnya dalam satu level tertentu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3 Skala Preferensi AHP.

Tabel 1.3
Skala Preferensi AHP

Skala	Definisi	Keterangan
1	Kedua elemen adalah sama tingkat kepentingannya, kesukaannya atau kemiripannya.	Dua elemen, Am dan An memberikan kontribusi yang sama atau memiliki bobot yang seimbang nilainya.
3	Suatu elemen agak sedikit penting atau disukai atau mirip dengan elemen yang lain	Pengalaman dan judgement agak menyukai sebuah elemen dibandingkan yang lain
5	Suatu elemen lebih penting atau disukai atau mirip terhadap lainnya, dengan kata lain suatu elemen secara esensial lebih penting daripada lainnya.	Pengalaman dan judgement lebih kuat menyukai sebuah elemen dibandingkan yang lain
7	Suatu elemen sangat disukai/penting atau mirip daripada lainnya	Sebuah elemen sangat kuat disukai dan dominasinya terlihat nyata dalam keadaan yang sebenarnya dibandingkan lainnya
9	Suatu elemen absolute/mutlak pentingnya/disukai/mirip dengan elemen lainnya.	Fakta bahwa sebuah elemen lebih disukai daripada elemen lainnya berada pada kemungkinan yang tertinggi dalam urutan yang telah diketahui.
2,4,6,dan 8	Nilai intermediate antara dua judgement yang peringkatnya berdekatan. Dengan kata lain hal ini adalah nilai antara.	Kompromi diperlukan antara dua judgement. Artinya jika ragu-ragu memilih skala. Misal antara 7 dan 9, maka nilai antara dapat digunakan.
Resiprokal atau kebalikan	Jika Am dibandingkan An misalnya adalah 3, maka An/Am menjadi skala 1/3. artinya aktivitas m yang sebelumnya diberi bobot ketika dibandingkan aktivitas n, maka n dibandingkan m adalah bernilai kebalikannya.	Suatu asumsi yang masuk akal.

Sumber : Thomas L Saaty (1993:hal.85)

Pengambilan persepsi responden dalam model AHP dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Pertama, dengan cara *Konsensus* (berkelompok) yaitu dengan mengumpulkan semua responden dalam suatu ruangan dan mereka harus mengeluarkan satu penilaian saja untuk satu perbandingan melalui diskusi mendalam.

Kedua, secara terpisah, ada dua cara yang dapat dipakai si pembuat model, yaitu wawancara langsung dan kuesioner. Setelah semua kuesioner diisi maka masalah berikutnya adalah bagaimana mendapatkan satu hasil akhir dari sekian banyak responden yang menjawab kuesioner-kuesioner tersebut. Dengan mencari rata-rata penilaian dari semua responden yaitu dengan rata-rata hitung dan rata-rata ukur. Dalam pemakaian rata-rata hitung, ada dua jenis asumsi yang dipakai yaitu (1) peran setiap responden sama dan (2) peran setiap responden berbeda, tergantung pada bobot tertentu. Untuk asumsi pertama, digunakan rumus:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a_w$$

Dimana : a_w = penilaian gabungan

a_n = penilaian responden ke n (dalam skala 1/9-9)

n = banyaknya responden

untuk asumsi kedua, rumus yang dipakai adalah:

$$\frac{w_1 a_1 + w_2 a_2 + \dots + w_n a_n}{n} = a_w$$

Kedua cara rata-rata di atas memang memang tidak terlalu salah, akan tetapi secara statistik ada metode rata-rata lain yang lebih cocok untuk deret bilangan yang sifatnya rasio atau perbandingan seperti skala dalam model AHP. Cara tersebut adalah rata-rata ukur yang menyatakan akar pangkat n dari hasil perkalian bilangan sebanyak n, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$a_w = \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n}$$

➤ Sintesa Akhir

Pada dasarnya, sintesa akhir didasari oleh operasi perkalian antara matriks dan vektor. Apabila suatu matriks perbandingan sudah lengkap diisi, maka dengan metode eigenvector akan dihasilkan suatu vektor prioritas yang berbentuk vektor kolom. Dari perhitungan prioritas global, masing-masing elemen pada level terakhir setiap hirarki akan didapat dua vektor prioritas dimana satu dari hirarki manfaat dan lainnya dari hirarki biaya. Untuk memutuskan apakah tindakan itu layak atau tidak, mamfaat dan biaya yang dihitung dan dianalisa secara terpisah harus disatukan pada akhir analisa.

1.5.3.(2) Benefit Cost Analysis

Analisis benefit cost adalah suatu metode untuk mengidentifikasi dan kemudian mengukur biaya-biaya dan manfaat suatu kegiatan atau proyek, biasanya perhitungan dilakukan dengan metode analisis keuangan yang menekankan pada tingkat diskonto dan nilai sekarang (present value). Analisa manfaat dan biaya dengan menggunakan analisa keuangan semata tidak dapat memperhitungkan unsur-unsur kualitatif yang dapat mempengaruhi kenyataan. Mengingat AHP adalah suatu pendekatan yang dapat menggabungkan faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan persepsi manusia yang sebenarnya sebagai input, maka sangat sesuai kalau analisa manfaat biaya juga dipecahkan dengan AHP.

Dalam menghitung manfaat dan biaya itu sendiri harus dilakukan secara terpisah dengan menyusun dua hirarki yang berbeda yaitu hirarki sisi positif dan hirarki sisi negatif, kemudian pada akhir analisa total manfaat yang didapatkan dibanding dengan total biayanya.

Ada dua cara yang bisa dipakai dalam membandingkan manfaat dan biaya, yaitu rasio dan selisih. Dengan menggunakan rasio, pemilihan suatu alternatif dilakukan dengan membandingkan rasio manfaat dan biaya yang dihasilkan masing-masing alternatif. Makin besar rasio berarti makin layak atau makin bagus alternatif tersebut, sedangkan makin kecil rasio menunjukkan perbedaan antara manfaat biaya semakin kecil, batas kritisnya adalah 1 (satu) dimana manfaat sama

dengan biaya. Di atas satu menunjukkan alternatif tersebut layak, sedangkan di bawah satu menunjukkan alternatif tersebut tidak layak atau merugi.

Penggunaan cara selisih dalam menganalisa manfaat dan biaya dimana makin besar selisihnya makin layak suatu alternatif dan sebaliknya. Batas kritisnya adalah angka 0 yang berarti jumlah absolute manfaat sama dengan biaya, apabila selisihnya positif berarti alternatif tersebut layak sedangkan negatif menunjukkan alternatif tersebut tidak layak atau hanya akan menimbulkan kerugian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas kerangka teoritis yang menjelaskan tentang konsep pembangunan daerah, analisis kebijakan, alokasi sumber daya, pengertian dan peranan ilmu pengembangan wilayah, dan metode *The Analytic Hierarchy Process* (AHP).

BAB III : Deskripsi Wilayah

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota yang menjadi tempat dilakukannya penelitian.

BAB IV. Pembahasan

Bab ini akan membahas tentang analisa penentuan fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan manfaat biaya analisis melalui pendekatan *The analytic Hierarchy Process* (AHP).

BAB V. Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan disimpulkan hasil dari penelitian serta memberikan saran rekomendasi kebijakan.

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS

2.1. Konsep Pembangunan Daerah

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik.¹ Hal ini sesuai dengan arti dari istilah pembangunan itu sendiri yang berasal dari kata bangun, diberi awalan *pem* dan akhiran *an* sehingga memberi makna membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti: pertama bangun dalam arti sadar atau siuman, kedua bangun dalam arti bangkit atau berdiri, ketiga bangun dalam arti bentuk, keempat bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan dapat meliputi berbagai segi, yaitu segi anatomic (Bentuk), Fisilogik (kehidupan) dan behavioral (perilaku). Begitu juga dengan pembangunan ekonomi yang dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan perekonomian kearah yang lebih baik dan yang diharapkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Lincolin Arsyad, pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.²

Definisi pembangunan yang dikemukakan oleh Saul M. Katz

Pembangunan adalah perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat; bukan hanya sekedar ekonomi saja seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada grafik tenaga kerja, ia mencakup masalah perubahan ekonomis dan politik yang pelik, dimana masalah-masalah tersebut berhubungan satu sama lain.

Michael P. Todaro (1997:19) mengatakan pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya

¹ LEMHANAS, *Pembangunan Nasional*, PT. Balai Pustaka Jakarta, 1997

² Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE Yogyakarta, 1999

pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik” secara material maupun spiritual.

Pendapat lain mengatakan “pembangunan diartikan sebagai kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya.”³ Berdasarkan konsep ekonomi pancasila, maka hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan manusia seutuhnya adalah setiap orang seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Dalam piagam hak azazi PBB (declaration of human right) yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 juga dikatakan “setiap orang disebut utuh jika ia berhubungan serasi tetapi dinamis ke luar maupun di dalam, setiap komponen kepribadian, keberadaan, kehidupan dan perilakunya berkembang dengan serasi, selaras dan seimbang.” Walaupun membangun manusia di luar batas kemampuan dan kelayakan manusiawi adalah mustahil, namun kita harus berusaha untuk terus meningkatkan corak dan mutu kehidupan, meningkatkan akal dan moral kita, sesuai dengan hakekat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Dalam konsep keselarasan, terkandung makna pemerataan, konsep pemerataan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: a). Pemerataan untuk mengatasi kesenjangan tingkat pendapatan/kemampuan berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat; b) pemerataan untuk mengatasi kesenjangan antara berbagai sub wilayah yang mempunyai potensi serta infra struktur yang berbeda.⁴

Dikalangan para perencana pembangunan formal di Indonesia, partisipasi rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan,

³ Corralie Bryant dan Louise G. While, *Manajemen Pembangunan : untuk negara berkembang*, LP3ES Jakarta, 1989, hlm 21

⁴ INFID. *Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hlm 43

baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah.⁵

Padahal yang seharusnya dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah memandang partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai suatu kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Dengan memperhatikan sejarah pertumbuhan negara-negara maju, dapat dilihat karakteristik pada waktu itu dalam menuju masyarakat modern, yaitu:

1. suatu masa persiapan yang melibatkan perubahan sosial, politik maupun ekonomi.
2. kenaikan yang pesat dalam tingkat kemajuan teknologi.
3. perubahan-perubahan yang besar dalam organisasi industri yang menyangkut: penggunaan modal yang bertambah banyak, pembangunan unit-unit yang berskala produksi lebih besar, disesuaikan tenaga kerja, dan meningkatnya efisiensi ekonomi.

2.2. Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Proses ini dapat divisualkan sebagai proses pembuatan kebijakan yang memiliki lima tahap penting, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (William N. Dunn, 1999:43).

Menurut Walter Williams (seperti dikutip oleh William N. Dunn, 1999:118), analisis kebijakan merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan; secara konseptual tidak termasuk mengumpulkan informasi.

William N. Dunn (1999:117) juga mengatakan bahwa hubungan antara komponen-komponen informasi kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan

⁵ Loekman Soetrisno (2), Menuju Masyarakat Partisipatif, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 221.

memberikan landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan, yaitu:

1. *Analisis kebijakan prospektif* yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung mencari cara beroperasinya para ekonom, analisis sistem, dan peneliti operasi.
2. *Analisis Kebijakan Retrospektif*, yaitu penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan.
3. *Analisis Kebijakan yang terintegrasi* adalah bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil.

2.3. Pengertian Alokasi Sumber Daya

Pengertian umum dari alokasi sumber daya adalah transformasi suatu sistem dari suatu bentuk ke bentuk lain (Bambang Permadi: 1992). Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.

Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, termasuk juga hasil laut. Ketersediaan sumber daya alam tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk

menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Selain dari faktor ekonomi di atas, pertumbuhan ekonomi dapat juga dipengaruhi oleh faktor non ekonomi, seperti kondisi kultur sosial yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

2.4. Pengertian dan Peranan Ilmu Pembangunan Wilayah

Budiharsono (2001) menyebutkan bahwa ilmu pembangunan wilayah merupakan wahana lintas disiplin yang mencakup berbagai teori dan ilmu terapan yaitu: geografi, ekonomi, sosiologi, matematika, statistika, ilmu politik, perencanaan daerah, ilmu lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu ilmu pengetahuan wilayah setidaknya perlu ditopang oleh 6 pilar analisis, yaitu: (1) analisis biogeofisik; (2) analisis ekonomi; (3) analisis sosiobudaya; (4) analisis kelembagaan; (5) analisis lokasi; (6) analisis lingkungan. (Rustiadi : 2002) menyebutkan bahwa lingkup kajian perencanaan pengembangan wilayah sangat luas, sebagai bidang kajian yang membentang dari lingkup ilmu yang bersifat multidisiplin, mencakup bidang-bidang ilmu mengenai fisik, sosial ekonomi hingga manajemen.

Dari sisi proses kajian pembangunan mencakup hal-hal mengenai: (1) aspek pemahaman, yakni aspek yang menekankan pada upaya memahami fenomena fisik alamiah hingga sosial ekonomi di dalam dan antar wilayah, dalam konteks ini pengetahuan mengenai teknik-teknik analisis dan model-model sistem merupakan alat (*tools*) penting yang perlu dipahami, untuk mengenal dan mendalami permasalahan-permasalahan maupun potensi-potensi pembangunan wilayah, (2) aspek perencanaan, mencakup proses formulasi masalah, teknik-teknik desain dan pemetaan hingga perencanaan, dan (3) aspek kebijakan, mencakup pendekatan-pendekatan evaluasi, perumusan tujuan-tujuan pembangunan serta proses melaksanakannya, mencakup proses-proses politik, administrasi, dan manajerial pembangunan.

Secara harfiah, (Rustiadi : 2002) juga menyebutkan bahwa *regional science* dapat dipandang sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek dan kaidah-kaidah kewilayahan, dan mencari cara-cara yang efektif dalam mempertimbangkan aspek-aspek dan kaidah-kaidah tersebut ke dalam proses perencanaan pengembangan kualitas hidup dan kehidupan manusia. Dalam hal ini *regional science* tidak didefinisikan sebagai ‘ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan pembangunan di suatu wilayah’, karena pengertian demikian tidak memberikan spesifikasi yang jelas terhadap bidang keilmuan *regional science*. Secara ilustrasi, walaupun kata ‘di suatu wilayah’ itu dihilangkan, kita tetap bisa menangkap suatu pemahaman bahwa setiap pembangunan pasti dilakukan pada suatu wilayah atau areal tertentu. Padahal penambahan kata ‘wilayah’ ini dimaksudkan untuk memberikan kekhasan bahwa *regional science* adalah bidang ilmu yang berbeda dengan bidang-bidang ilmu perencanaan pembangunan lainnya, yakni dengan adanya penekanan terhadap pentingnya pertimbangan dimensi kewilayahan.

Pengembangan wilayah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan memberikan kontribusi kepada pembangunan suatu wilayah. Konsep pengembangan wilayah adalah suatu upaya dalam mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya dengan penyeimbangan dan penyerasian pembangunan antar daerah, antar sektor serta antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah (Anwar, 1999)

2.5. The Analytic Hierarchy Process (AHP)

2.5.1. Prinsip Dasar AHP

The Analytic Hierarchy Process, yang selanjutnya disebut AHP adalah prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif. Atribut-atribut tersebut secara matematik dikuantitatif dalam satu set perbandingan berpasangan. Kelebihan AHP dibandingkan dengan yang lainnya karena adanya stuktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai kepada sub-sub kriteria yang paling mendetail. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi

inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan (Saaty, 1990)

AHP adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya.⁶ AHP dapat juga diartikan sebagai suatu metode pengambilan keputusan bentuknya sederhana, fleksibel dan berdaya guna besar (powerfull) untuk mendukung suatu proses pengambilan keputusan yang multi kriteria, multi tujuan, dan penuh dengan situasi kompleks.⁷ Sehingga AHP dapat dikatakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif. Karena menggunakan input persepsi manusia, model ini dapat mengolah data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, jadi kompleksitas permasalahan yang ada disekitar kita dapat didekati dengan baik oleh model AHP ini. Ciri utama dari model ini adalah menggunakan hirarki fungsional. Suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan kedalam kelompok-kelompok, kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki.

Inti dari proses AHP adalah membandingkan tingkat prioritas beberapa elemen atau variabel pada suatu level atau tingkatan dari suatu susunan hierarki. Hasil dari proses perbandingan tersebut, setiap elemen diberi bobot secara numerik sehingga variabel yang mendapat prioritas tertinggi dalam akhir proses analisis akan menjadi pilihan yang terbaik.

Dalam penggunaan model AHP untuk mengambil suatu keputusan, juga tidak terlepas dari aksioma-aksioma yang dimiliki model AHP. Pengertian aksioma sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah kebenarannya atau yang pasti terjadi. Pelanggaran pada satu aksioma akan menyebabkan tidak validnya model yang digunakan, untuk itu perlu menjadi perhatian oleh pemakai model AHP. Aksioma-aksioma model AHP tersebut adalah:⁸

1. ***Reciprocal Comparison***, artinya si pengambil keputusan harus bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensinya itu

⁶ Bambang Permadi S, "AHP", PAU-EK-UI, Jakarta, 1992, hlm 5

⁷ Bambang Priatmono, Mengenal AHP Analisis Ulang Terhadap Studi Pemindahan Ibukota Kalimantan Selatan, INSAHP, Jakarta, 2000, hlm 3

⁸ Lihat Bambang Permadi S, SE. OP.Cit, hal. 18

sendiri harus memenuhi syarat resiprokal yaitu kalau A lebih disukai dari B dengan skala x , maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/x$

2. **Homogeneity**, artinya preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak dipenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogenous dan harus dibentuk suatu “cluster” (kelompok elemen-elemen) yang baru.
3. **Independence**, artinya preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh obyektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah ke atas. Artinya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu level dipengaruhi atau tergantung oleh elemen-elemen dalam level di atasnya.
4. **Expectations**, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hierarki diasumsikan lengkap. apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka sipengambil keputusan tidak memakai seluruh criteria dan atau obyektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap.

Selain beberapa aksioma di atas, terdapat beberapa kelebihan dari model AHP, yaitu :⁹

1. Kesatuan
AHP menyediakan suatu model tunggal yang mudah dimengerti, fleksibel untuk berbagai permasalahan yang tidak terstruktur.
2. Pengulangan proses;
AHP memungkinkan orang mempertajam definisi permasalahan serta memperbaiki penilaian dan pengertian melalui proses pengulangan.
3. Penilaian dan Konsensus;
AHP tidak memaksakan consensus, tetapi membuat sintesa atas berbagai penilaian yang berbeda-beda.

⁹ Thomas L Saaty, Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, IPPM dan PT. Pustaka Binaman Pessindo, Jakarta, 1993, hal. 25.

4. Tawar menawar;
AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai factor dalam suatu sistem dan memungkinkan seseorang untuk memilih alternative terbaik sesuai dengan tujuan mereka.
5. Sintesa;
AHP menuntun pada suatu taksiran menyeluruh berkenaan dengan kelebihan setiap alternative yang ada.
6. Kompleksitas;
AHP memadukan ancangan deduktif dan ancangan sistematik dalam memecahkan persoalan yang kompleks.
7. Interdependensi;
AHP dapat mengatasi saling ketergantungan elemen-elemen dan tidak menuntut adanya pemikiran linier.
8. Penstrukturan Hirarki;
AHP menggambarkan kecenderungan alamiah suatu pola pikir, yaitu dengan memilah-milah elemen suatu system ke dalam berbagai tingkatan dan mengelompokkan unsure yang sejenis dalam setiap tingkat.
9. Pengukuran;
AHP menyediakan suatu skala untuk mengukur hal-hal yang tanpa wujud serta metode untuk menetapkan prioritas.
10. Konsistensi
AHP mampu melacak konsistensi logis dari pertimbangan yang diberikan untuk menetapkan berbagai prioritas.

Disamping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, Model AHP juga tidak luput dari kelemahan. Ketergantungan model AHP dengan input yang berupa persepsi seorang ekspert akan membuat hasil akhir dari model ini menjadi tidak ada artinya apabila si ekspert memberikan penilaian yang keliru. Kondisi ini ditambah dengan belum adanya criteria yang jelas untuk seorang ekspert, membuat orang sering ragu-ragu dalam menanggapi solusi yang dihasilkan model ini. Kebanyakan orang akan bertanya apakah persepsi seseorang ekspert itu dapat mewakili kepentingan orang banyak atau tidak dan apakah si responden tersebut

pantas dianggap ekspert atau tidak. Keragu-raguan seperti ini tidak lain tidak lain diakibatkan oleh kenyataan bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda dengan orang lain (Bambang Permadi;1992).

2.5.2. Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

Berbagai masalah yang kita hadapi dapat dipecahkan dengan model AHP, diantaranya untuk mengalokasikan sumber daya, analisis keputusan manfaat atau biaya, menentukan peringkat beberapa alternatif, melaksanakan perencanaan ke masa depan yang diproyeksikan dan menetapkan prioritas pengembangan suatu unit usaha dan permasalahan kompleks lainnya. Secara umum, langkah-langkah dasar dari AHP dapat diringkas dalam penjelasan berikut ini:

1. Mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan. Bila AHP digunakan untuk memilih alternatif atau penyusunan prioritas alternatif, maka pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif.
2. Menyusun masalah dalam struktur hirarki. Setiap permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terstruktur.
3. Menyusun prioritas untuk tiap elemen masalah pada tingkat hirarki. Proses ini menghasilkan bobot elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Langkah pertama pada tahap ini adalah menyusun perbandingan berpasangan yang ditransformasikan dalam bentuk matriks, sehingga matriks ini disebut matriks perbandingan berpasangan.
4. Melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada tiap tingkat hirarki. Konsistensi perbandingan ditinjau dari per matriks perbandingan dan keseluruhan hirarki untuk memastikan bahwa urutan prioritas yang dihasilkan didapatkan dari suatu rangkaian perbandingan yang masih berada dalam batas-batas preferensi yang logis.
5. Melakukan pengujian konsistensi hirarki. Pengujian ini bertujuan untuk menguji kekonsistensian perbandingan antara kriteria yang dilakukan untuk seluruh hirarki.

2.5.2.(1) Menyusun Hirarki

Hirarki adalah abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan juga dampak-dampak pada system. Penyusunan hirarki atau struktur keputusan dilakukan untuk menggambarkan elemen sistem atau alternatif keputusan yang teridentifikasi.¹⁰

Menurut Saaty, ada tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan AHP, yaitu prinsip menyusun hirarki (*Decomposition*), prinsip menentukan prioritas (*Comparative Judgement*), dan prinsip konsistensi logis (*Logical Consistency*). Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam proses menentukan tujuan dan hirarki tujuan, perlu diperhatikan apakah kumpulan tujuan beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang dihadapi. Dalam memilih kriteria-kriteria pada setiap masalah pengambilan keputusan perlu memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Lengkap, kriteria harus lengkap sehingga mencakup semua aspek yang penting, yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk pencapaian tujuan.
- b. Operasional, dalam artian bahwa setiap kriteria ini harus mempunyai arti bagi pengambil keputusan, sehingga benar-benar dapat menghayati terhadap alternatif yang ada, disamping terhadap sarana untuk membantu penjelasan alat untuk berkomunikasi.
- c. Tidak berlebihan, Menghindari adanya kriteria yang pada dasarnya mengandung pengertian yang sama.
- d. Minimum, diusahakan agar jumlah kriteria seminimal mungkin untuk mempermudah pemahaman terhadap persoalan, serta menyederhanakan persoalan dalam analisis.

Secara umum, hirarki dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu hirarki struktural dan hirarki fungsional. Hirarki struktural adalah hirarki yang menguraikan permasalahan yang rumit atau kompleks menjadi elemen-elemen,

¹⁰ Dharma Tintri E. Sudarsono, *Penerapan Analitical Hierarchy Process (AHP) Untuk Pemilihan Metode Audit PDE Oleh Auditor Internal*, (Artikel), 2004

baik pada level yang sama ataupun tidak, berdasarkan ciri atau besaran tertentu seperti jumlah, bentuk, ukuran dan warna. Sedangkan hirarki fungsional mengurai permasalahan menjadi elemen-elemen berdasarkan hubungan yang esensial. Jika pada hirarki struktural hubungan antar level hanya berdasarkan atas ciri dan besaran tertentu, maka pada hirarki fungsional hubungan suatu level akan mempengaruhi level di bawahnya (Apri Nuryanti : 2003).

Terdapat beberapa keunggulan dari suatu hirarki, antara lain :¹¹

- a. menggambarkan sistem yang dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana perubahan prioritas pada tingkat di atas akan mempengaruhi tingkat di bawahnya.
- b. Memberikan informasi yang sangat mendetail tentang struktur dan fungsi sistem pada tingkat yang rendah, sekaligus memberikan gambaran mengenai pelaku dan tujuan pada tingkat di atasnya. Batasan dari elemen di suatu tingkat paling baik disajikan pada level berikutnya.
- c. Sistem secara alamiah merupakan suatu hirarki
- d. Stabil, dimana sedikit perubahan mempunyai sedikit pengaruh dan fleksibel dimana tambahan pada hirarki yang sudah berstruktur dengan baik tidak akan merusak kinerjanya.

2.5.2. (2) Comparative Judgement

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen (*pairwise comparison*) dalam suatu level tertentu dalam kaitannya dengan level yang di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini akan disusun dalam bentuk matriks perbandingan yang dinamakan matriks *pairwise comparison*. Kepentingan relatif antar elemen tersebut bersifat resiprokal selama $a_{mn} = 1/a_{nm}$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel matriks sebagai berikut:

¹¹ Rigiyanto, *Perencanaan Kebijakan Pembangunan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Pengembangan Sistem Agribisnis di DI Jakarta Melalui Pendekatan Sistem*, (Tesis), 1999

Tabel 2.1
Matriks Perbandingan

A	A1	A2	An
A1	W1/W1	W1/W2	W1/Wn
A2	W2/W1	W2/W2	W2/Wn
....				
Am	Wm/W1	Wm/W2	Wm/Wn

2.5.2.(3) Synthesis of Priority

Merupakan proses mencari atau mengukur bobot prioritas setiap elemen pada suatu tingkatan dalam matriks perbandingan dengan metode *eigenvector* dan *eigevale*. Eigenvector adalah sebuah vektor yang apabila dikalikan sebuah matriks hasilnya adalah vektor itu sendiri dikalikan dengan bilangan skala atau parameter yang tidak lain adalah eigenvalue.¹²

$$A \cdot W = \lambda \cdot W$$

Dimana: A = Matriks Pairwise comparison

λ = Eigen value

W = Eigen vektor

2.5.2.(4) Logical Consistency

Konsistensi memiliki dua makna, pertama adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Arti kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

¹² Lihat Bambang Permadi, Op. Cit. Hal. 11

BAB 3

DISKRIPSI PROVINSI BENGKULU

3.1 Letak Geografis dan Pembagian Wilayah Administrasi

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dimana terletak pada pantai sebelah barat pulau Sumatera, secara geografis Provinsi Bengkulu terletak pada posisi 101 derajat 1 menit sampai 104 derajat 46 menit Bujur Timur dan 2 derajat 16 menit sampai 5 derajat 13 menit Lintang Selatan, yang membujur sejajar dengan bukit barisan dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan panjang pantai 525 km dan luas teritorial 48.075 km². Adapun batas wilayah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia

Dibentuknya Provinsi Bengkulu pada tahun 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (LN Tahun 1967 Nomor 19, TLN Nomor 2828). Pada awal dibentuknya Provinsi Bengkulu terdapat 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya, namun sejak diberlakukannya otonomi daerah Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran wilayah menjadi 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya.

Luas wilayah daratannya 1.978.870 ha atau 19.788,70km², terdiri dari 9 kabupaten, 1 kotamadya dan 99 wilayah kecamatan. Pembagian kabupaten dan kecamatan serta luas wilayah dapat dilihat pada tabel 3.1. Topologi wilayah Bengkulu dapat dirinci sebagai berikut:

- 0 – 100 m dpl : 708.133 ha (35,78%)
- 100 – 500 m dpl : 625.399 ha (31,60%)
- 500 – 1000 m dpl : 406.044 ha (20,52%)
- > 1.000 m dpl : 239.294 ha (12,09%)

Tabel 3.1
Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Luas Wilayah per Kabupaten
di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Bengkulu Selatan	11	14	122	1.186,10
2.	Rejang Lebong	15	29	128	1.639,98
3.	Bengkulu Utara	12	5	205	4.426,60
4.	Kaur	15	4	152	2.369,05
5.	Seluma	14	3	165	2.400,44
6.	Muko-Muko	5	1	83	4.036,70
7.	Lebong	5	5	72	1.929,00
8.	Kepahiang	8	3	91	665,00
9.	Bengkulu Tengah	10	1	102	1.223,94
10.	Kota Bengkulu	8	67	-	144,52

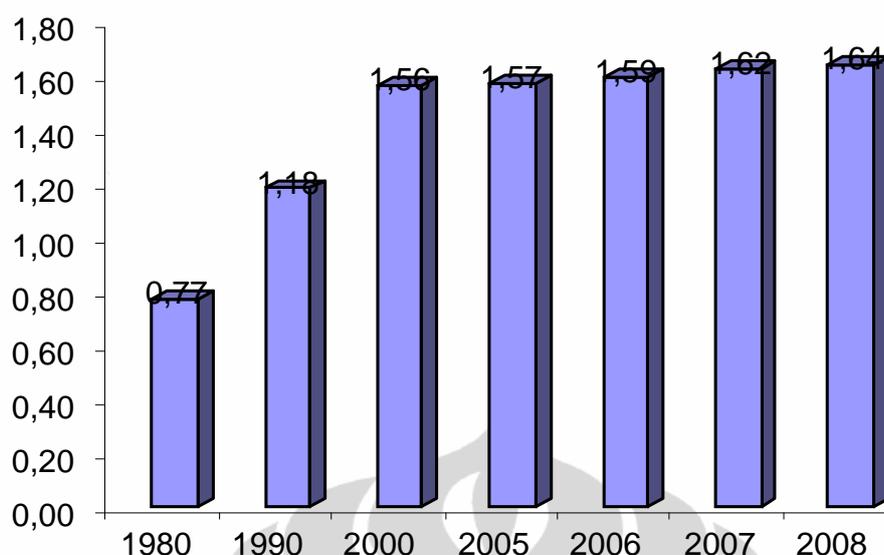
Sumber : Depdagri

Provinsi Bengkulu termasuk daerah rawan bencana gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Hal ini disebabkan karena pada bagian tengah di sepanjang pegunungan Bukit Barisan dilalui oleh sesar semangko, sedangkan di Samudera Indonesia terdapat pertemuan dua lempeng benua Australia dan Asia, selain itu Bengkulu juga rawan terjadinya tsunami.

3.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2008 diperkirakan mencapai 1,64 juta jiwa. Ditinjau dari jumlahnya, perkembangan penduduk Provinsi Bengkulu tergolong cepat. Pada Gambar 4.1 tampak bahwa pada kurun waktu 1980-2008 atau dalam waktu 25 tahun penduduk Provinsi Bengkulu telah berkembang lebih dari 2 (dua) kali lipat, yaitu 0,77 juta tahun 1980 menjadi 1,64 juta tahun 2008.

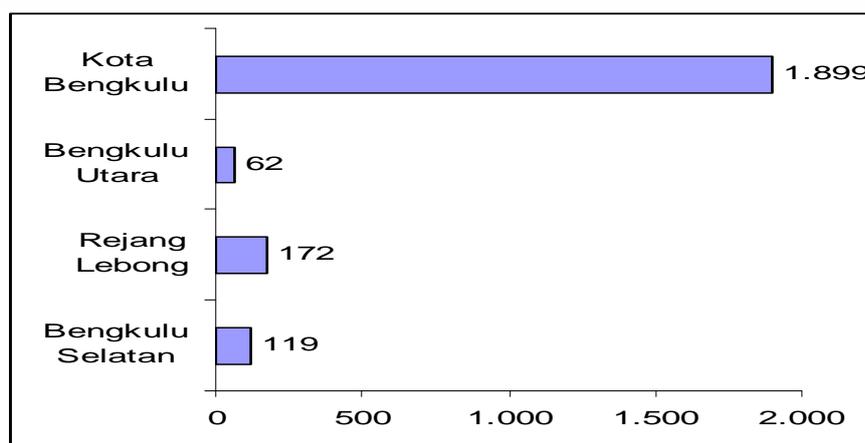
Pesatnya perkembangan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 1980-2008 secara nyata terlihat dari angka pertumbuhan penduduknya. Pertumbuhan penduduk yang drastis terjadi pada kurun waktu 1980-1990, pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu rata-rata sebesar mencapai 4,38% per tahun. Sedangkan pada kurun waktu 1990-2000 pertumbuhan penduduknya rata-rata sebesar 2,94% per tahun dan dalam kurun waktu 2005-2007 angka pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu 1,59% per tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu
1980-2008 (Juta Jiwa)

Dilihat dari kepadatan penduduknya, penduduk Provinsi Bengkulu tergolong jarang. Pada tahun 2008 kepadatan penduduk di Provinsi Bengkulu sebesar 83 jiwa/km². Jika dilihat dari 3 Kabupaten Induk dan Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu, maka daerah yang paling padat penduduknya adalah Kota Bengkulu dengan kepadatan sebesar 1.899 jiwa/km², sedangkan daerah yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kabupaten Bengkulu Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 62 jiwa/km². Dari gambar 3.2 dapat dilihat kepadatan penduduk Provinsi Bengkulu di tiga Kabupaten Induk dan Kota Bengkulu dimana menunjukkan tidak meratanya penyebaran penduduk di Provinsi Bengkulu, terdapat perbedaan yang besar antara Kota Bengkulu dengan daerah lainnya.



Sumber : Badan pusat Statistik (data olahan)

Gambar 3.2.
Kepadatan Penduduk Tiga Kabupaten Induk dan Kota Bengkulu
di Provinsi Bengkulu Tahun 2008

3.3 Perekonomian Provinsi Bengkulu

Dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil dapat diukur dengan melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi merupakan proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output), maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat.

Perekonomian Provinsi Bengkulu terus mengalami pertumbuhan, hal ini terlihat sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 rata-rata pertumbuhan ekonomi Bengkulu mencapai 5,68 persen, dimana pada tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu sebesar 5,82 persen, tahun 2006 tumbuh 5,95 persen, tahun 2007 tumbuh 6,03 persen dan tahun 2008 tumbuh menjadi 4,93 persen. Pendapatan Domestik Regional Bruto Bengkulu dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.2
PDRB Bengkulu Tahun 2004-2008 Berdasarkan Harga Konstan
(Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
1. Pertanian	2.345	2.481	2.624	2.772	2.915
2. Pertambangan dan Penggalian	185	198	212	224	235
3. Industri Pengolahan	252	256	270	286	294
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	25	27	29	31	33
5. Kontruksi	172	181	191	206	219
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.201	1.254	1.340	1.433	1.469
7. Pengangkutan dan komunikasi	507	540	565	594	608
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	273	295	310	325	337
9. Jasa – Jasa	937	1.007	1.070	1.138	1.244
Produk Domestik Regional Bruto	5.896	6.239	6.611	7.009	7.354

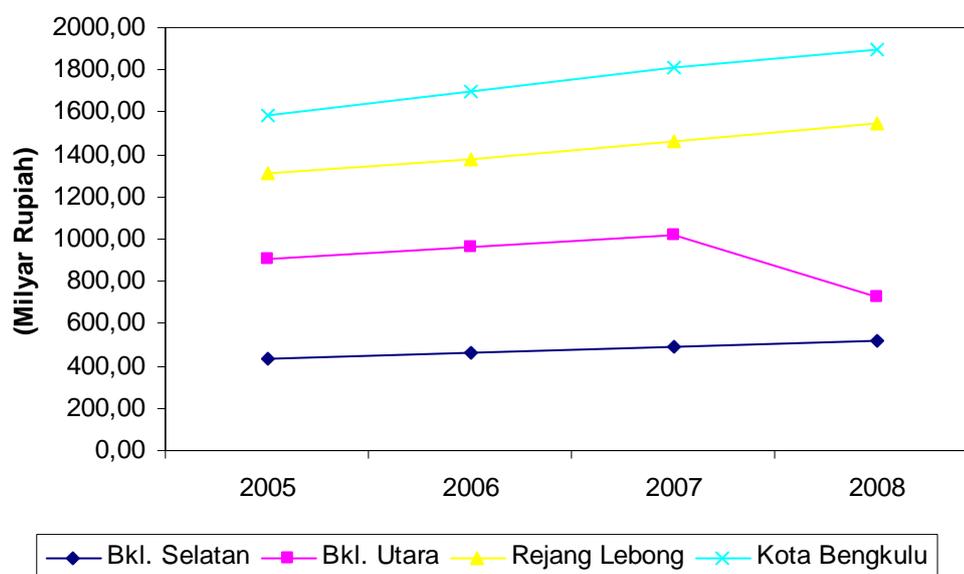
Sumber : BPS Prov. Bengkulu

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat laju pertumbuhan sektoral Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2008 setiap sektor mengalami pertumbuhan, sektor pertanian yang memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 5,17%, Sektor pertambangan dan penggalian juga tumbuh sebesar 4,88%, sektor industri pengolahan tumbuh 3,12%, sektor listrik gas dan air bersih tumbuh 7,16%, sektor bangunan tumbuh 5,94%, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 2,30% dan sektor jasa-jasa sebesar 9,36%. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yaitu sebesar 6,03%, maka pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu jauh berada dibawah tahun sebelumnya (2007) yaitu hanya tumbuh sebesar 4,93%. Salah satu penyebabnya adalah peristiwa ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 2008 yang melanda dunia yaitu krisis global Amerika. Akibatnya harga komoditi perkebunan seperti sawit dan karet terpuruk ketingkat yang rendah, hal ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang juga mengalami penurunan karena salah satu komoditi andalan dari sektor perkebunan di Bengkulu adalah dari perkebunan sawit dan karet.

Partisipasi masyarakat Bengkulu dalam pembangunan ekonomi cukup tinggi, namun karena keterbatasan kemampuan dan keterampilan serta perilaku ekonomi masyarakat yang belum mampu menggerakkan roda perekonomian

sesuai dengan tuntutan, sehingga PDRB perkapita masing-masing penduduk relatif rendah. Pelaku ekonomi di daerah ini pada umumnya memiliki profile usaha kecil dan menengah, manajemen tradisional, orientasi ke dalam, penggunaan teknologi sederhana, bergerak disektor riil dan masih berorientasi pada penanganan proyek-proyek pemerintah (BPS Prov. Bengkulu;2008).

Dari tiga kabupaten induk dan kota tiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan ekonomi kecuali untuk Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2008, hal ini dikarenakan adanya pemekaran wilayah Bengkulu Tengah. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten di Provinsi Bengkulu terjadi pertumbuhan yang hampir merata tiap daerahnya. Walaupun mengalami pertumbuhan, tetapi terdapat perbedaan besarnya PDRB kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, terutama untuk Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun perkembangan pertumbuhan PDRB kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini:



Gambar 3.3
PDRB Kabupaten dan Kota
di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2008

3.4 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara umum, baik itu pada masyarakat di daerah maupun pada suatu negara Pendapatan perkapita

adalah jumlah seluruh balas jasa faktor produksi yang diterima setiap penduduk secara rata-rata sebagai akibat penggunaan faktor produksi yang dimiliki penduduk dalam proses produksi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat, karena penilaian kemakmuran tergantung pada PDRB, jumlah penduduk dan pemerataan pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah diikuti pula oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi maka secara matematis rata-rata PDRB perkapita dan pendapatan perkapitanya akan lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah yang pertumbuhan penduduknya tidak terlalu tinggi. Perkembangan pendapatan perkapita Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini:

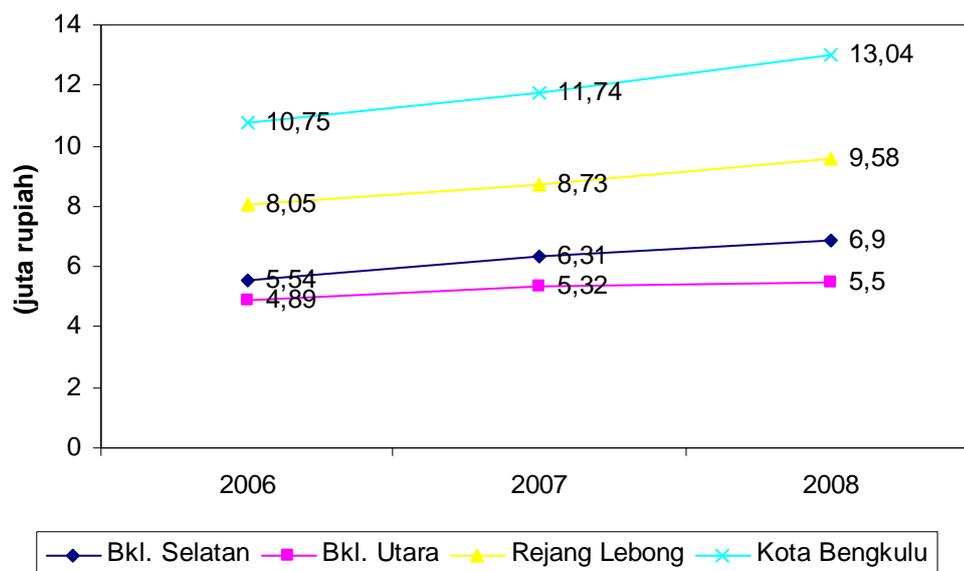
Tabel 3.3
Perkembangan Pendapatan Perkapita Provinsi Bengkulu
Tahun 2005-2008 atas dasar harga konstan Tahun 2000(Juta Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Per Kapita		% Kenaikan	
		Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
1	2005	3,98	3,98	-	-
2	2006	4,15	4,15	4,27	4,27
3	2007	4,34	4,34	4,58	4,58
4	2008	4,48	4,48	3,23	3,23
	Rata-rata perubahan			4,03	4,03

Sumber : BPS Prov. Bengkulu

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan masyarakat di Provinsi Bengkulu semuanya berasal dari non migas. Terlihat dari tahun 2005-2008 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, secara rata-rata meningkat sebesar 4,03%.

Dilihat dari pendapatan regional perkapita kabupaten dan kota tahun 2006-2008 di Provinsi Bengkulu terdapat perbedaan pemerataan pendapatan antar daerah. walaupun PDBR Kabupaten Bengkulu Utara lebih besar dari PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan, namun pendapatan perkapita Bengkulu Utara lebih rendah. Hal ini menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat di Bengkulu Utara berada di bawah kabupaten dan kota lainnya.



Gambar 3.4
Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten dan Kota
di Provinsi Bengkulu Tahun 2006-2008

3.5 Potensi-Potensi Daerah

3.5.1 Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu

Salah satu yang menjadi motor penggerak perekonomian di Provinsi Bengkulu adalah sektor pertanian, dari 9 Kabupaten dan 1 Kotamadya yang ada di Bengkulu, semuanya mengandalkan sektor pertanian dalam perekonomiannya. Sektor ini tidak saja mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang relatif lebih besar.

Menurut data Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, luas lahan sawah yang mempunyai saluran irigasi teknis seluas 22.598 ha, sawah non irigasi teknis seluas 68.232 ha dan luas lahan palawija, hortikultura dan sayur-sayuran seluas 386.881 ha. Sedangkan, panjang saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, secara keseluruhan sepanjang 583,89 km. dengan spesifikasi tersebut, Provinsi Bengkulu berhasil memproduksi padi sebanyak 3,755 ton/ha.

Berdasarkan data Departemen Kehutanan, luas hutan seluas 920.753,50 ha dengan hasil hutan Kayu Bulat sebanyak 29.945,10 m³ kayu gergajian sebanyak 23.151,94 m³ rotan: 177.200 batang dan damar: 312.500 batang. Sedangkan menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, tercatat luas Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas 444.882 ha, luas Hutan Lindung

252.042 ha, hutan produksi terbatas seluas 182.210 ha, hutan produksi tetap seluas 34.965 ha dan Hutan Fungsi Khusus seluas 6.865 ha.

Di bidang kelautan dan perikanan, menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan, Provinsi Bengkulu memiliki potensi sebesar 145.334 ton dengan hasil 39.203,3 ton. Pada bidang produksi peternakan, Departemen Pertanian mengeluarkan data, yakni sapi potong sebanyak 84.943 ekor, sapi perah sebanyak 194 ekor, kerbau sebanyak 49.024 ekor, kambing sebanyak 110.611 ekor, domba sebanyak 6.655 ekor, babi sebanyak 2.153 ekor, kuda sebanyak 65 ekor, ayam buras sebanyak 2.797.876 ekor, entok sebanyak 48.029 ekor, angsa sebanyak 6.210 ekor dan puyuh sebanyak 10.717 ekor.

Potensi perkebunan sangat ditunjang dengan luas lahan perkebunan seluas 1.978.870 ha dengan hasil antara lain sawit sebanyak 703.335,60 ton, karet 72.248,89 ton, kopi robusta 55.461,39 ton, kopi arabika 2.466,36 ton, kakao 1.523,93 ton, kelapa dalam 5.983,21 ton, lada 3.284,92 ton, cengkeh 64,26 ton, aren 1.862,40 ton, kayu manis 719,06 ton, pinang 465,59 ton dan kemiri 3.082,90 ton.

Data dari Departemen ESDM, Provinsi Bengkulu memiliki potensi pertambangan dan energi diantaranya lima yang terbesar, yaitu: batu bara, emas, pasir besi, batu apung, bentonit. Hasil produksi batu bara tercatat sebanyak 673.542.000 ton.

Sumber: Indonesia Tanah Airku (2007).

3.5.2 Pariwisata

Provinsi Bengkulu memiliki obyek wisata yang beragam, baik wisata alam, budaya maupun sejarah. Wisata alamnya antara lain Bukit Kaba di Curup, Bukit Belerang Semaleko di Lebong Selatan, Bunga Raflesia Arnoldi di Taba Pananjung. Rekreasi pantainya antara lain pantai Panjang Nala di Gading Cempaka, pantai pasir putih Pulau Baai di Selebar, danau di Selebar, danau Tes di Lebong Selatan, cagar alam Pagar Gunung di Kepahyang, cagar alam Lubuk Tapi di Pino, dan sebagainya. Wisata budayanya antara lain kesenian Tabot, tarian rakyat Enggano, dan kerajinan kain Besurek. Wisata sejarahnya meliputi rumah peninggalan Bung Karno, Benteng Malborough, dan monumen Thomas Par di Teluk Segara.

3.5.3 Sosial Budaya Provinsi Bengkulu

Terdapat empat bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bengkulu, yakni : Bahasa Melayu, Bahasa Rejang, Bahasa Pekal, Bahasa Lembak. Penduduk Provinsi Bengkulu berasal dari tiga rumpun suku besar terdiri dari Suku Rejang, Suku Serawai, Suku Melayu. Sedangkan lagu daerah yaitu Lalan Balek.

Di bidang kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ritual keagamaan mayoritas penduduk yang beragama Islam secara kuantitatif cukup baik. Kesadaran dikalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antar umat beragama yang aman, damai dan saling menghargai cukup baik.

Disamping itu, terdapat adat istiadat yang cukup akrab dengan masyarakat Bengkulu, diantaranya: Kain Bersurek, merupakan kain bertuliskan huruf Arab gundul. Kepercayaan masyarakat di Provinsi Bengkulu umumnya atau sebesar 95% lebih menganut agama Islam. Upacara adat juga banyak dilakukan masyarakat di Provinsi Bengkulu seperti, sunatan rasul, upacara adat perkawinan, upacara mencukur rambut anak yang baru lahir. Salah satu upacara tradisional adalah upacara “TABOT” yaitu suatu perayaan tradisional yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Muharram setiap tahunnya, untuk memperingati gugurnya Hasan dan Husen cucu Nabi Muhammad SAW oleh keluarga Yalid dari kaum Syiah, dalam peperangan di Karbala pada tahun 61 Hijriah. Pada perayaan TABOT tersebut dilaksanakan berbagai pameran serta lomba ikan-ikan, telong-telong, serta kesenian lainnya yang diikuti oleh kelompok-kelompok kesenian yang ada di Provinsi Bengkulu, sehingga menjadikan ajang hiburan rakyat dan menjadi salah satu kalender wisatawan tahunan.

Falsafah hidup masyarakat setempat, “Sekundang setungguan Seio Sekato”. Bagi masyarakat Bengkulu pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama yang sering kita dengar dengan bahasa pantun yaitu: ”Kebukit Samo Mendaki, Kelurah Samo Menurun, Yang Berat Samo Dipikul, Yang Ringan Samo Dijinjing”, artinya dalam membangun, pekerjaan seberat apapun jika sama-sama dikerjakan bersama akan terasa ringan juga. Selain itu, ada

pula "Bulek Air Kek Pembukuh, Bulek Kata Rek Sepakat", artinya bersatu air dengan bambu, bersatunya pendapat dengan musyawarah.

3.6 Profil Kabupaten/Kota

Dalam penelitian ini penulis mengambil tiga kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu sebagai objek penelitian, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan dan kota Bengkulu.

3.6.1 Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah 151.576 hektar yang terdiri dari 15 wilayah kecamatan, wilayah terluas adalah kecamatan Padang Ulak Tanding yaitu sebesar 21.796 hektar, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup Tengah dengan luas wilayah sebesar 342 hektar. Pembagian luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong

No	Kecamatan	Luas	
		Ha	Persentase
1.	Curup	395	0,44
2.	Curup Utara	5.918	6,59
3.	Curup Selatan	4.796	0,91
4.	Curup Tengah	342	5,34
5.	Curup Timur	821	0,38
6.	Sindang Kelingi	12.713	5,79
7.	Sindang Dataran	6.647	3,03
8.	Kota Padang	17.229	9,82
9.	Sindang Beliti Ilir	19.254	10,96
10.	Bermani Ulu	9.876	6,14
11.	Bermani Ulu Raya	14.636	9,09
12.	Padang Ulak Tanding	21.796	15,68
13.	Binduriang	8.846	6,35
14.	Sindang Beliti Ulu	12.515	8,99
15.	Selupu Rejang	15.792	10,49
	Jumlah	151.576	100,00

Sumber: BPS Kab. Rejang Lebong

Apabila dilihat dari topografi wilayah Kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian 100-1.000 meter dari atas permukaan laut. Untuk ketinggian 100 meter dari permukaan laut seluas 2.250 ha, 100-500 m seluas 48.324 ha, 500-1.000 m seluas 64.345 ha dan pada ketinggian 1.000 m keatas seluas 36.657 ha. Untuk kemiringan tanah, sebagian besar wilayah Kabupaten Rejang Lebong memiliki tingkat kemiringan yang cukup tinggi, hal ini mengingat Kabupaten Rejang Lebong berada di daerah pegunungan dengan wilayah yang berbukit-bukit. 34,55% dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong berada pada kemiringan di atas 40⁰, sedangkan 30,02% dengan kemiringan 15⁰-40⁰, untuk sisanya 35,43% pada kemiringan 0-15⁰. Oleh karena itu kelestarian lingkungan perlu dijaga dengan baik, karena sangat rawan terjadinya bencana longsor, apalagi mengingat curah hujan di Kabupaten Rejang Lebong cukup tinggi.

Jenis Tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari Tanah Alluvial 7.626 ha, Andosol 38.215 ha, Regosol 4.926 ha, Padsolik Merah/Kuning andosol 17,241 ha, Latosol 18.621 ha, Komplek Padsolik Merah Kuning Litosol 14.216 ha dan Komlek Padsolik Coklat Podsol Latosol 50.731 ha. Curah Hujan 74mm–684mm, suhu udara 16,2⁰C – 32,3⁰C dan kelembaban nisbi udara rata-rata 89%.

Kabupaten Rejang Lebong mempunyai visi pembangunan yaitu Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, damai dan kompetitif dengan didukung oleh agribisnis dan pariwisata, artinya pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menjadikan pariwisata dan pertanian sebagai fokus pembangunan ekonomi daerah.

3.6.2 Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 4.426,60 km² yang terbagi dalam 12 wilayah kecamatan. Kondisi geografis sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian di bawah 150m dari permukaan laut yang terdapat di bagian barat membujur searah pantai dari utara ke selatan. Sedangkan di bagian timur topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian 541m dari permukaan laut.

Batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Fokus pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara lebih banyak pada pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur daerah. Dimana misi pembangunannya lebih banyak pada pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatkan kualitas dan profesionalisme, pelayanan publik, kebersamaan, kesetaraan, keadilan dan masyarakat yang religius.

3.6.3 Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabupaten Bengkulu Selatan terletak disebelah barat Bukit Barisan dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Seluma, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur, sebelah barat berbatasan dengan Lautan Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 1.186,10 km² yang terdiri dari 11 wilayah kecamatan, wilayah terluas adalah kecamatan Ulu Manna

yaitu sebesar 236,92 km², sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Pasar Manna dengan luas wilayah sebesar 5,84 km². Pembagian luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Luas	
		Km ²	Persentase
1.	Manna	33,17	2,80
2.	Bunga Mas	35,08	2,96
3.	Kota Manna	32,16	2,71
4.	Pasar Manna	5,84	0,49
5.	Kedurang	234,55	19,78
6.	Kedurang Ilir	58,20	4,91
7.	Seginim	61,52	5,17
8.	Air Nipis	203,28	17,14
9.	Pino	61,88	5,22
10.	Ulu Manna	236,92	19,98
11.	Pino Raya	223,50	18,84
	Jumlah	1.186,10	100,00

Sumber: BPS Kab. Bengkulu Selatan

Apabila dilihat dari topografi wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada tiga jalur, yaitu: jalur pertama 0 – 100 meter di atas permukaan laut dan terklasifikasi sebagai daerah *low land* luasnya mencapai 50,93%. Jalur kedua 100-1.000 meter di atas permukaan laut dan terklasifikasi sebagai daerah *bukit range* luasnya mencapai 43%. Jalur ketiga terletak disebelah Utara-Timur sampai ke Puncak Bukit Barisan luasnya mencapai 6,07%.

Jenis Tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari Tanah Alluvial 1,01%, Regosol 2,87%, Asosiasi Pedsolik Merah-Kuning-Latosol 53,68%, Latosol 24,09% dan Asosiasi Pedsolik-Coklat-Podsol-Litosol 18,36%.

Flora dan Fauna dapat dikembangkan menjadi objek wisata karena kelangkaannya seperti bunga kibut, bunga raflesia arnoldy/bangkai, termasuk hewan langka yang ada seperti harimau sumatera, siamang, beruang, rusa dan lainnya. Disamping itu, berbagai potensi alam dapat dikembangkan menjadi tempat rekreasi atau wisata seperti air terjun geluguran, air terjun tiga tingkat, pantai wisata pasar bawah, gua suraman, danau ulu seginim dal lain-lain.

Kabupaten mempunyai visi pembangunan yaitu Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Selatan yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing, berbasis agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Artinya Pemerintah Bengkulu Selatan lebih menitik berat pembangunan yang berbasis pada sektor pertanian.

3.6.4 Kota Bengkulu

Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 151,7 Km², batas wilayah Kota Bengkulu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan disebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari dataran pantai dan daerah berbukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil. Curah hujan pada tahun 2007 sebanyak 3.150 hujan, suhu udara 21⁰C-35⁰C dan kelembaban udara 81-86%.

Kota Bengkulu mempunyai visi, yaitu Menuju Masyarakat yang Bermartabat dan Makmur, adapun yang menjadi fokus pembangunan pada tiga pilar utama, yaitu pengembangan sektor pendidikan, Kesehatan masyarakat, dan meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan merupakan salah satu misi Kota Bengkulu. Ekonomi kerakyatan ini bertumpu pada kekuatan lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang aktif, produktif mandiri dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

BAB 4

ANALISA FOKUS KEBIJAKAN KABUPATEN-KABUPATEN DI PROPINSI BENGKULU

4.1 Penyusunan Hirarki

Setelah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999 memberikan peluang pada daerah untuk menentukan sendiri arah kebijakan yang dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya yang dimiliki. Meskipun Provinsi Bengkulu secara perekonomian cukup tertinggal dari Provinsi lainnya yang ada di Sumatera, jika melihat perkembangan PDRB Provinsi Bengkulu yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir, menunjukkan perekonomian Bengkulu mempunyai peluang untuk ditingkatkan. Untuk itu perlu disusun suatu alternatif-alternatif kebijakan yang kemudian akan dirumuskan menjadi fokus kebijakan dengan menggunakan metode The Analytic Hierarchi Process (AHP).

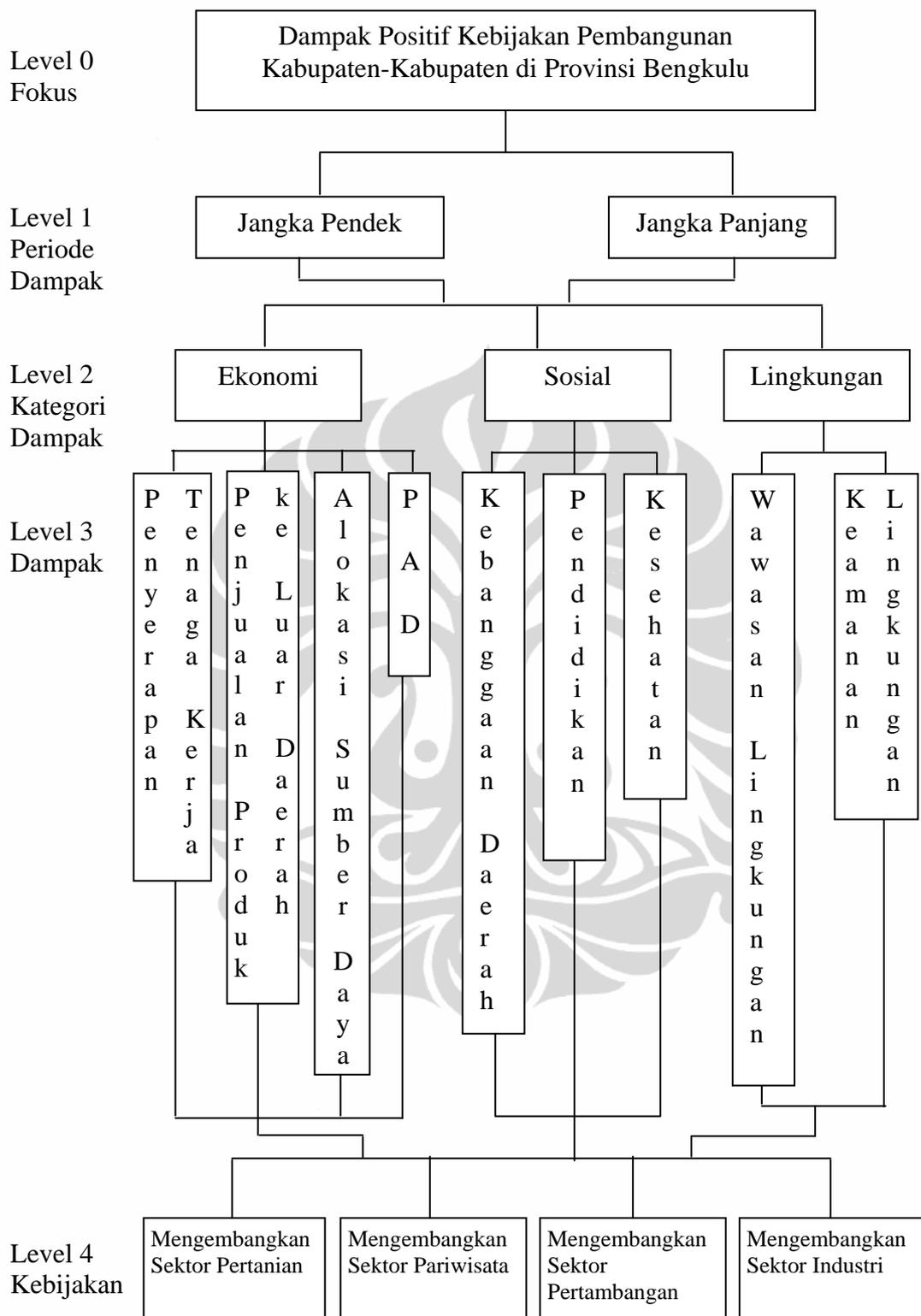
Pada tahap awal analisa dengan metode AHP adalah menyusun hirarki atau yang lazim disebut dekomposisi. Pada tahap ini dilakukan penyusunan permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur menjadi kelompok-kelompok yang homogen dan kemudian menyusunnya ke dalam suatu hirarki. Mengingat analisis yang digunakan dengan melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan pembangunan, untuk itu perlu disusun hirarki sisi positif dan hirarki sisi negatif. Hirarki tersebut yang akan dijadikan dasar penelitian terhadap aspirasi dan penilaian berbagai pihak yang berperan dalam pembangunan daerah kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Dampak dari suatu kebijakan tidak hanya dapat diterangkan dengan data sekunder akan tetapi dapat juga dilengkapi dengan data primer yang menangkap persepsi masyarakat yang langsung merasakan adanya proyek. Dengan menangkap persepsi mereka, selain mengkaji dampak yang sudah terjadi dapat pula dilakukan kajian dampak di masa mendatang dan keinginan masyarakat akan pembangunan daerah, untuk itu pembangunan diharapkan tidak hanya memberi manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak pada jangka panjang demi adanya pembangunan yang berkelanjutan.

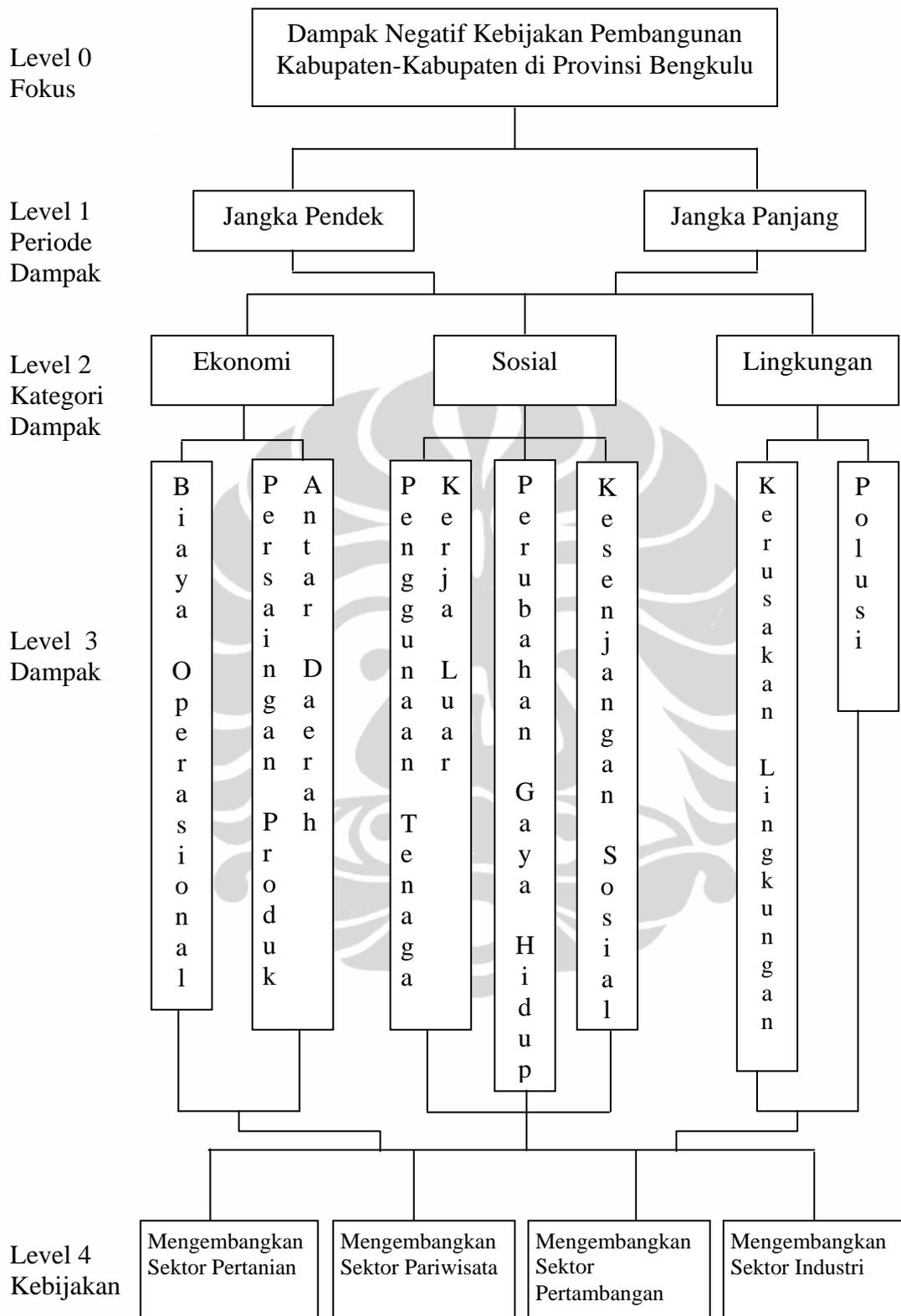
Pembangunan tidak hanya berdampak pada perekonomian daerah semata, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan hidup. Didalam penelitian ini akan dilihat dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Ketiga kategori dampak serta rincian dampaknya pada hirarki terdapat di level dua dan tiga, dimana hubungan antara kedua level ini tidak sempurna.

Tujuan akhir dari analisa ini adalah menentukan alternatif kebijakan pembangunan masa datang, oleh karena itu ditempatkan pada level terakhir. Setiap rincian dampak pada level tiga akan dihubungkan dengan alternatif-alternatif kebijakan dimana hubungan antara kedua level ini adalah sempurna.

Melihat dampak yang mungkin dapat ditimbulkan dari suatu kebijakan yang diambil, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif, maka dapat disusun hirarki melalui pendekatan AHP seperti yang terlihat pada bagan 4.1 dan bagan 4.2.



Bagan 4.1
Hirarki Sisi Positif
Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Bengkulu



Bagan 4.2
Hirarki Sisi Negatif
Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Bengkulu

4.2 Identifikasi dan Definisi Level dalam Hirarki

Masing-masing hirarki, baik sisi positif maupun sisi negatif terdiri dari lima level, yaitu:

Level 0 : Fokus

Fokus hirarki secara umum adalah kebijakan pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu, perumusan fokus ini didasarkan pada pentingnya pembangunan yang terencana untuk dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya di daerah lokal. Pada hirarki sisi positif dan sisi negatif pada level fokus ini adalah sama, hanya saja pada hirarki sisi positif ditambah kata dampak positif dan hirarki sisi negatif ditambah kata dampak negatif, karena yang dinilai adalah dampak positif dan negatif dari objek yang sama.

Level 1 : Periode Dampak

Pada level ini akan dibandingkan periode dampak yang akan dirasakan dari fokus kebijakan yang dijalankan. Mengingat pembangunan yang dilakukan agar tidak hanya memberikan manfaat dalam waktu dekat atau hanya sebatas satu periode pemerintahan, tetapi juga diharapkan dapat berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang akan datang, maka pada kedua buah hirarki yang dibentuk level duanya adalah jangka pendek dan jangka panjang sebagai elemen-elemen dari periode dampak, dengan asumsi bahwa jika dampak yang dirasakan hanya pada satu periode pemerintahan saja, maka dianggap sebagai dampak jangka pendek, sedangkan jangka panjang jika dampaknya bukan hanya untuk periode pemerintahan tersebut, tetapi juga dirasakan pada periode pemerintahan berikutnya.

Level 2 : Kategori Dampak

Pada level tiga ini akan dilihat perbandingan kategori dampak yang ditimbulkan. Masing-masing periode dampak, baik pada hirarki sisi positif maupun pada hirarki sisi negatif mempunyai tiga kategori dampak yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Level 3 : Dampak

Pada level ini akan dilihat perbandingan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pembangunan pada masing-masing kategori. Untuk level ini terdapat perbedaan pada hirarki sisi positif dengan hirarki sisi negatif. Pada hirarki sisi

positif berisikan dampak positif yang ditimbulkan baik dari kategori dampak ekonomi, sosial, ataupun kategori dampak lingkungan. Pada hirarki sisi positif, kategori dampak ekonomi meliputi masalah tenaga kerja, penjualan ke luar daerah, alokasi sumber daya (sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana) dan pendapatan daerah, kategori dampak sosial banyak menyinggung masalah kamasyarakatan, yaitu kebanggaan daerah, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Untuk kategori dampak lingkungan melihat dampak pada wawasan lingkungan (kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan) dan keamanan lingkungan (baik dari tindak kriminalitas maupun bencana alam).

Pada hirarki sisi negatif akan dilihat dampak negatif yang ditimbulkan pada masing-masing kategori, yaitu kategori ekonomi meliputi biaya operasional (biaya yang diperlukan dalam menghasilkan produk serta dalam memasarkannya) dan persaingan produk (output) dengan daerah lain, kategori sosial meliputi persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja luar, perubahan gaya hidup masyarakat seperti semakin bergesernya nilai-nilai budaya-budaya asli daerah dan adanya kesenjangan sosial. Sedangkan dari aspek lingkungan melihat dampak yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan polusi.

Level 4 : Kebijakan

Pada level ini akan dilihat perbandingan prioritas alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Ada empat alternatif pembangunan masa datang yang merupakan tujuan akhir dari analisa ini, untuk itu ditempatkan pada level terakhir pada kedua hirarki. Keempat alternatif tersebut adalah mengembangkan sektor pertanian, mengembangkan sektor pariwisata, mengembangkan sektor pertambangan dan mengembangkan sektor industri.

4.3 Comparative Judgment

Comparative Judgement artinya membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen (*pairwise comparison*) dalam suatu level tertentu dalam kaitannya dengan level yang di atasnya. Setelah disusun suatu hirarki baik sisi positif maupun negatif, langkah selanjutnya adalah membandingkan elemen-

elemen pada setiap level hirarki melalui penilaian atau pendapat orang-orang yang dianggap expert.

Untuk mengurangi kelemahan dari metode AHP seperti yang dijelaskan dalam bab 2, untuk masing-masing kabupaten penulis menggunakan lebih dari satu orang responden dengan profesi yang berbeda, yaitu unsur pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat atau pengusaha dan pemerintah pusat melalui unitnya yang ada di Bengkulu. Tujuannya untuk mendapatkan keputusan dengan pendekatan AHP dan pendapat responden dapat mewakili pendapat masyarakat, sehingga dapat dirumuskan kebijakan dari berbagai sudut pandang, mengingat kebijakan yang dipilih berupa kebijakan publik yang akan berdampak pada banyak pihak.

Untuk keperluan analisa fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Propinsi Bengkulu dimana penulis mengambil kabupaten-kabupaten induk setelah terjadi pemekaran dan kota sebagai objek penelitian, penulis menghubungi empat orang responden yang berperan dalam pembangunan masing-masing kabupaten, yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Bappeda), dimana respondennya orang yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Data atau Sekretaris Bappeda serta telah lama bekerja terutama di Bappeda.
2. Kalangan akademisi yang sumbangannya pemikiranannya sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan, yaitu dosen ekonomi pada perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu, selain mengajar ekonomi juga mengajar kebijakan publik. Mereka juga mengajar pada perguruan tinggi di masing-masing kabupaten.
3. Para pengusaha atau tokoh masyarakat, yaitu mereka yang bekerja pada perusahaan konsultan pembangunan ataupun LSM yang biasa melaksanakan proyek-proyek pemerintah di daerah seperti PNPM Mandiri.
4. Serta instansi vertikal yang memiliki unit kerja di Bengkulu seperti KSDA Ketahun (Departemen Kehutanan) dan Departemen Pertanian, untuk Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu respondennya dari KSDA Ketahun dimana mereka berasal dari daerah masing-masing dan bekerja selama lebih dari dua puluh tahun, kecuali untuk Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sekitar delapan tahun. Untuk Kabupaten Rejang Lebong dari Departemen Pertanian, selain telah bekerja lebih dari dua

puluh tahun juga berasal dari Kabupaten Rejang Lebong dan sering menjadi konsultan pertanian serta mempromosikan Kabupaten Rejang Lebong kepada para investor dibidang pertanian.

Pengisian kuesioner dilakukan secara terpisah, mengingat kesibukan dari responden. Dalam proses pengisian persepsi tersebut, semua responden menerima dan menyetujui bentuk hirarki yang telah disusun seperti pada bagan 4.1 dan 4.2 di atas.

4.4 Rata-Rata Ukur (*Geometri Mean*)

Mengingat responden yang menjawab keusioner lebih dari satu orang, maka perlu didapat satu hasil akhir. Untuk mendapatkan hasil akhir, penilaian para responden dirata-ratakan dengan metode rata-rata ukur. Adapun rumus rata-rata ukur dengan n (responden) = 4 adalah sebagai berikut:

$$a_w = \sqrt[4]{a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4}$$

a adalah nilai sel matriks perbandingan antar elemen pada masing-masing responden, sedangkan a_w adalah hasil nilai akhir (penilaian gabungan) dari seluruh responden.

Pola ini digunakan karena responden dianggap memiliki karakter dan pola preferensi penilaian yang berbeda. Hasil rata-rata inilah yang akan dijadikan sebagai hasil skala akhir yang selanjutnya digunakan untuk diolah dengan sintesa AHP dengan menggunakan alat bantu yaitu program komputer *Expert Choice*.

4.5 Hasil Sintesa Akhir Global

Hasil penilaian atau perbandingan responden terhadap elemen suatu hirarki, setelah dirata-ratakan melalui pola rata-rata ukur, diolah dengan menggunakan program expert choice, sehingga diperoleh bobot prioritas dan sintesa akhir (global) untuk masing-masing kabupaten.

4.5.1 Kabupaten Rejang Lebong

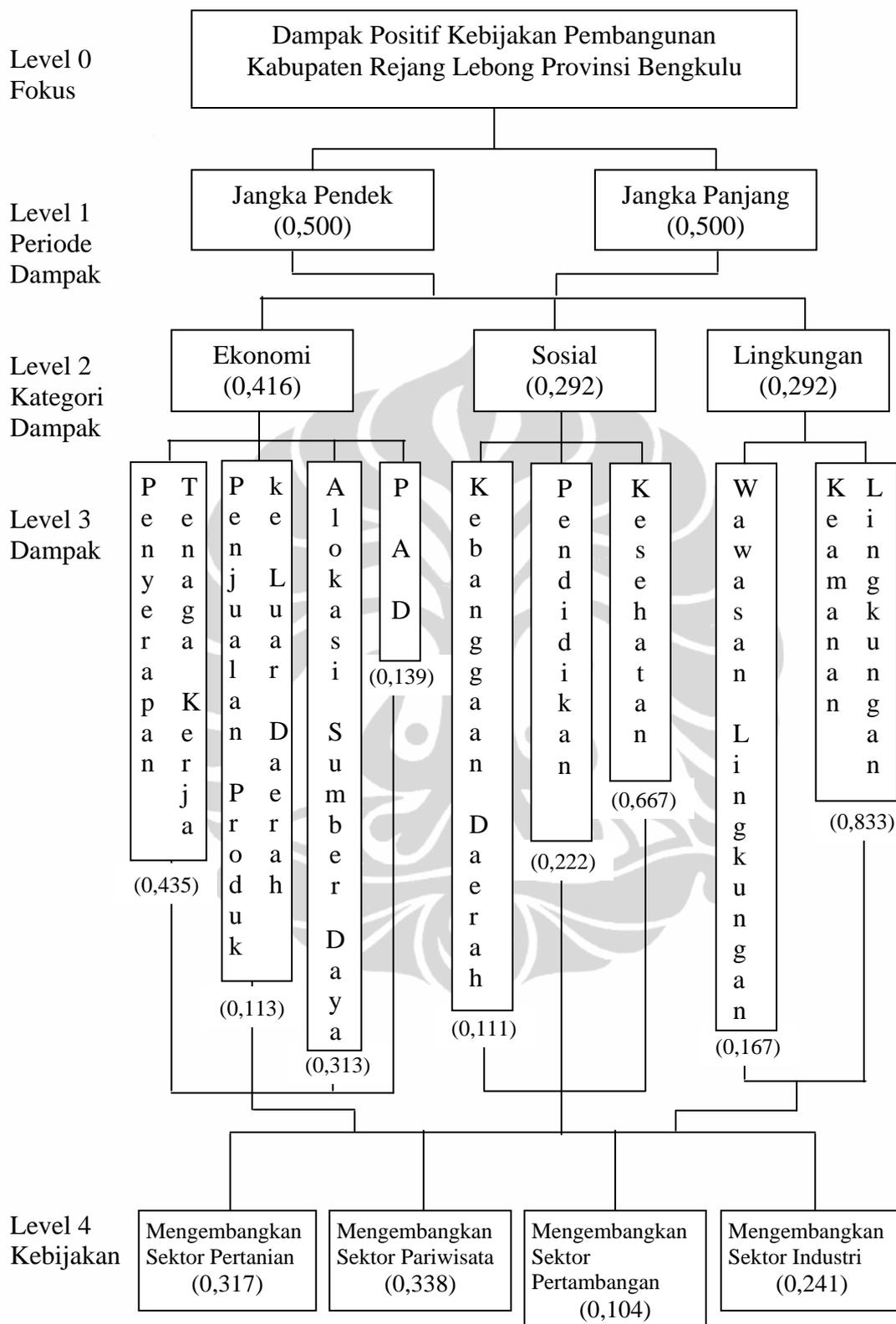
Bobot prioritas global dan rasio manfaat-biaya untuk Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Bobot Prioritas Global dan Rasio Manfaat-Biaya
Kabupaten Rejang Lebong

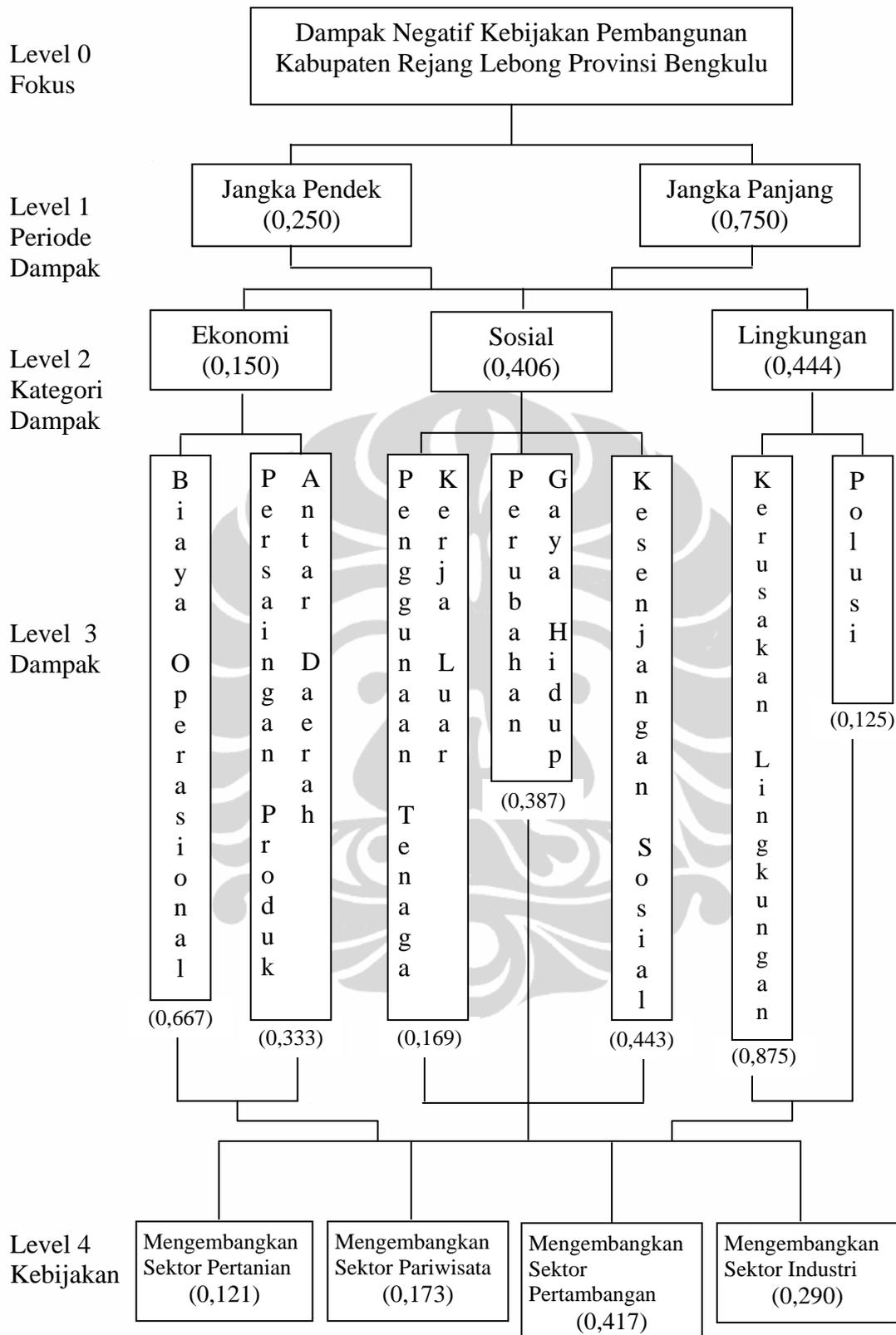
DAMPAK	Bobot Prioritas	Prioritas
Dampak Positif		
I 1. Jangka Pendek	0,500	(1/2)
2. Jangka Panjang	0,500	(1/2)
II 1. Ekonomi	0,416	(1)
2. Sosial	0,292	(2/3)
3. Lingkungan	0,292	(2/3)
III 1. Penyerapan Tenaga Kerja	0,435	(1)
2. Penjualan Produk ke Luar Daerah	0,113	(4)
3. Alokasi Sumber Daya	0,313	(2)
4. Pendapatan Asli Daerah	0,139	(3)
IV 1. Kebanggaan Daerah	0,111	(3)
2. Pendidikan	0,222	(2)
3. Kesehatan	0,667	(1)
V 1. Wawasan Lingkungan	0,167	(2)
2. Keamanan Lingkungan	0,833	(1)
Dampak Negatif		
I 1. Jangka Pendek	0,250	(2)
2. Jangka Panjang	0,750	(1)
II 1. Ekonomi	0,150	(3)
2. Sosial	0,406	(2)
3. Lingkungan	0,444	(1)
III 1. Biaya Operasional	0,667	(1)
2. Persaingan Produk Antar Daerah	0,333	(2)
IV 1. Penggunaan Tenaga Kerja Luar	0,169	(3)
2. Perubahan Gaya Hidup	0,387	(2)
3. Kesenjangan Sosial	0,443	(1)
V 1. Kerusakan Lingkungan	0,875	(1)
2. Polusi	0,125	(2)
Manfaat		
1. Mengembangkan Sektor Pertanian	0,317	(2)
2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	0,338	(1)
3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,104	(4)
4. Mengembangkan Sektor Industri	0,241	(3)
Biaya		
1. Mengembangkan Sektor Pertanian	0,121	(4)
2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	0,173	(3)
3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,417	(1)
4. Mengembangkan Sektor Industri	0,290	(2)
Rasio Manfaat-Biaya		
1. Mengembangkan Sektor Pertanian	2,620	(1)
2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	1,954	(2)
3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,249	(4)
4. Mengembangkan Sektor Industri	0,831	(3)

Dalam tabel 4.1 pada pada hasil sintesa akhir global berdasarkan rata-rata ukur, adapun nilai prioritas masing-masing elemen pada suatu level hirarki sisi positif dan sisi negatif untuk Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada bagan 4.3 dan bagan 4.4 sebagai berikut:





Bagan 4.3
Hirarki Sisi Positif Penentuan Fokus Kebijakan
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu



Bagan 4.4
Hirarki Sisi Negatif Penentuan Fokus Kebijakan
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Pada bagan 4.3 dan 4.4 di atas dapat dilihat hasil dari pengisian hirarki sisi positif menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 2005 tidak menunjukkan adanya dampak positif yang lebih besar dimasa yang akan datang, dimana penilaian para responden menunjukkan manfaat yang diberikan dari pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka panjang tidak akan jauh berbeda dengan yang dirasakan saat ini atau jangka pendek, dimana bobot prioritasnya sama yaitu sebesar 0,500. Dengan adanya proyek-proyek pemerintah dalam upaya membangun daerah ternyata berdampak dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, tapi sayangnya pembangunan yang telah dilakukan belum dapat meningkatkan penjualan produk keluar daerah dan masih banyak sumber daya yang belum dioptimalkan. Kurangnya investor yang masuk menyebabkan masih kurangnya peran swasta dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi di Kabupaten Rejang Lebong. Oleh karena itu dampak positif dari pembangunan di daerah Kabupaten Rejang Lebong lebih dirasakan pada kategori ekonomi dimana bobot prioritasnya adalah 0,416, dalam hal ini penyerapan tenaga kerja merupakan manfaat yang paling besar dirasakan.

Kendala dalam pemasaran dan tidak stabilnya harga produk hasil pertanian menjadi permasalahan yang sering dihadapi para petani yang mengakibatkan para petani sering mengalami kerugian, ditambah dengan semakin tingginya biaya produksi. Akibatnya terjadi ketimpangan pendapatan antara petani dengan mereka yang bekerja disektor lain, padahal sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian di Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk kategori dampak sosial yang positif, kesehatan merupakan prioritas terbesar dengan bobot prioritas 0,667, hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah dan telah dinobatkannya Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu kota sehat yang ada di Indonesia. Dari kategori lingkungan, dampak yang paling besar dirasakan adalah keamanan lingkungan (0,833).

Jika dampak positif dari pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong dinilai sama besarnya dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, maka dari hasil hirarki sisi negatif terlihat pola yang berbeda dimana dampak negatifnya

akan dirasakan lebih besar dalam jangka panjang (0,750). Kategori dampak negatif yang dianggap paling penting adalah lingkungan dimana bobot prioritasnya 0,444 dan sedikit lebih besar dari kategori sosial yang bobot prioritasnya 0,406. kerusakan lingkungan merupakan dampak yang paling besar dirasakan, sedangkan polusi bukanlah masalah lingkungan yang serius diakibatkan dari pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Hal inilah yang menyebabkan kenapa dampak negatif lebih banyak untuk jangka panjang, karena jika terus menerus terjadi akan menyebabkan rawan terjadinya bencana alam. Apalagi mengingat kondisi alam yang berbukit dengan kemiringan tanah yang curam. Dari kategori sosial, kesenjangan sosial adalah dampak negatif sosial terpenting, terutama pendapatan petani yang relatif masih kecil jika dibandingkan dengan lapangan kerja lainnya, sedangkan penggunaan tenaga kerja luar bukanlah sesuatu yang mengancam tergesernya tenaga kerja lokal, mengingat masih jarang orang luar daerah yang mencari pekerjaan di Kabupaten Rejang Lebong.

Setelah menganalisa dampak positif dan negatif dari pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, maka selanjutnya perlu ditentukan strategi pembangunan yang paling tepat untuk masa yang akan datang. Mengembangkan sektor pariwisata merupakan kebijakan dengan prioritas tertinggi untuk hirarki sisi positif dengan bobot prioritas 0,338. sedangkan mengembangkan sektor pertambangan merupakan dampak tertinggi pada hirarki sisi negatif.

Setelah dilakukan rasio antar sisi, ternyata kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong adalah mengembangkan sektor pertanian. Adapun urutan prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan sektor pertanian (2,620)
2. Mengembangkan sektor Pariwisata (1,954)
3. mengembangkan sektor Industri (0,831)
4. Mengembangkan sektor pertambangan (0,249)

Pembangunan sektor pertanian dianggap kebijakan yang tepat dalam mengantisifasi dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong. Mengembangkan sektor pertanian merupakan kegiatan yang paling diinginkan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong karena

saat ini dianggap paling cocok dengan kondisi lingkungan, sosial budaya dan sumber daya terutama sumber daya manusia sebagai pengelolanya, sehingga dianggap akan banyak menyerap tenaga kerja serta dapat mengurangi pengangguran dan memberikan penghasilan bagi masyarakat.

Pada tahun 2005 sampai 2009 pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ingin menjadikan pariwisata dan pertanian sebagai motor penggerak perekonomian di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah sehingga pembangunan lebih diprioritaskan pada kedua sektor ini. Namun masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong menginginkan sektor pertanian lebih diprioritaskan, untuk itu pembangunan kedepannya diharapkan lebih menekankan pada sektor pertanian.

4.5.2 Kabupaten Bengkulu Utara

Bobot prioritas global dan Rasio manfaat-biaya untuk Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

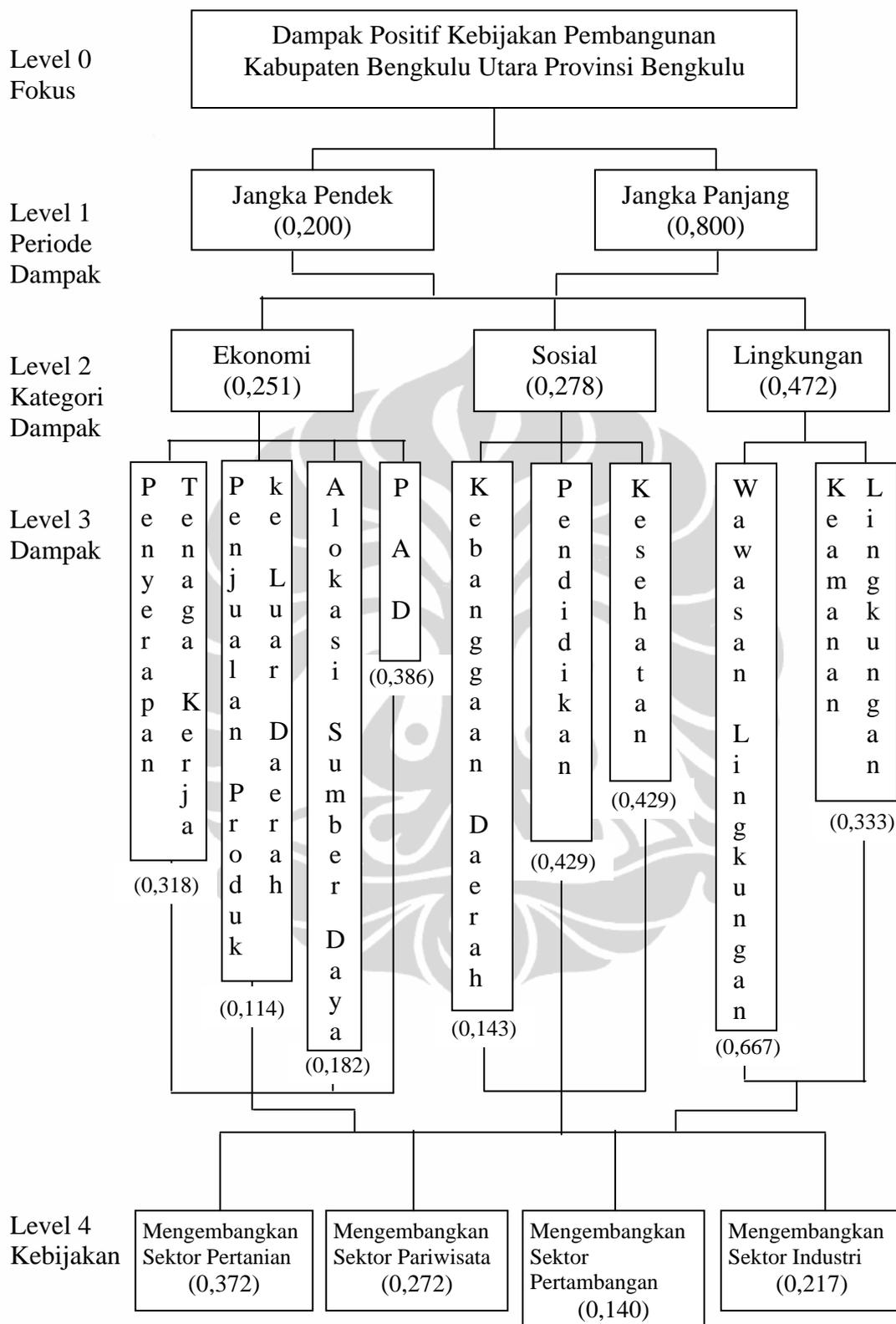
Tabel 4.2
Bobot Prioritas Global dan Rasio Manfaat-Biaya
Kabupaten Bengkulu Utara

DAMPAK		Bobot Prioritas	Prioritas
Dampak Positif			
I	1. Jangka Pendek	0,200	(2)
	2. Jangka Panjang	0,800	(1)
II	1. Ekonomi	0,251	(3)
	2. Sosial	0,278	(2)
	3. Lingkungan	0,472	(1)
III	1. Penyerapan Tenaga Kerja	0,318	(1)
	2. Penjualan Produk ke Luar Daerah	0,114	(3)
	3. Alokasi Sumber Daya	0,182	(2)
	4. Pendapatan Asli Daerah	0,386	
IV	1. Kebanggaan Daerah	0,143	(3)
	2. Pendidikan	0,429	(1)
	3. Kesehatan	0,429	(2)
V	1. Wawasan Lingkungan	0,667	(2)
	2. Keamanan Lingkungan	0,333	(1)
Dampak Negatif			
I	1. Jangka Pendek	0,250	(1)
	2. Jangka Panjang	0,750	(2)
II	1. Ekonomi	0,174	(1)
	2. Sosial	0,323	(2)
	3. Lingkungan	0,502	(3)

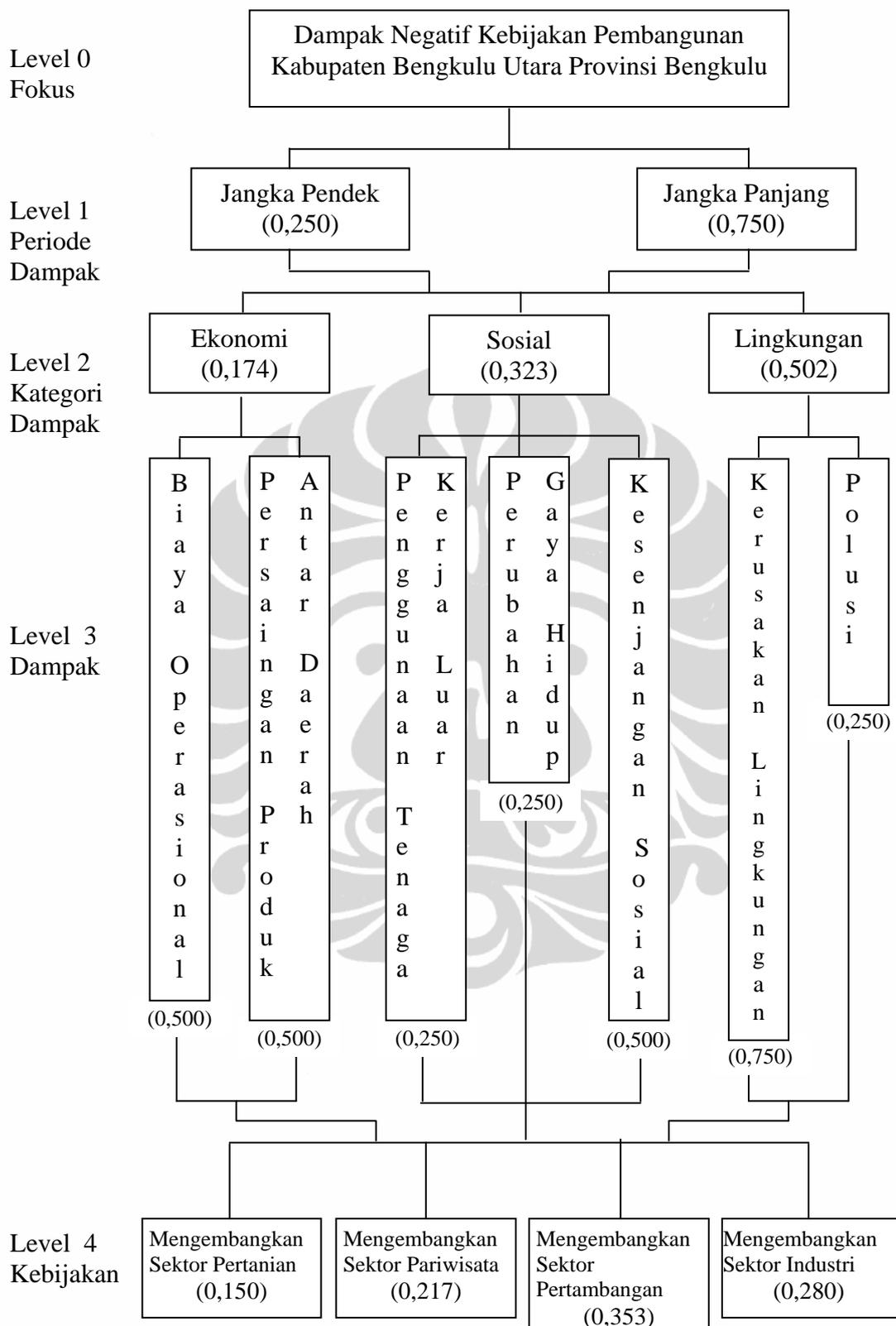
(sambungan tabel 4.2)

DAMPAK		Bobot Prioritas	Prioritas
III	1. Biaya Operasional	0,500	(2)
	2. Persaingan Produk Antar Daerah	0,500	(1)
IV	1. Penggunaan Tenaga Kerja Luar	0,250	(1)
	2. Perubahan Gaya Hidup	0,250	(2)
	3. Kesenjangan Sosial	0,500	(3)
V	1. Kerusakan Lingkungan	0,750	(2)
	2. Polusi	0,250	(1)
Manfaat			
	1. Mengembangkan Sektor Pertanian	0,372	(1)
	2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	0,272	(2)
	3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,140	(4)
	4. Mengembangkan Sektor Industri	0,217	(3)
Biaya			
	1. Mengembangkan Sektor Pertanian	0,150	(1)
	2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	0,217	(2)
	3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,353	(4)
	4. Mengembangkan Sektor Industri	0,280	(3)
Rasio Manfaat-Biaya			
	1. Mengembangkan Sektor Pertanian	2,480	(1)
	2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	1,255	(2)
	3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,397	(4)
	4. Mengembangkan Sektor Industri	0,775	(3)

Dalam tabel 4.2 dapat dilihat hasil sintesa akhir global Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan rata-rata ukur, adapun nilai prioritas masing-masing elemen pada suatu level hirarki sisi positif dan sisi negatif untuk Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada bagan 4.5 dan bagan 4.6 sebagai berikut:



Bagan 4.5
Hirarki Sisi Positif Penentuan Fokus Kebijakan
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu



Bagan 4.6
Hirarki Sisi Negatif Penentuan Fokus Kebijakan
Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu

Hasil dari pengisian hirarki seperti yang terlihat pada tabel 4.2 diatas, dari sisi positif menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama lima tahun terakhir masih belum banyak dirasakan manfaatnya dalam jangka pendek, tetapi dipandang akan lebih banyak memberi manfaat untuk jangka panjang dengan bobot prioritas 0,800. Pembangunan di Bengkulu Utara ternyata belum banyak membawa perubahan terutama dalam perekonomian.

Sudah ditinggalnya cara bertani yang menyebabkan kerusakan ekosistem seperti membuka lahan dengan cara pembakaran atau penebangan hutan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan. Masih jarangunya penduduk di Bengkulu Utara dan adanya upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran, sehingga polusi bukanlah masalah yang mengawatirkan di Bengkulu Utara. Hal ini sesuai dengan dipilihnya wawasan lingkungan sebagai dampak positif dari pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Namun di sisi lain adanya pertambangan batubara, perkebunan karet dan sawit baik itu perkebunan rakyat ataupun milik swasta ternyata menyebabkan adanya kerusakan lingkungan seperti rusaknya jalan menuju wilayah Bengkulu Utara. Padahal jalan merupakan salah satu faktor yang vital dalam perekonomian, jika hal ini tidak di atasi maka Kabupaten Bengkulu Utara akan semakin terisolir.

Untuk kategori dampak ekonomi, lebih banyak dirasakan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bobot prioritas 0,386. Investasi yang masuk tidak banyak pengaruhnya dalam memperbaiki perekonomian masyarakat di Bengkulu Utara terutama dalam mengurangi kemiskinan, walaupun cukup besar perannya dalam meningkatkan PAD. Kurangnya transportasi antar daerah membuat tidak lancarnya arus perdagangan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan daerah lainnya. Hasil pertanian yang merupakan penopang utama perekonomian di Bengkulu Utara sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, kecuali dari perkebunan sawit dan karet.

Dari kategori sosial, pembangunan di Bengkulu Utara lebih banyak memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

masyarakat dengan bobot prioritas 0,429, karena memang sasaran yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selain pengentasan kemiskinan adalah pembangunan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Dari hirarki sisi negatif, seperti halnya dampak positif, dampak negatif dari pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara juga lebih besar dalam jangka panjang dengan bobot prioritas 0,750, begitu juga pada kategori dampak, dimana dampak negatif yang besar juga pada kategori dampak lingkungan dengan bobot prioritas 0,502. Kerusakan lingkungan di Bengkulu Utara banyak disebabkan dari kegiatan penambangan, selain pertambangan golongan C, di Bengkulu Utara juga terdapat tambang batu bara.

Tingginya biaya produksi disebabkan karena infrastruktur yang belum memadai, terutama sarana transportasi, sehingga baik dalam penyediaan bahan baku maupun dalam memasarkan produk yang dinilai memerlukan biaya yang tinggi, terutama yang berhubungan dengan sektor pertanian. Sehingga dampak negatif pada kategori ekonomi lebih besar menciptakan biaya operasional, sedangkan dari kategori dampak sosial tingkat kesenjangan sosial masih paling besar dirasakan.

Setelah menganalisa dampak positif dan negatif dari pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara, maka selanjutnya perlu ditentukan strategi pembangunan yang paling tepat untuk masa yang akan datang. Mengembangkan sektor pertanian merupakan fokus kebijakan dengan prioritas tertinggi untuk hirarki sisi positif dengan bobot prioritas 0,372. sedangkan mengembangkan sektor pertambangan dianggap paling besar menimbulkan dampak negatif dengan bobot prioritas 0,353.

Setelah dilakukan rasio antar sisi, ternyata kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah mengembangkan sektor pertanian. Urutan prioritas fokus kebijakan untuk Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sektor Pertanian (2,480)
2. Mengembangkan Sektor Pariwisata (1,255)
3. Mengembangkan Sektor Industri (0,775)
4. Mengembangkan Sektor Pertambangan (0,397)

Pembangunan sektor pertanian merupakan kegiatan yang paling diinginkan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara, karena dengan meningkatnya produksi hasil pertanian akan sangat besar pengaruhnya dalam pembangunan ekonomi di Bengkulu Utara terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, kondisi lingkungan, budaya masyarakat dan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia lebih mendukung untuk dikembangkannya sektor pertanian dibanding sektor yang lainnya.

Disamping pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara, pemerintah diharapkan juga memperhatikan sektor pertanian terutama bagi masyarakat lokal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kedepannya masyarakat Bengkulu Utara menginginkan untuk pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan pada sektor pertanian.

4.5.3 Kabupaten Bengkulu Selatan

Bobot prioritas lokal dan global serta Rasio manfaat-biaya untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

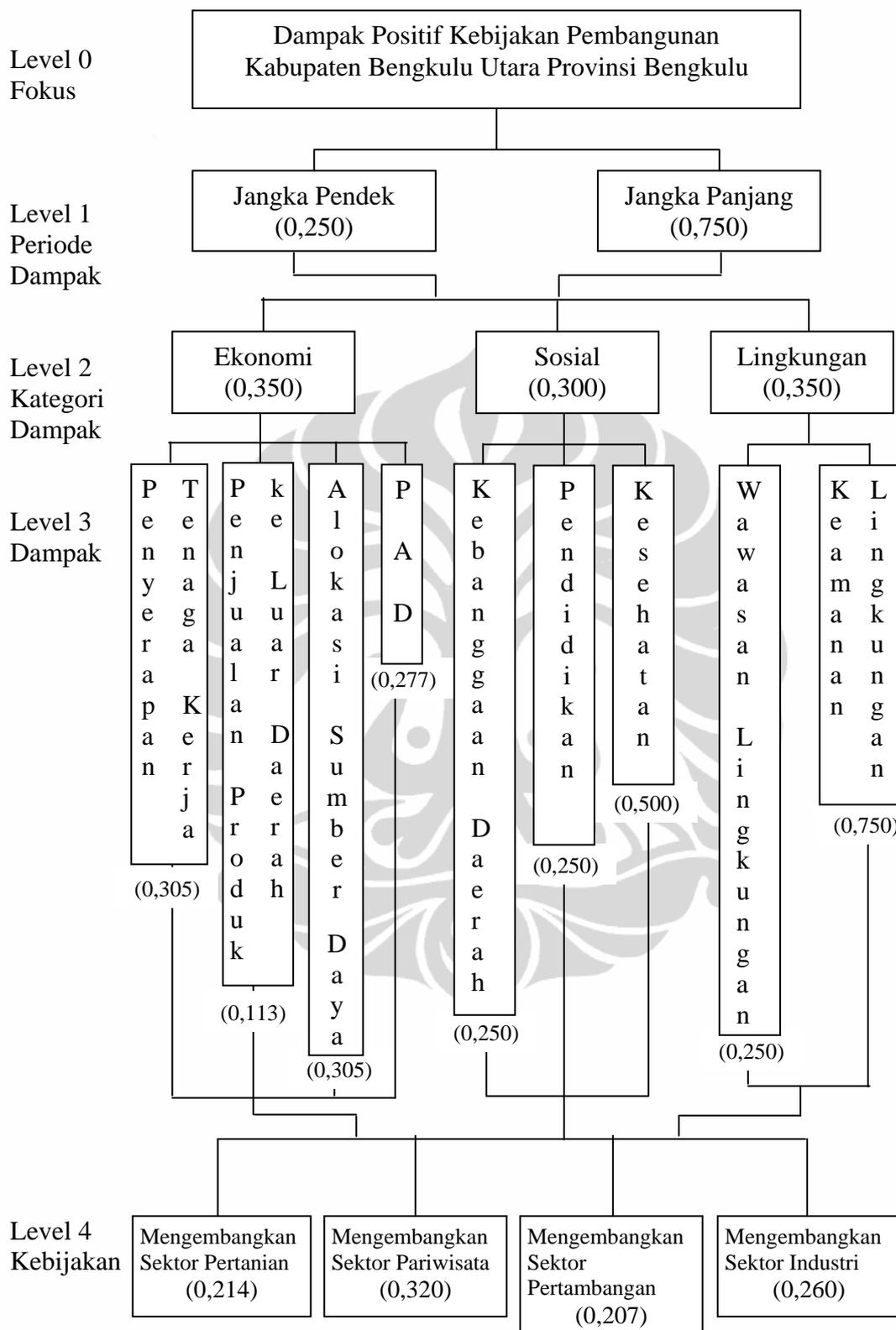
Tabel 4.3
Bobot Prioritas Global dan Rasio Manfaat-Biaya
Kabupaten Bengkulu Selatan

DAMPAK	Bobot Prioritas	Prioritas
Dampak Positif		
I 1. Jangka Pendek	0,250	(2)
2. Jangka Panjang	0,750	(1)
II 1. Ekonomi	0,350	(1/2)
2. Sosial	0,300	(3)
3. Lingkungan	0,350	(1/2)
III 1. Penyerapan Tenaga Kerja	0,305	(1/2)
2. Penjualan Produk ke Luar Daerah	0,113	(4)
3. Alokasi Sumber Daerah	0,305	(1/2)
4. Pendapatan Asli Daerah	0,277	(3)
IV 1. Kebanggaan Daerah	0,250	(2/3)
2. Pendidikan	0,250	(2/3)
3. Kesehatan	0,500	(1)
V 1. Wawasan Lingkungan	0,250	(2)
2. Keamanan Lingkungan	0,750	(1)
Dampak Negatif		
I 1. Jangka Pendek	0,750	(1)
2. Jangka Panjang	0,250	(2)

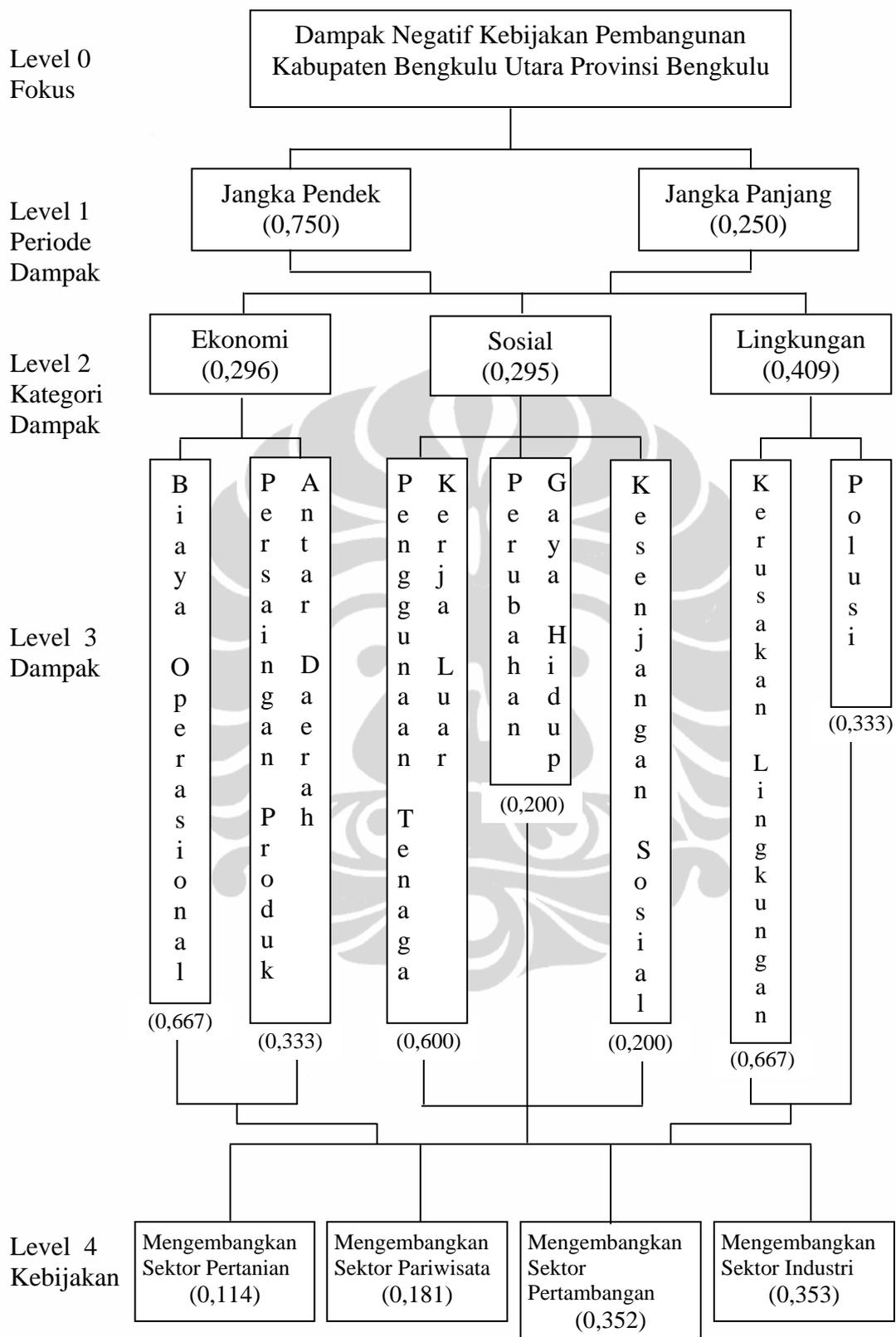
(sambungan tabel 4.3)

DAMPAK		Bobot Prioritas	Prioritas
II	1. Ekonomi	0,296	(2)
	2. Sosial	0,295	(3)
	3. Lingkungan	0,409	(1)
III	1. Biaya Operasional	0,667	(1)
	2. Persaingan Produk Antar Daerah	0,333	(2)
IV	1. Penggunaan Tenaga Kerja Luar	0,600	(1)
	2. Perubahan Gaya Hidup	0,200	(2/3)
	3. Kesenjangan Sosial	0,200	(2/3)
V	1. Kerusakan Lingkungan	0,667	(1)
	2. Polusi	0,333	(2)
Manfaat			
	1. Mengembangkan Sektor Pertanian	0,214	(3)
	2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	0,320	(1)
	3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,207	(4)
	4. Mengembangkan Sektor Industri	0,260	(2)
Biaya			
	1. Mengembangkan Sektor Pertanian	0,114	(4)
	2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	0,181	(3)
	3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,352	(2)
	4. Mengembangkan Sektor Industri	0,353	(1)
Rasio Manfaat-Biaya			
	1. Mengembangkan Sektor Pertanian	1,877	(1)
	2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	1,768	(2)
	3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,588	(4)
	4. Mengembangkan Sektor Industri	0,735	(3)

Dalam tabel 4.3 dapat dilihat hasil sintesa akhir global berdasarkan rata-rata ukur, adapun nilai prioritas masing-masing elemen pada suatu level hirarki sisi positif dan sisi negatif untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada bagan 4.7 dan bagan 4.8 sebagai berikut:



Bagan 4.7
Hirarki Sisi Positif Penentuan Fokus Kebijakan
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu



Bagan 4.8
Hirarki Sisi Negatif Penentuan Fokus Kebijakan
Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan bagan 4.7 dan 4.8 di atas dapat dilihat hasil dari pengisian hirarki sisi positif menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun terakhir tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Para responden menilai kalau dalam jangka panjang akan memberikan dampak positif yang lebih besar dengan bobot prioritas 0,750. Mereka menilai pembangunan di Bengkulu Selatan cukup baik bila dilihat dari aspek ekonomi dan lingkungan, hal ini sejalan dengan dipilihnya kategori ekonomi dan lingkungan sebagai dampak positif yang lebih besar dari pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, keduanya mempunyai bobot prioritas yang sama yaitu sebesar 0,350. sedangkan untuk kategori sosial bobot prioritasnya adalah 0,300, ini menunjukkan bahwa dampak positif untuk ketiga kategori tersebut cukup berimbang dimana tidak terdapat perbedaan yang mencolok.

Dari kategori ekonomi, maka dampak positif lebih dirasakan pada penyerapan tenaga kerja dan dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya dimana masing-masing mempunyai bobot prioritas yang sama yaitu 0,305. Upaya Pemerintah Bengkulu Selatan dalam memfasilitasi bagi investor yang ingin berinvestasi di Bengkulu Selatan, baik di sektor pertanian, pertambangan ataupun mengembangkan pariwisata merupakan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah. Hal ini mengingat terbatasnya dana yang dimiliki untuk mengelola potensi daerah tersebut. Sedangkan untuk kategori lingkungan, lebih memberikan dampak pada keamanan lingkungan dibanding wawasan lingkungan dengan bobot prioritas 0,750, karena masih banyak masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan. dari kondisi di atas terlihat kaitan antara pemilihan jangka panjang sebagai periode dampak, ekonomi dan lingkungan sebagai kategori dampak serta penyerapan tenaga kerja, alokasi sumber daya dan keamanan lingkungan sebagai jenis dampak.

Untuk kategori dampak sosial yang positif, pembangunan dibidang kesehatan dipandang lebih baik dari pada pembangunan pendidikan, sehingga dampak positif lebih dirasakan pada kesehatan dengan bobot prioritas 0,500.

Jika dampak positif dari pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dinilai lebih besar dalam jangka panjang, maka dari hasil hirarki sisi

negatif terlihat pola yang berbeda dimana dampak negatifnya dirasakan lebih besar dalam jangka pendek, dengan bobot prioritas (0,750). Kategori dampak negatif yang dianggap paling penting adalah lingkungan dimana bobot prioritasnya 0,409. kerusakan lingkungan merupakan dampak yang paling besar dari pembangunan di Bengkulu Selatan, sedangkan polusi bukanlah masalah lingkungan yang serius yang diakibatkan dari pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal inilah yang menyebabkan kenapa dampak negatif lebih banyak untuk jangka panjang, karena jika terus menerus terjadi akan menyebabkan rawan terjadinya bencana alam. Kurang siapnya masyarakat lokal dalam persaingan tenaga kerja akan menyebabkan mereka akan tersisihkan oleh tenaga kerja dari luar yang dianggap mempunyai skill yang lebih tinggi dalam menghadapi perkembangan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu penggunaan tenaga kerja luar dianggap dampak negatif yang lebih besar dirasakan dari kategori sosial dengan bobot prioritas 0,667.

Setelah menganalisa dampak positif dan negatif dari pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan, maka selanjutnya perlu ditentukan strategi pembangunan yang paling tepat untuk masa yang akan datang. Mengembangkan sektor pariwisata merupakan kebijakan dengan prioritas tertinggi untuk hirarki sisi positif dengan bobot prioritas 0,320. Hal ini sangat wajar mengingat banyaknya potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan yang sampai saat ini belum dioptimalkan pengelolaannya, sehingga Kabupaten Bengkulu Selatan belum banyak mendapatkan manfaat dari potensi ini. Walaupun mengembangkan sektor pariwisata dinilai dapat memberikan dampak positif yang besar bagi Kabupaten Bengkulu Selatan, namun secara sendirinya juga menciptakan dampak negatif yang besar pula. Mengembangkan sektor Industri merupakan sektor yang dianggap menimbulkan dampak tertinggi pada hirarki sisi negatif dengan bobot prioritas 0,353, untuk melihat kebijakan yang dapat mengantisipasi dampak-dampak tersebut, maka perlu dilakukan rasio antar sisi.

Setelah dilakukan rasio antar sisi, ternyata kebijakan yang tepat untuk dijadikan fokus kebijakan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah mengembangkan sektor pertanian. Adapun urutan prioritas selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan sektor pertanian (1,877)
2. Mengembangkan sektor Pariwisata (1,768)
3. mengembangkan sektor Industri (0,735)
4. Mengembangkan sektor pertambangan (0,588)

Pembangunan sektor pertanian merupakan kegiatan yang paling diinginkan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, sektor ini dinilai paling cocok dikembangkan karena dianggap banyak menyerap tenaga kerja di Bengkulu Selatan, khususnya tenaga kerja lokal. Artinya dengan meningkatnya hasil pertanian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan selama ini sudah menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan ekonomi daerah, untuk itu kedepannya diharapkan pembangunan ini dapat dilanjutkan sebagai fokus kebijakan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dimana sesuai dengan keinginan masyarakat.

4.5.4 Kota Bengkulu

Bobot prioritas global dan rasio manfaat-biaya untuk Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

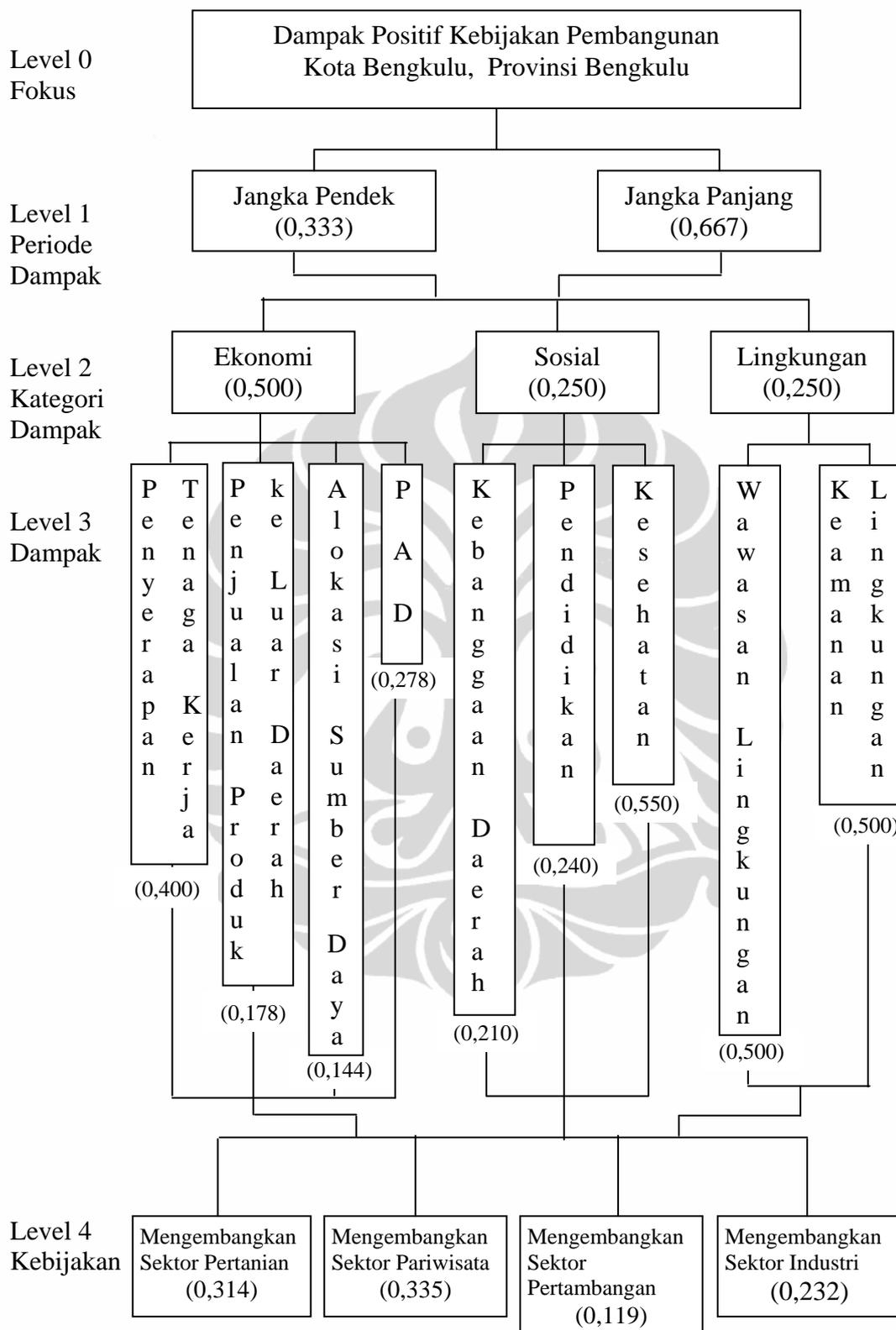
Tabel 4.4
Bobot Prioritas Global dan Rasio Manfaat-Biaya
Kota Bengkulu

DAMPAK	Bobot Prioritas	Prioritas
Dampak Positif		
I 1. Jangka Pendek	0,333	(2)
2. Jangka Panjang	0,667	(1)
II 1. Ekonomi	0,500	(1)
2. Sosial	0,250	(2/3)
3. Lingkungan	0,250	(2/3)
III 1. Penyerapan Tenaga Kerja	0,400	(1)
2. Penjualan Produk ke Luar Daerah	0,178	(3)
3. Alokasi Sumber Daya	0,144	(4)
4. Pendapatan Asli Daerah	0,278	(2)
IV 1. Kebanggaan Daerah	0,210	(3)
2. Kesejahteraan Masyarakat	0,240	(2)
3. Kemandirian Daerah	0,550	(1)
V 1. Wawasan Lingkungan	0,500	(1/2)
2. Keamanan Lingkungan	0,500	(1/2)

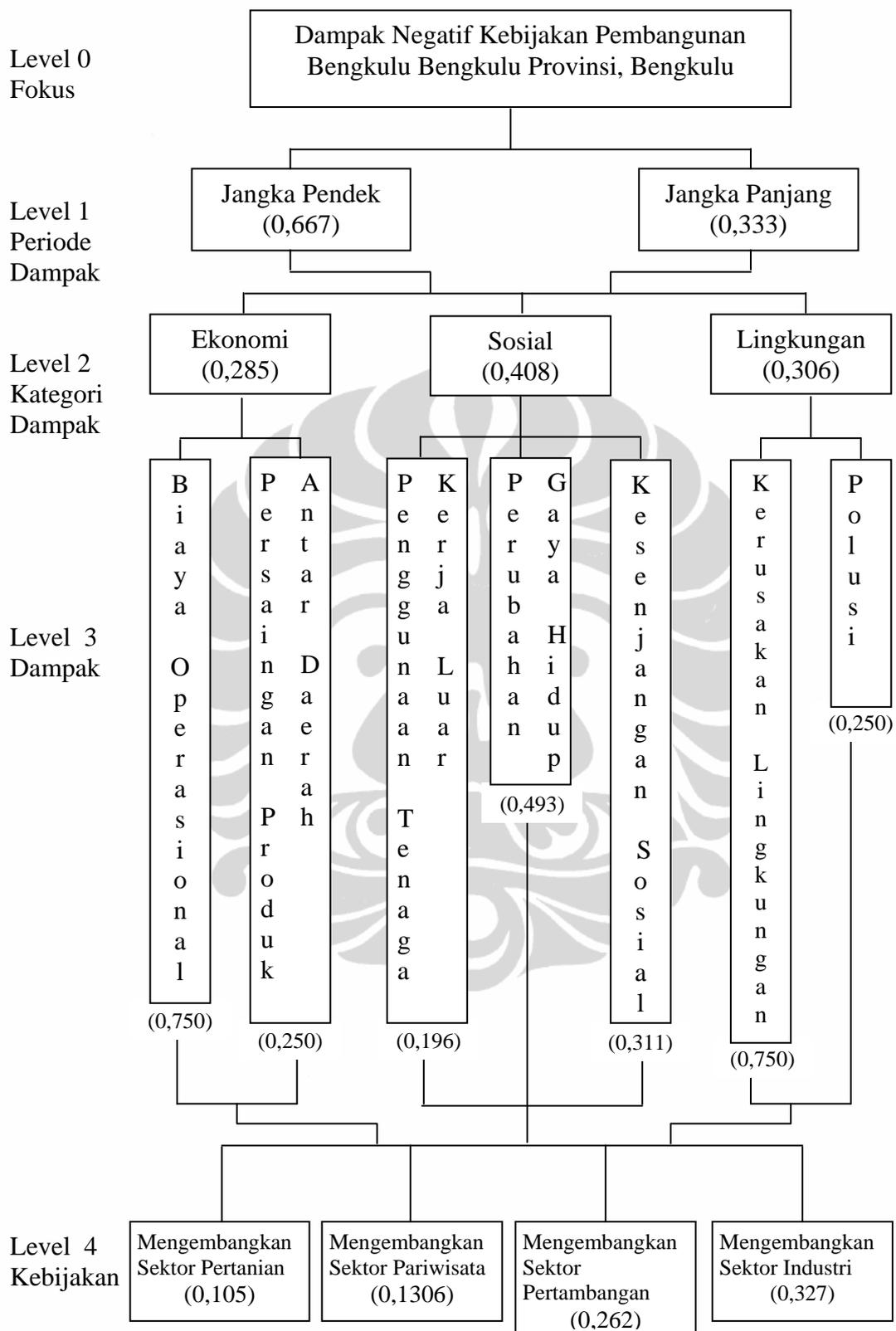
(sambungan tabel 4.4)

DAMPAK	Bobot Prioritas	Prioritas
Dampak Negatif		
I 1. Jangka Pendek	0,667	(1)
2. Jangka Panjang	0,333	(2)
II 1. Ekonomi	0,285	(3)
2. Sosial	0,408	(1)
3. Lingkungan	0,306	(2)
III 1. Biaya Operasional	0,750	(1)
2. Persaingan Produk Antar Daerah	0,250	(2)
IV 1. Penggunaan Tenaga Kerja Luar	0,196	(3)
2. Perubahan Gaya Hidup	0,493	(1)
3. Kesenjangan Sosial	0,311	(2)
V 1. Kerusakan Lingkungan	0,750	(1)
2. Polusi	0,250	(2)
Manfaat		
1. Mengembangkan Sektor Pertanian	0,314	(2)
2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	0,335	(1)
3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,119	(4)
4. Mengembangkan Sektor Industri	0,232	(3)
Biaya		
1. Mengembangkan Sektor Pertanian	0,105	(1)
2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	0,306	(3)
3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,262	(2)
4. Mengembangkan Sektor Industri	0,327	(4)
Rasio Manfaat-Biaya		
1. Mengembangkan Sektor Pertanian	2,991	(1)
2. Mengembangkan Sektor Pariwisata	1,095	(2)
3. Mengembangkan Sektor Pertambangan	0,454	(4)
4. Mengembangkan Sektor Industri	0,710	(3)

Dalam tabel 4.4 dapat dilihat hasil sintesa akhir global berdasarkan rata-rata ukur, adapun nilai prioritas masing-masing elemen pada suatu level hirarki sisi positif dan sisi negatif untuk Kota Bengkulu dapat dilihat pada bagan 4.9 dan bagan 4.10 sebagai berikut:



Bagan 4.9
Hirarki Sisi Positif Penentuan Fokus Kebijakan
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu



Bagan 4.10
Hirarki Sisi Negatif Penentuan Fokus Kebijakan
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Bagan 4.9 dan 4.10 dapat dilihat bahwa hasil dari pengisian hirarki sisi positif menunjukkan kebijakan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu sejak tahun 2005 dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang, dampak positif yang diperoleh dalam jangka panjang justru dinilai akan lebih besar bila dibandingkan dengan dampak positif yang diperoleh dalam jangka pendek dengan bobot prioritas 0,667. Perdagangan merupakan sumber kontribusi terbesar di Kota Bengkulu, pada tahun 2007 kontribusi sektor perdagangan mencapai 34,78% dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mereka menganggap dalam jangka panjang akan semakin berkembangnya perekonomian di Kota Bengkulu dengan catatan semakin ditingkatkan infrastruktur daerah, terutama yang menyangkut jaringan transportasi. Sehingga kategori ekonomi adalah pilihan prioritas dalam kategori dampak dari sisi positif dengan bobot prioritas 0,500, sedangkan jenis dampaknya adalah penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan kegiatan pembangunan dengan sendirinya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama masyarakat setempat.

Dari segi kategori sosial, pilihan dampak dari pembangunan di Kota Bengkulu lebih besar memberikan dampak positif pada segi kesehatan dengan bobot prioritas 0,550. Sedangkan dampak pada pendidikan masih sangat kurang, padahal pendidikan juga sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang pada nantinya akan sangat berperan dalam pembangunan di Bengkulu.

Untuk kategori lingkungan, kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dianggap sudah cukup baik. Namun mengingat Kota Bengkulu berada di dekat laut dan rawan terjadinya gempa membuat masyarakat merasa khawatir akan bahaya bencana alam yang akan terjadi. Pengalaman yang dialami membuat pemerintah berupaya membangun melakukan langkah-langkah sebagai antisipasi menghadapi bencana, baik bangunan secara fisik ataupun menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengantisipasi terjadinya bencana terutama gempa bumi dan tsunami. Dari kondisi di atas maka wawasan lingkungan dan keamanan lingkungan dianggap dampak positif yang sama besarnya untuk kategori dampak lingkungan.

Jika dampak positif dari pembangunan di Kota Bengkulu adalah lebih besar dirasakan dalam jangka panjang, maka untuk hirarki sisi negatif justru lebih

banyak dirasakan dalam jangka pendek dengan bobot prioritas 0,667. upaya pemerintah mengembangkan sektor pariwisata di Kota Bengkulu dengan membangun pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat rekreasi ternyata berdampak besar pada perubahan gaya hidup masyarakat di Kota Bengkulu dan semakin bergesernya nilai-nilai budaya. Sehingga jelaslah kaitan alasan pemilihan dalam jangka pendek sebagai periode dampak, sosial sebagai kategori dampak dengan bobot prioritas 0,408 dan perubahan gaya hidup sebagai jenis dampak negatif yang paling besar dari pembangunan Kota Bengkulu dengan bobot prioritas 0,497. Dari kategori ekonomi biaya produksi dan pemasaran yang masih tinggi merupakan penghambat dalam pertumbuhan ekonomi di Bengkulu, oleh karena itu biaya operasional dianggap sebagai dampak negatif yang penting dari kategori ekonomi dengan bobot prioritas 0,750. sedangkan kategori lingkungan, kerusakan lingkungan merupakan dampak yang lebih dirasakan dari pembangunan di Kota Bengkulu, sedangkan polusi masih sangat kecil terjadi di Kota Bengkulu.

Setelah menganalisa dampak positif dan negatif dari pembangunan Kota Bengkulu, maka selanjutnya perlu ditentukan strategi pembangunan yang paling tepat untuk masa yang akan datang. Mengembangkan sektor Pariwisata merupakan kebijakan dengan prioritas tertinggi untuk hirarki sisi positif dengan bobot prioritas 0,335. sedangkan mengembangkan sektor Industri merupakan dampak tertinggi pada hirarki sisi negatif.

Setelah dilakukan rasio antar sisi, ternyata kebijakan yang tepat dalam di Kota Bengkulu adalah mengembangkan sektor pertanian. Adapun urutan prioritasnya adalah sebagai berikut:

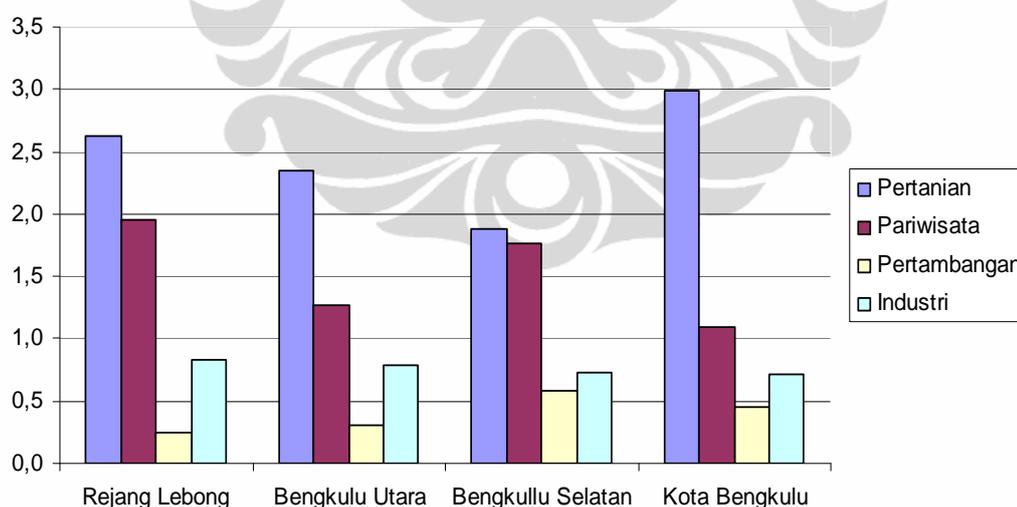
1. mengembangkan sektor pertanian (2,991)
2. Mengembangkan sektor Pariwisata (1,095)
3. mengembangkan sektor Industri (0,710)
4. Mengembangkan sektor pertambangan (0,454)

Pembangunan sektor pertanian merupakan kegiatan yang paling diinginkan masyarakat di Kota Bengkulu. Sektor pertanian dianggap strategi paling tepat untuk mengantisipasi dampak positif dan negatif dari pembangunan di Kota Bengkulu. Walaupun sektor pariwisata memberikan dampak positif yang

lebih besar, namun dampak negatifnya yang ditimbulkan juga cukup besar bila dibandingkan dengan sektor pertanian. Kota Bengkulu sebagai pusat perdagangan di Provinsi Bengkulu, dimana sektor perdagangan adalah penyumbang terbesar dalam perekonomian Kota Bengkulu sangat di topang oleh sektor pertanian. Hal ini mengingat produk lokal yang dihasilkan sebagian besar bersumber dari hasil pertanian, baik yang dijual langsung ataupun melalui pengolahan terlebih dahulu.

Jika dilihat dari visi dan misi pembangunan Kota Bengkulu, yaitu ingin menciptakan masyarakat yang bermartabat, dimana pembangunan ekonominya berbasis pada ekonomi kerakyatan dan bertumpu pada kekuatan lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang aktif, produktif mandiri dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Namun masyarakat Kota Bengkulu menginginkan lebih pada sektor pertanian, sehingga pembangunan yang akan datang diharapkan lebih memprioritaskan pada sektor pertanian.

Dari hasil perhitungan bobot prioritas akhir global masing-masing kabupaten di atas, dapat dilihat prioritas strategi pembangunan kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu pada gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1
Rasio Manfaat Biaya Fokus Kebijakan Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu

4.6 Analisa Fokus Kebijakan Untuk Masing-Masing Kategori Dampak

Dari hasil akhir pengisian kuesioner (*judgments*) tersebut, setelah diolah dengan sintesa AHP lebih lanjut dengan menggunakan alat bantu yaitu program komputer *Expert Choice* diperoleh alternatif kebijakan untuk masing-masing kategori dampak (ekonomi, sosial, lingkungan).

4.6.1 Analisis fokus kebijakan untuk kategori ekonomi

Tabel 4.5
Fokus Kebijakan Sisi Positif Kategori Ekonomi

Alternatif Kebijakan	Bobot Prioritas			
	Rejang Lebong	Bengkulu Utara	Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu
1. Pertanian	0,345 (1)	0,426 (1)	0,158 (4)	0,286 (2)
2. Pariwisata	0,250 (3)	0,104 (4)	0,250 (3)	0,340 (1)
3. Pertambangan	0,116 (4)	0,234 (3)	0,289 (2)	0,118 (4)
4. Industri	0,288 (2)	0,236 (2)	0,302 (1)	0,256 (3)

Tabel 4.6
Fokus Kebijakan Sisi Negatif Kategori Ekonomi

Alternatif Kebijakan	Bobot Prioritas			
	Rejang Lebong	Bengkulu Utara	Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu
1. Pertanian	0,109 (4)	0,196 (4)	0,165 (4)	0,152 (4)
2. Pariwisata	0,177 (3)	0,273 (2)	0,211 (3)	0,242 (3)
3. Pertambangan	0,378 (1)	0,236 (3)	0,323 (1)	0,302 (2)
4. Industri	0,336 (2)	0,295 (1)	0,301 (2)	0,303 (1)

Tabel 4.7
Rasio Manfaat-Biaya Untuk Kategori Ekonomi

Alternatif Kebijakan	Rasio Manfaat-Biaya			
	Rejang Lebong	Bengkulu Utara	Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu
1. Pertanian	3,165 (1)	2,173 (1)	0,958 (3)	1,882 (1)
2. Pariwisata	1,412 (2)	0,381 (4)	1,185 (1)	1,405 (2)
3. Pertambangan	0,307 (4)	0,992 (2)	0,895 (4)	0,391 (4)
4. Industri	0,857 (3)	0,800 (3)	1,000 (2)	0,845 (3)

Dari tabel di atas terlihat bahwa kebijakan yang dapat dijadikan sebagai fokus dalam pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu, jika dilihat dari dampaknya terhadap perekonomian di Bengkulu khususnya

perekonomian di masing-masing wilayah kabupaten/kota masih didominasi sektor pertanian. Hal ini jelas membuktikan bahwa sektor pertanian masih sangat besar kontribusinya bagi perekonomian di Bengkulu, sehingga sangat diperlukan menjadi prioritas pembangunan daerah. Tampak perbedaan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana sektor pariwisata dianggap akan sangat besar pengaruhnya untuk menumbuhkan perekonomian di Bengkulu Selatan.

Alternatif lainnya yang dapat ditawarkan untuk dikembangkan adalah pariwisata untuk Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu karena rasio manfaat-biaya di atas 1 (satu), artinya manfaat dari mengembangkan sektor pariwisata tersebut akan lebih besar dari dampak negatifnya.

4.6.2 Analisis fokus kebijakan dilihat dari kategori sosial

Tabel 4.8
Fokus Kebijakan Sisi Positif Kategori Sosial

Alternatif Kebijakan	Bobot Prioritas			
	Rejang Lebong	Bengkulu Utara	Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu
1. Pertanian	0,267 (2)	0,342 (1)	0,292 (1)	0,342 (1)
2. Pariwisata	0,248 (3)	0,230 (3)	0,262 (3)	0,277 (2)
3. Pertambangan	0,087 (4)	0,131 (4)	0,173 (4)	0,134 (4)
4. Industri	0,398 (1)	0,296 (2)	0,268 (2)	0,247 (3)

Tabel 4.9
Fokus Kebijakan Sisi Negatif Kategori Sosial

Alternatif Kebijakan	Bobot Prioritas			
	Rejang Lebong	Bengkulu Utara	Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu
1. Pertanian	0,088 (4)	0,096 (4)	0,088 (4)	0,086 (4)
2. Pariwisata	0,277 (3)	0,316 (1)	0,251 (3)	0,392 (1)
3. Pertambangan	0,324 (1)	0,298 (2)	0,315 (2)	0,239 (3)
4. Industri	0,311 (2)	0,290 (3)	0,347 (1)	0,284 (2)

Tabel 4.10
Rasio Manfaat-Biaya Untuk Kategori Sosial

Alternatif Kebijakan	Rasio Manfaat-Biaya			
	Rejang Lebong	Bengkulu Utara	Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu
1. Pertanian	3,034 (1)	3,563 (1)	3,318 (1)	3,977 (1)
2. Pariwisata	0,895 (3)	0,728 (3)	1,044 (2)	0,707 (3)
3. Pertambangan	0,269 (4)	0,440 (4)	0,549 (4)	0,561 (4)
4. Industri	1,280 (2)	1,021 (2)	0,772 (3)	0,870 (2)

Dari tabel 8,9,10 di atas terlihat bahwa kebijakan yang dapat dijadikan sebagai fokus dalam pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu, jika dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Bengkulu khususnya masyarakat di masing-masing wilayah kabupaten/kota masih didominasi sektor pertanian. Hal ini jelas membuktikan bahwa mengembang sektor pertanian dianggap sangat cocok dengan kehidupan kemasyarakatan di Bengkulu. Sektor ini dianggap tidak banyak memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat terutama dalam mempertahankan nilai-nilai budaya.

4.6.3 Analisis fokus kebijakan dilihat dari kategori lingkungan

Tabel 4.11
Fokus Kebijakan Sisi Positif Kategori Lingkungan

Alternatif Kebijakan	Bobot Prioritas			
	Rejang Lebong	Bengkulu Utara	Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu
1. Pertanian	0,224 (2)	0,360 (2)	0,220 (2)	0,363 (2)
2. Pariwisata	0,590 (1)	0,366 (1)	0,480 (1)	0,373 (1)
3. Pertambangan	0,079 (4)	0,101 (4)	0,113 (4)	0,107 (4)
4. Industri	0,106 (3)	0,174 (3)	0,187 (3)	0,157 (3)

Tabel 4.12
Fokus Kebijakan Sisi Negatif Kategori Lingkungan

Alternatif Kebijakan	Bobot Prioritas			
	Rejang Lebong	Bengkulu Utara	Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu
1. Pertanian	0,162 (3)	0,172 (3)	0,089 (4)	0,080 (4)
2. Pariwisata	0,056 (4)	0,099 (4)	0,094 (3)	0,260 (2)
3. Pertambangan	0,537 (1)	0,467 (1)	0,409 (1)	0,250 (3)
4. Industri	0,245 (2)	0,263 (2)	0,408 (2)	0,410 (1)

Tabel 4.13
Rasio Manfaat-Biaya Untuk Kategori Lingkungan

Alternatif Kebijakan	Rasio Manfaat-Biaya			
	Rejang Lebong	Bengkulu Utara	Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu
1. Pertanian	1,383 (2)	2,093 (2)	2,472 (2)	4,538 (1)
2. Pariwisata	10,536 (1)	3,697 (1)	5,106 (1)	1,435 (2)
3. Pertambangan	0,147 (4)	0,216 (4)	0,276 (4)	0,428 (3)
4. Industri	0,433 (3)	0,662 (3)	0,458 (3)	0,383 (4)

Dari tabel 11,12, dan 13 di atas terlihat bahwa kebijakan yang dapat dijadikan sebagai fokus dalam pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu, jika dilihat dari dampaknya terhadap lingkungan di Bengkulu khususnya lingkungan di masing-masing wilayah kabupaten/kota, maka mengembangkan sektor pariwisata dan sektor pertanian dianggap kebijakan yang bersahabat dengan lingkungan. Artinya tidak banyak menyebabkan kerusakan ataupun pencemaran lingkungan.

Sektor pariwisata dianggap paling cocok diprioritaskan untuk Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan, mengingat di daerah ini potensi wisatanya masih bersifat alami dan jika dikelola lagi tidak akan merusak lingkungan, tapi justru akan lebih terawat dan terjaga kelestariannya. Berbeda dengan Kota Bengkulu, justru mengembangkan sektor pertanian dianggap paling tepat dalam hal menjaga kelestarian lingkungan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

- a. Hasil sintesa akhir global atas hirarki dari sisi positif menunjukkan bahwa Pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu memberikan dampak dalam jangka panjang untuk Kabupaten Bengkulu Utara (0,800), Bengkulu Selatan (0,750) dan Kota Bengkulu (0,667), sedangkan Kabupaten Rejang Lebong tidak adanya perbedaan dampak dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Untuk kategori dampak, pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu sangat besar dampaknya pada kategori ekonomi, yaitu dalam menyerap tenaga kerja di daerah, dengan adanya proyek-proyek pembangunan ternyata membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Akan tetapi terlihat berbeda untuk Kabupaten Bengkulu Utara, dimana masyarakat belum merasa adanya manfaat yang besar dalam perekonomian bagi masyarakat setempat, seperti penyediaan lapangan kerja ataupun peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
- b. Hasil sintesa akhir global atas hirarki dari sisi negatif, dilihat dari periode dampak, dampak dalam jangka panjang adalah dampak yang lebih besar untuk Kabupaten Rejang Lebong (0,750) dan Kabupaten Bengkulu Utara (0,750), sedangkan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu lebih pada dampak dalam jangka pendek dengan bobot prioritas masing-masing (0,750) dan (0,667). Untuk kategori dampak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan menganggap bahwa pembangunan di daerah ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif pada kategori lingkungan terutama terjadinya kerusakan lingkungan. Berbeda dengan pembangunan di Kota Bengkulu, dimana dampak negatifnya justru dirasa lebih besar pada kategori sosial yaitu pada perubahan gaya hidup masyarakat.
- c. Dengan melihat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, dapat dapat ditentukan strategi pembangunan yang paling tepat untuk masa mendatang

yang dapat dijadikan sebagai fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu. Mengembangkan sektor pariwisata merupakan prioritas tertinggi untuk Kabupaten Rejang Lebong (0,338), Kabupaten Bengkulu Selatan (0,320), dan Kota Bengkulu (0,335), namun sektor ini juga menciptakan dampak negatif yang cukup besar juga. Dari rasio manfaat biaya dapat ditentukan strategi mengembangkan sektor pertanian merupakan fokus kebijakan yang tepat dalam pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu untuk masa mendatang.

d. Urutan prioritas fokus kebijakan untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Kabupaten Rejang Lebong

1. Mengembangkan sektor pertanian, dengan rasio 2,752
2. Mengembangkan sektor pariwisata, dengan rasio 1,688
3. Mengembangkan sektor Industri, dengan rasio 0,941
4. Mengembangkan sektor pertambangan dengan rasio 0,245

Kabupaten Bengkulu Utara

1. Mengembangkan sektor pertanian, dengan rasio 2,513
2. Mengembangkan sektor pariwisata, dengan rasio 1,112
3. Mengembangkan sektor Industri, dengan rasio 0,453
4. Mengembangkan sektor pertambangan dengan rasio 0,745

Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Mengembangkan sektor pariwisata, dengan rasio 1,718
2. Mengembangkan sektor pertanian, dengan rasio 1,579
3. Mengembangkan sektor Industri, dengan rasio 0,762
4. Mengembangkan sektor pertambangan dengan rasio 0,685

Kota Bengkulu

1. Mengembangkan sektor pertanian, dengan rasio 2,829
2. Mengembangkan sektor pariwisata, dengan rasio 1,150
3. Mengembangkan sektor Industri, dengan rasio 0,719
4. Mengembangkan sektor pertambangan dengan rasio 0,447

- e. Dilihat dari kategori ekonomi, mengembangkan sektor pertanian merupakan prioritas untuk Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu sedangkan untuk Kabupaten Bengkulu Selatan memprioritaskan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Untuk kategori sosial mengembangkan sektor pertanian merupakan prioritas untuk semua kabupaten, sedangkan dari kategori lingkungan mengembangkan sektor pariwisata merupakan strategi yang paling layak untuk Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Kota Bengkulu menganggap sektor pertanian yang paling layak untuk dikembangkan.

5.2 Saran-Saran (Rekomendasi)

- a. Pembangunan di Provinsi Bengkulu terutama pada kabupaten-kabupaten hendaknya memfokuskan pada pengembangan sektor pertanian, sehingga terciptanya sistem agribisnis yang memiliki keterkaitan antar subsistemnya (hulu, usahatani, pengolahan, pemasaran dan jasa/distribusi) dan harus terintegrasi dengan baik, karena besarnya peran sektor ini dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyerap tenaga kerja di Bengkulu,
- b. Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi diharapkan dapat dimanfaatkan guna meningkatkan produktifitas pertanian. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung pertanian di Provinsi Bengkulu, terutama di kabupaten-kabupaten melalui program-program pembangunan yang pro-pertanian, seperti memudahkan dalam memasarkan hasil pertanian, membangun infrastruktur yang dapat memudahkan dalam berproduksi sehingga mengurangi biaya operasional.
- c. Menjaga mutu dan kualitas agar hasil-hasil pertanian dapat bersaing di pasar guna memudahkan dalam mencari pasar untuk hasil-hasil pertanian dan meningkatkan penjualan keluar daerah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.
- d. Semakin meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang, untuk itu perlu adanya pembatasan pembangunan untuk lahan-lahan produktif dan perlu di berdayakan lahan-lahan yang belum

dikelola dengan baik dengan membangun sarana yang mendukung seperti jalan, irigasi dan lain-lain.

- e. Pembangunan jangan hanya melihat tujuan yang hendak dicapai, tetapi harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, baik itu dampak sosial, ekonomi maupun lingkungan. Selain itu juga harus memberi manfaat yang besar baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Untuk itu pembangunan harus berkelanjutan dan bukannya menjadi tidak berguna dimasa yang akan datang. Perencanaan dan penelitian merupakan salah satu cara yang tepat dalam mengidentifikasi arah kebijakan pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arsyad, Lincolin (1999). *Pengantar Perencanaan dan pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Corralie Bryant dan Louise G. While (1989). *Manajemen Pembangunan : untuk negara berkembang*. Jakarta: LP3ES, 1989;
- Jhingan, M.L (1996). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka* (2009). Curup: BPS.
- Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Angka* (2009). Curup: BPS.
- Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka* (2009). Curup: BPS.
- Kota Bengkulu Dalam Angka* (2009). Curup: BPS.
- LEMHANAS (1997). *Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Nasir, M (1999). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pindyck, S. Dan Daniel, L.R (1999). *Mikroekonomi*. Jakarta: PT. Prenhalindo.
- Permadi, Bambang (1992). "AHP". Jakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi-Universitas Indonesia.
- Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (2009). Bengkulu: BPS.
- Saaty, Thomas L. (1990). *The Analytic Hierarchy Process: Planing, Priority Setting, Resource Allocation*. Pittsburg: University of Pittsburgh Pers.
- Saul M. Katz (1992). *Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetrisno, Loekman (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Todaro, Michael P (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 1, Alih Bahasa Haris Munandar, Erlangga.
- Todaro, Michael P (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 2, Alih Bahasa Haris Munandar, Erlangga.
- Sugiyanto, SH., MPA (2003). *Kebijakan Publik*.

Jurnal dan Artikel :

Davis S., David (1983). *System Analysis and Design A Structured Approach*,
Massachusetts : Addison-Wesley, Module H.

Dharma Tintri E. Sudarsono (2004). *Penerapan Analitical Hierarchy Process
(AHP) Untuk Pemilihan Metode Audit PDE Oleh Auditor Internal*.
Artikel.

Santoso Urip (2009). *Potensi dan Arah Penelitian Sumberdaya Alam dan
Lingkungan di Provinsi Bengkulu*. Makalah.



Lampiran 1 : Matriks Perbandingan Rata-Rata

Matriks Perbandingan Rata-Rata Untuk Hirarki Sisi Positif

Level 1

Kab/Kota	Periode Dampak	Jk. Pen	Jk. Pan
Kab. RL	Jk. Pendek	1	1
	Jk. Panjang	1	1
Kab. BU	Jk. Pendek	1	1/4
	Jk. Panjang	4	1
Kab. BS	Jk. Pendek	1	1/3
	Jk. Panjang	3	1
Kota Bkl	Jk. Pendek	1	1/2
	Jk. Panjang	2	1

Level 2

Kab/Kota	Jk. Pendek	Eko	Sos	Ling
Kab. RL	Eko	1	2	2
	Sos	1/2	1	1
	Ling	1/2	1	1
Kab. BU	Eko	1	3	3
	Sos	1/3	1	1
	Ling	1/3	1	1
Kab. BS	Eko	1	2	1
	Sos	1/2	1	1/2
	Ling	1	2	1
Kota Bkl	Eko	1	2	2
	Sos	1/2	1	1
	Ling	1/2	1	1

Level 2

Kab/Kota	Jk. Panjang	Eko	Sos	Ling
Kab. RL	Eko	1	1	1
	Sos	1	1	1
	Ling	1	1	1
Kab. BU	Eko	1	1/2	1/3
	Sos	2	1	1/2
	Ling	3	2	1
Kab. BS	Eko	1	1	1
	Sos	1	1	1
	Ling	1	1	1
Kota Bkl	Eko	1	2	2
	Sos	1/2	1	1
	Ling	1/2	1	1

Level 3

Kab/Kota	Sosial	KBD	Pend	Kes
Kab. RL	KBD	1	1/3	1/6
	Pendidikan	3	1	1/3
	Kesehatan	6	3	1
Kab. BU	KBD	1	1/3	1/3
	Pendidikan	3	1	1
	Kesehatan	3	1	1
Kab. BS	KBD	1	1	1/2
	Pendidikan	1	1	1/2
	Kesehatan	2	2	1
Kota Bkl	KBD	1	1	1/3
	Pendidikan	1	1	1/2
	Kesehatan	3	2	1

Level 3

Kab/Kota	Ekonomi	PTK	PPLD	ASD	PAD
Kab. RL	PTK	1	4	2	2
	PPLD	1/4	1	1/3	1
	ASD	1/2	3	1	3
	PAD	1/2	1	1/3	1
Kab. BU	PTK	1	4	2	1/2
	PPLD	1/4	1	1/2	1/2
	ASD	1/2	2	1	1/2
	PAD	2	2	2	1
Kab. BS	PTK	1	3	1	1
	PPLD	1/3	1	1/3	1/2
	ASD	1	3	1	1
	PAD	1	2	1	1
Kota Bkl	PTK	1	3	3	1
	PPLD	1/3	1	1	1
	ASD	1/3	1	1	1/2
	PAD	1	1	2	1

Level 3

Kab/Kota	Ling.	WWL	KmL
Kab. RL	WWL	1	1/5
	KmL	5	1
Kab. BU	WWL	1	2
	KmL	1/2	1
Kab. BS	WWL	1	1/3
	KmL	3	1
Kota Bkl	WWL	1	1
	KmL	1	1

Level 4

Kab/Kota	PTK	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	2	3	1
	Pariwisata	1/2	1	1	1/2
	Tambang	1/3	1	1	1/3
	Industri	1	2	3	1
Kab. BU	Pertanian	1	4	2	1
	Pariwisata	1/4	1	1/2	1/2
	Tambang	1/2	2	1	1/2
	Industri	1	2	2	1
Kab. BS	Pertanian	1	1/2	1/2	1/2
	Pariwisata	2	1	1	1
	Tambang	2	1	1	1
	Industri	2	1	1	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1	2	1
	Pariwisata	1	1	4	1
	Tambang	1/2	1/4	1	1/2
	Industri	1	1	2	1

Lampiran 1 : Matriks Perbandingan Rata-Rata

Matriks Perbandingan Rata-Rata Untuk Hirarki Sisi Positif

Level 4

Kab/Kota	PPLD	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	4	4	3
	Pariwisata	1/4	1	1	1
	Tambang	1/4	1	1	1/2
	Industri	1/3	1	2	1
Kab. BU	Pertanian	1	5	1	3
	Pariwisata	1/5	1	1/4	1/3
	Tambang	1	4	1	2
	Industri	1/3	3	1/2	1
Kab. BS	Pertanian	1	2	1/3	1/3
	Pariwisata	1/2	1	1/4	1/3
	Tambang	3	4	1	2
	Industri	3	3	1/2	1
Kota Bkl	Pertanian	1	2	3	2
	Pariwisata	1/2	1	2	1/2
	Tambang	1/3	1/2	1	1/2
	Industri	1/2	2	2	1

Level 4

Kab/Kota	Pend	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1/4	1/2	1/4
	Pariwisata	4	1	4	2
	Tambang	2	1/4	1	1/2
	Industri	4	1/2	2	1
Kab. BU	Pertanian	1	1/2	1	1/4
	Pariwisata	2	1	2	1/2
	Tambang	1	1/2	1	1/4
	Industri	4	2	4	1
Kab. BS	Pertanian	1	1/4	1/2	1/4
	Pariwisata	4	1	2	1/3
	Tambang	2	1/2	1	1/4
	Industri	4	3	4	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1/5	1/2	1/2
	Pariwisata	5	1	3	1/3
	Tambang	2	1/3	1	1/4
	Industri	2	3	4	1

Level 4

Kab/Kota	ASD	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1	3	2
	Pariwisata	1	1	3	2
	Tambang	1/3	1/3	1	1/2
	Industri	1/2	1/2	2	1
Kab. BU	Pertanian	1	4	2	2
	Pariwisata	1/4	1	1/3	1/2
	Tambang	1/2	3	1	2
	Industri	1/2	2	1/2	1
Kab. BS	Pertanian	1	1/2	1/2	1/2
	Pariwisata	2	1	1	1
	Tambang	2	1	1	1
	Industri	2	1	1	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1	2	1
	Pariwisata	1	1	3	2
	Tambang	1/2	1/3	1	1
	Industri	1	1/2	1	1

Level 4

Kab/Kota	Kesehatan	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	4	4	5
	Pariwisata	1/4	1	3	3
	Tambang	1/4	1/3	1	1
	Industri	1/5	1/3	1	1
Kab. BU	Pertanian	1	3	5	4
	Pariwisata	1/3	1	3	3
	Tambang	1/5	1/3	1	1
	Industri	1/4	1/3	1	1
Kab. BS	Pertanian	1	2	4	4
	Pariwisata	1/2	1	2	2
	Tambang	1/4	1/2	1	1
	Industri	1/4	1/2	1	1
Kota Bkl	Pertanian	1	3	4	4
	Pariwisata	1/3	1	1	1
	Tambang	1/4	1	1	1
	Industri	1/4	1	1	1

Level 4

Kab/Kota	KBD	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1/2	3	2
	Pariwisata	2	1	5	4
	Tambang	1/3	1/5	1	1/2
	Industri	1/2	1/4	2	1
Kab. BU	Pertanian	1	3	2	2
	Pariwisata	1/3	1	1/2	1/2
	Tambang	1/2	2	1	1
	Industri	1/2	2	1	1
Kab. BS	Pertanian	1	1/2	1	1/2
	Pariwisata	2	1	1	1
	Tambang	1	1	1	1
	Industri	2	1	1	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1/4	1	1/2
	Pariwisata	4	1	5	3
	Tambang	1	1/5	1	1/2
	Industri	2	1/3	2	1

Level 4

Kab/Kota	WWL	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1/4	3	3
	Pariwisata	4	1	6	6
	Tambang	1/3	1/6	1	1
	Industri	1/3	1/6	1	1
Kab. BU	Pertanian	1	1	3	2
	Pariwisata	1	1	3	2
	Tambang	1/3	1/3	1	1/2
	Industri	1/2	1/2	2	1
Kab. BS	Pertanian	1	1/3	1	1
	Pariwisata	3	1	3	3
	Tambang	1	1/3	1	1
	Industri	1	1/3	1	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1/2	2	2
	Pariwisata	2	1	4	4
	Tambang	1/2	1/4	1	1/2
	Industri	1/2	1/4	2	1

Lampiran 1 : Matriks Perbandingan Rata-Rata

Matriks Perbandingan Rata-Rata Untuk Hirarki Sisi Positif

Level 4

Kab/Kota	Km. Ling	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1/4	3	3
	Pariwisata	4	1	5	5
	Tambang	1/3	1/5	1	1/2
	Industri	1/3	1/5	2	1
Kab. BU	Pertanian	1	1	4	3
	Pariwisata	1	1	5	3
	Tambang	1/4	1/5	1	1/2
	Industri	1/3	1/3	2	1
Kab. BS	Pertanian	1	1/2	3	1
	Pariwisata	2	1	4	3
	Tambang	1/3	1/4	1	1/2
	Industri	1	1/3	2	1
Kota Bkl	Pertanian	1	2	4	3
	Pariwisata	1/2	1	2	2
	Tambang	1/4	1/2	1	1/2
	Industri	1/3	1/2	2	1

Level 4

Kab/Kota	PAD	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1/2	3	1/2
	Pariwisata	2	1	4	1
	Tambang	1/3	1/4	1	1/4
	Industri	2	1	4	1
Kab. BU	Pertanian	1	4	2	3
	Pariwisata	1/4	1	1/2	1/2
	Tambang	1/2	2	1	1
	Industri	1/3	2	1	1
Kab. BS	Pertanian	1	1	1	1/2
	Pariwisata	1	1	1	1/2
	Tambang	1	1	1	1
	Industri	2	2	1	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1/2	2	1
	Pariwisata	2	1	4	2
	Tambang	1/2	1/4	1	1/3
	Industri	1	1/2	3	1

Keterangan Istilah:

Kab. RL : Kabupaten Rejang Lebong
 Kab. BU : Kabupaten Bengkulu Utara
 Kab. BS : Kabupaten Bengkulu Selatan
 Kota BKL : Kota Bengkulu
 Jk. Pen : Jangka Pendek
 Jk. Pan : Jangka Panjang
 Eko : Ekonomi
 Sos : Sosial
 Ling : Lingkungan
 PTK : Penyerapan Tenaga Kerja
 PPLD : Penjualan Produk ke Luar Daerah
 ASD : Alokasi Sumber Daya
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 KBD : Kebanggaan Terhadap Daerah
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 BOP : Biaya Operasional
 PPAD : Persaingan Produk Antar Daerah
 PTKL : Penggunaan Tenaga Kerja Luar
 PGH : Perubahan Gaya Hidup
 KJS : Kesenjangan Sosial
 KRL : Kerusakan Lingkungan
 Pol : Polusi

Pend : Pendidikan
 Kes : Kesehatan
 Pert : Pertanian
 Prws : Pariwisata
 Tmbg : Pertambangan
 Inds : Industri
 WWL : Wawasan Lingkungan
 KmL : Keamanan Lingkungan

Lampiran 1 : Matriks Perbandingan Rata-Rata

Matriks Perbandingan Rata-Rata Untuk Hirarki Sisi Negatif

Level 1

Kab/Kota	Periode Dampak	Jk. Pen	Jk. Pan
Kab. RL	Jk. Pendek	1	1/3
	Jk. Panjang	3	1
Kab. BU	Jk. Pendek	1	1/3
	Jk. Panjang	3	1
Kab. BS	Jk. Pendek	1	3
	Jk. Panjang	1/3	1
Kota Bkl	Jk. Pendek	1	2
	Jk. Panjang	1/2	1

Level 2

Kab/Kota	Jk. Pendek	Eko	Sos	Ling
Kab. RL	Eko	1	1	1
	Sos	1	1	1/2
	Ling	1	2	1
Kab. BU	Eko	1	1	1
	Sos	1	1	1
	Ling	1	1	1
Kab. BS	Eko	1	1	1
	Sos	1	1	1/2
	Ling	1	2	1
Kota Bkl	Eko	1	1	1
	Sos	1	1	2
	Ling	1	1/2	1

Level 2

Kab/Kota	Jk. Panjang	Eko	Sos	Ling
Kab. RL	Eko	1	1/5	1/5
	Sos	5	1	1
	Ling	5	1	1
Kab. BU	Eko	1	1/3	1/4
	Sos	3	1	1/2
	Ling	4	2	1
Kab. BS	Eko	1	1/2	1/2
	Sos	2	1	1
	Ling	2	1	1
Kota Bkl	Eko	1	1/2	1/2
	Sos	2	1	1
	Ling	2	1	1

Level 3

Kab/Kota	Ekonomi	BOP	PPAD
Kab. RL	BOP	1	2
	PPAD	1/2	1
Kab. BU	BOP	1	1
	PPAD	1	1
Kab. BS	BOP	1	2
	PPAD	1/2	1
Kota Bkl	BOP	1	3
	PPAD	1/3	1

Level 3

Kab/Kota	Sosial	PTKL	PGH	KJS
Kab. RL	PTKL	1	1/2	1/3
	PGH	2	1	1
	KJS	3	1	1
Kab. BU	PTKL	1	1	1/2
	PGH	1	1	1/2
	KJS	2	2	1
Kab. BS	PTKL	1	3	3
	PGH	1/3	1	1
	KJS	1/3	1	1
Kota Bkl	PTKL	1	1/2	1/2
	PGH	2	1	2
	KJS	2	1/2	1

Level 3

Kab/Kota	Ling	KRL	Pol
Kab. RL	KRL	1	7
	Pol	1/7	1
Kab. BU	KRL	1	3
	Pol	1/3	1
Kab. BS	KRL	1	2
	Pol	1/2	1
Kota Bkl	KRL	1	3
	Pol	1/3	1

Level 4

Kab/Kota	BOP	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1/4	1/3	1/5
	Pariwisata	4	1	1/3	1/2
	Tambang	3	3	1	2
	Industri	5	2	1/2	1
Kab. BU	Pertanian	1	1/3	1/3	1/3
	Pariwisata	3	1	1	1
	Tambang	3	1	1	1
	Industri	3	1	1	1
Kab. BS	Pertanian	1	1/2	1/3	1/2
	Pariwisata	2	1	1/2	1
	Tambang	3	2	1	1
	Industri	2	1	1	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1/4	1/4	1/3
	Pariwisata	4	1	1/2	1
	Tambang	4	2	1	1
	Industri	3	1	1	1

Lampiran 1 : Matriks Perbandingan Rata-Rata

Matriks Perbandingan Rata-Rata Untuk Hirarki Sisi Negatif

Level 4

Kab/Kota	PPAD	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1	1	1/4
	Pariwisata	1	1	1/2	1/2
	Tambang	1	2	1	1
	Industri	4	2	1	1
Kab. BU	Pertanian	1	1	2	1
	Pariwisata	1	1	1	1
	Tambang	1/2	1	1	1/2
	Industri	1	1	2	1
Kab. BS	Pertanian	1	2	1	1/2
	Pariwisata	1/2	1	1	1/2
	Tambang	1	1	1	1
	Industri	2	2	1	1
Kota Bkl	Pertanian	1	2	3	1
	Pariwisata	1/2	1	2	1/2
	Tambang	1/3	1/2	1	1/3
	Industri	1	2	3	1

Level 4

Kab/Kota	KJS	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1	1/4	1/4
	Pariwisata	1	1	1/2	1/3
	Tambang	4	2	1	1
	Industri	4	3	1	1
Kab. BU	Pertanian	1	1/3	1/3	1/3
	Pariwisata	3	1	1	1
	Tambang	3	1	1	1
	Industri	3	1	1	1
Kab. BS	Pertanian	1	1/2	1/3	1/4
	Pariwisata	2	1	1	1/2
	Tambang	3	1	1	1/2
	Industri	4	2	2	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1/3	1/4	1/3
	Pariwisata	3	1	1	1
	Tambang	4	1	1	1
	Industri	3	1	1	1

Level 4

Kab/Kota	PTKL	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1/2	1/5	1/5
	Pariwisata	2	1	1/3	1/3
	Tambang	5	3	1	2
	Industri	5	3	1/2	1
Kab. BU	Pertanian	1	1/2	1/4	1/3
	Pariwisata	2	1	1/2	1
	Tambang	4	2	1	1
	Industri	3	1	1	1
Kab. BS	Pertanian	1	1/3	1/4	1/4
	Pariwisata	3	1	1/2	1/2
	Tambang	4	2	1	1
	Industri	4	2	1	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1/4	1/3	1/3
	Pariwisata	4	1	1	1
	Tambang	3	1	1	1/3
	Industri	3	1	3	1

Level 4

Kab/Kota	KRL	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	4	1/4	1
	Pariwisata	1/4	1	1/6	1/6
	Tambang	4	6	1	4
	Industri	1	6	1/4	1
Kab. BU	Pertanian	1	1	1/4	2
	Pariwisata	1	1	1/5	1/3
	Tambang	4	5	1	2
	Industri	1/2	3	1/2	1
Kab. BS	Pertanian	1	1	1/5	1/3
	Pariwisata	1	1	1/5	1/4
	Tambang	5	5	1	1
	Industri	3	4	1	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1/2	1/5	1/4
	Pariwisata	2	1	3	1/3
	Tambang	5	1/3	1	1
	Industri	4	3	1	1

Level 4

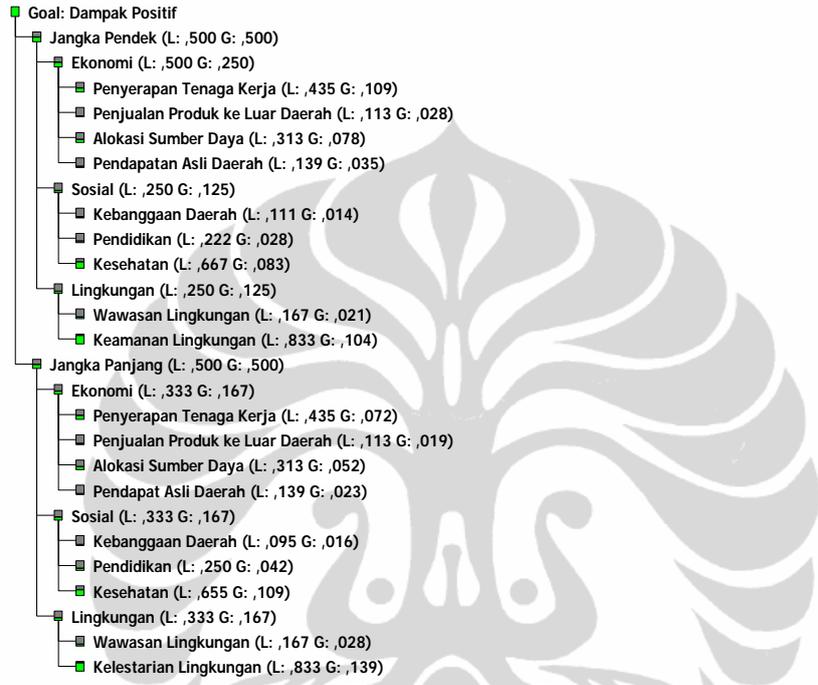
Kab/Kota	PGH	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1/6	1/4	1/3
	Pariwisata	6	1	4	5
	Tambang	4	1/4	1	1
	Industri	3	1/5	1	1
Kab. BU	Pertanian	1	1/5	1/3	1/3
	Pariwisata	5	1	2	3
	Tambang	3	1/2	1	1/2
	Industri	3	1/3	2	1
Kab. BS	Pertanian	1	1/5	1/2	1/2
	Pariwisata	5	1	2	3
	Tambang	2	1/2	1	1
	Industri	2	1/3	1	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1/5	1/2	1/4
	Pariwisata	5	1	4	3
	Tambang	2	1/4	1	1
	Industri	4	1/3	1	1

Level 4

Kab/Kota	Polusi	Pert.	Prws	Tmbg	Inds
Kab. RL	Pertanian	1	1	1/4	1/6
	Pariwisata	1	1	1/2	1/7
	Tambang	4	5	1	1/2
	Industri	6	7	2	1
Kab. BU	Pertanian	1	2	1/3	1/4
	Pariwisata	1/2	1	1/4	1/5
	Tambang	3	4	1	1
	Industri	4	5	1	1
Kab. BS	Pertanian	1	1/2	1/5	1/6
	Pariwisata	2	1	1/5	1/5
	Tambang	5	5	1	1/2
	Industri	6	5	2	1
Kota Bkl	Pertanian	1	1/3	1/3	1/5
	Pariwisata	3	1	1/2	1/3
	Tambang	3	2	1	1/2
	Industri	5	3	2	1

Model Name: Dampak Positif Kab Rejang Lebong

Treeview



Alternatives

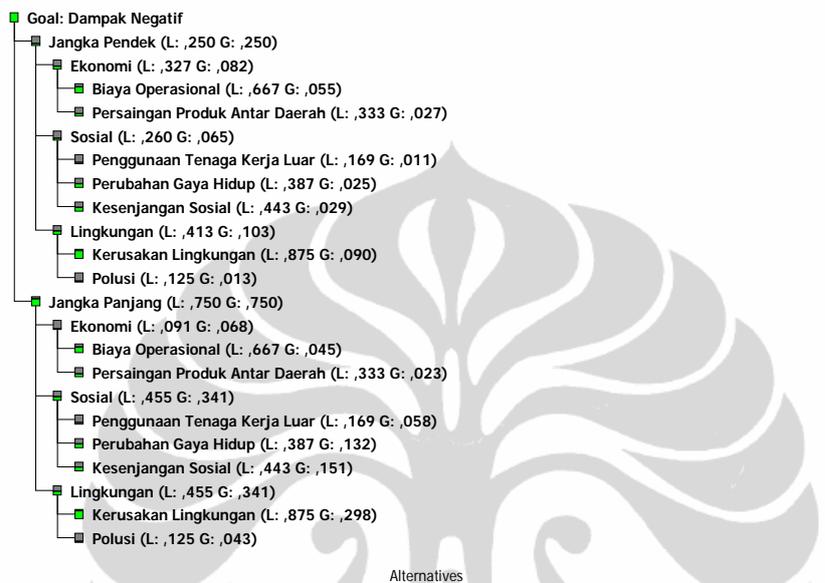
Pertanian	,317
Pariwisata	,338
Pertambangan	,104
Industri	,241

* Ideal mode

Daffa

Model Name: Dampak Negatif Kab Rejang Lebong

Treeview



Alternatives

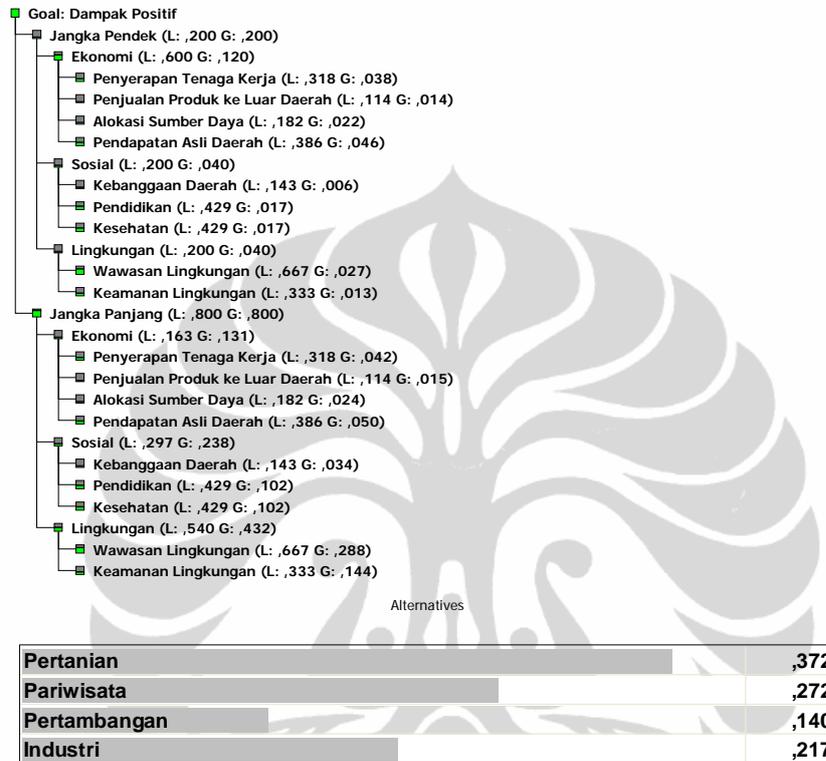
Pertanian	,121
Pariwisata	,173
Pertambangan	,417
Industri	,290

* Ideal mode

Daffa

Model Name: Dampak Positif Kab Bengkulu Utara

Treewiew

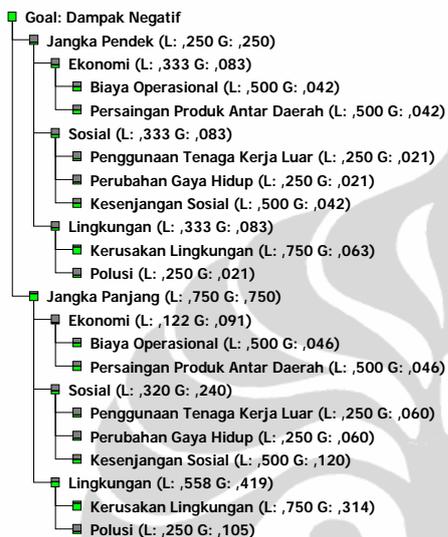


* Ideal mode

Daffa

Model Name: Dampak Negatif Kab Bengkulu Utara

Treeview



Alternatives

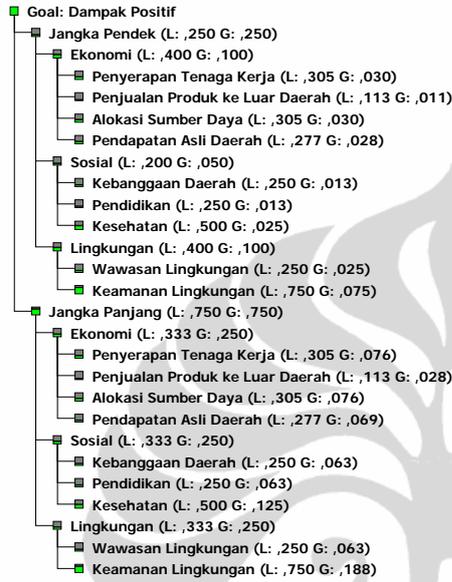
Pertanian	,150
Pariwisata	,217
Pertambangan	,353
Industri	,280

* Ideal mode

Daffa

Model Name: Dampak Positif Kab Bengkulu Selatan

Treewiew



Alternatives

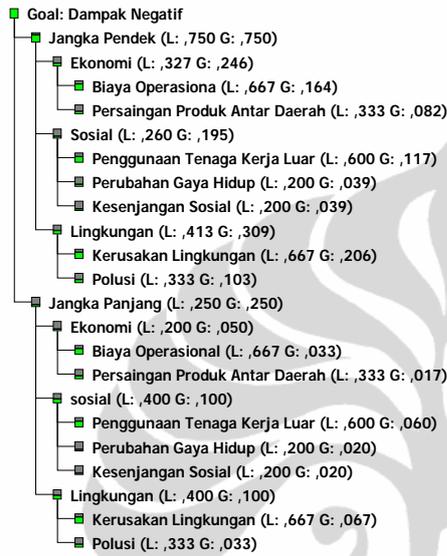
Pertanian	,214
Pariwisata	,320
Pertambangan	,207
Industri	,260

* Ideal mode

Daffa

Model Name: Dampak Negatif Kab Bengkulu Selatan

Treeview



Alternatives

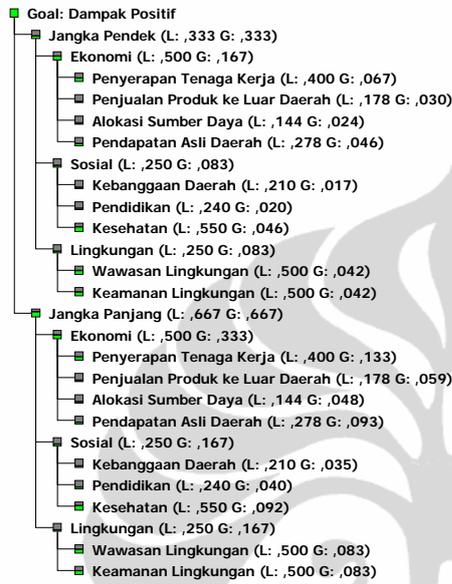
Pertanian	,114
Pariwisata	,181
Pertambangan	,352
Industri	,353

* Ideal mode

Daffa

Model Name: Dampak Positif Kota Bengkulu

Treeview



Alternatives

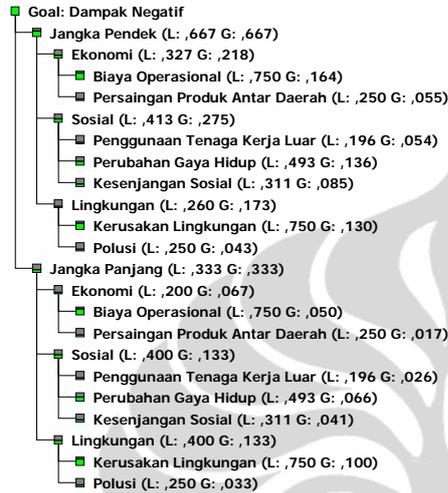
Pertanian	,314
Pariwisata	,335
Pertambangan	,119
Industri	,232

* Ideal mode

Daffa

Model Name: Dampak Negatif Kota Bengkulu

Treewiew



Alternatives

Pertanian	,105
Pariwisata	,306
Pertambangan	,262
Industri	,327

* Ideal mode

Daffa

**KUESIONER AHP (THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS)
EVALUASI KEBIJAKAN KABUPATEN-KABUPATEN
DI PROVINSI BENGKULU**

1. Penjelasan Singkat Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi atau penilaian responden yang dianggap ekspert atas kebijakan kabupaten-kabupaten dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.
- b. Kegunaan penelitian ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu.
- c. Persepsi atau penilaian responden atas elemen-elemen yang mempengaruhi pengambilan keputusan berasal dari orang-orang yang dianggap ekspert, mengerti akan suatu permasalahan dan memiliki kepentingan terhadap masalah tersebut.
- d. Mengingat pentingnya masukan dari Bapak/Ibu, mohon kiranya dapat memberikan penilaian dalam kuesioner berikut. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan Bapak/Ibu maka penulisan tesis ini tidak dapat terwujud.
- e. Karena sifatnya penelitian, maka segala masukan yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya.

2. Data Responden

- Nama :
- Instansi :
- Pendidikan :
- Masa kerja :
- Alamat :
- No. Telp :
- Tanggal Pengisian :

Prinsip Dasar dan Petunjuk Pengisian Kuesioner AHP

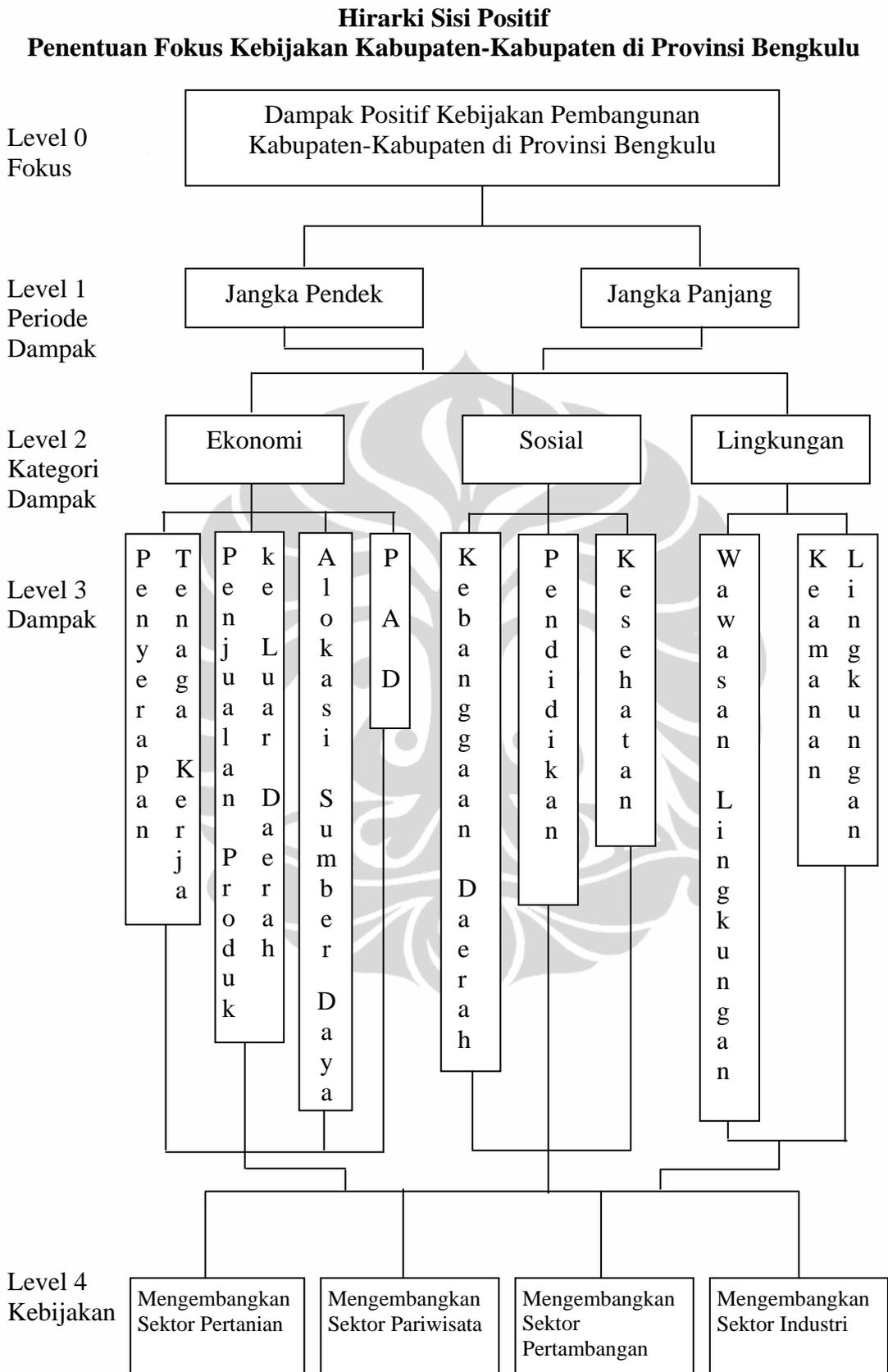
3.1. Prinsip dasar AHP

The Analytic Hierarchy Process, yang selanjutnya disebut AHP adalah prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif. Atribut-atribut tersebut secara matematik dikuantitatif dalam satu set perbandingan berpasangan. AHP dapat juga diartikan sebagai suatu metode pengambilan keputusan bentuknya sederhana, fleksibel dan berdaya guna besar (powerfull) untuk mendukung suatu proses pengambilan keputusan yang multi kriteria, multi tujuan, dan penuh dengan situasi kompleks. Sehingga AHP dapat dikatakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif.

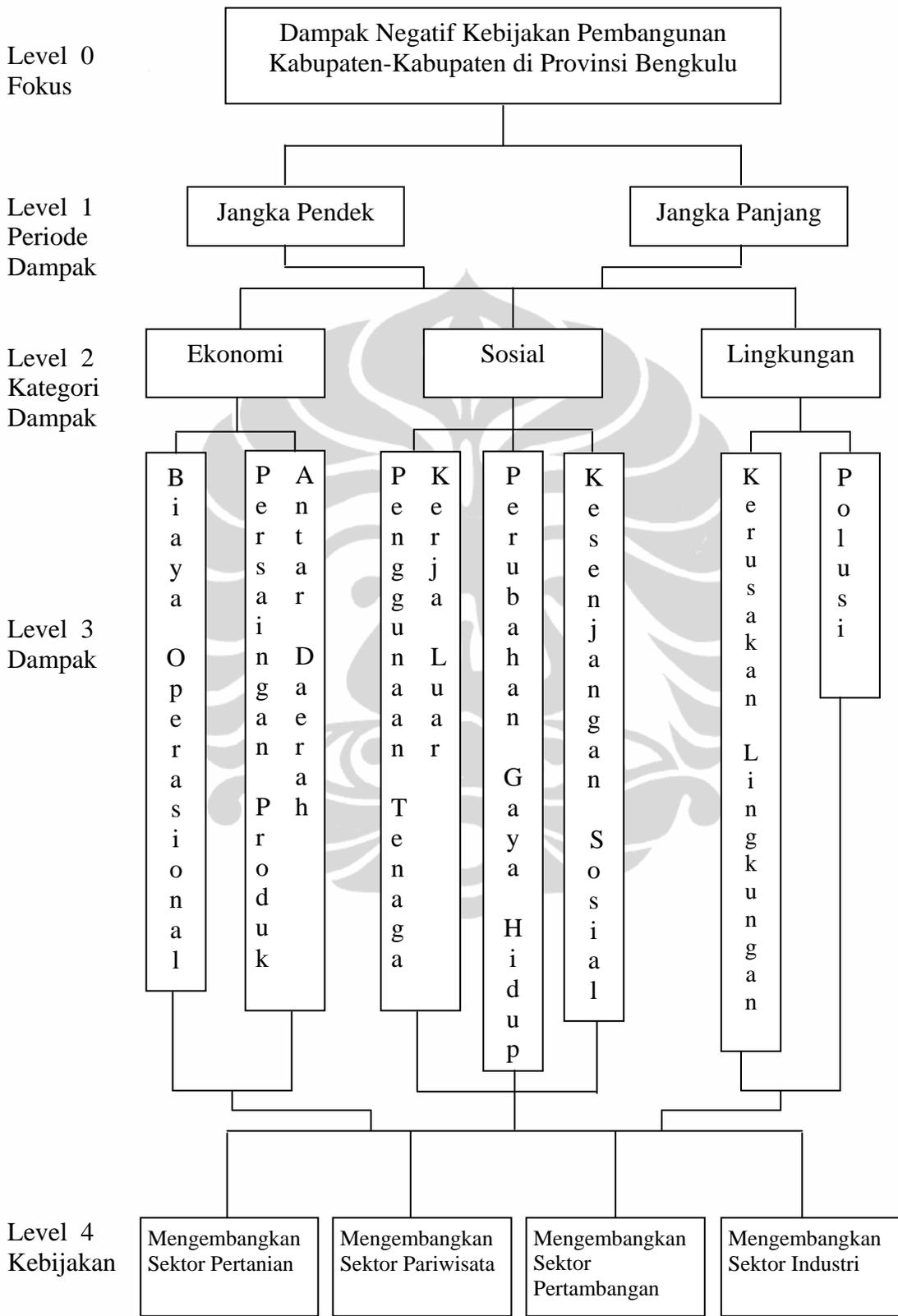
Ciri utama dari model ini adalah menggunakan hirarki fungsional. Suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan kedalam kelompok-kelompok, kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki. Input utamanya adalah persepsi atau penilaian manusia, sedangkan inti dari proses AHP adalah membandingkan tingkat prioritas beberapa elemen atau variabel pada suatu level atau tingkatan dari suatu susunan hirarki. Hasil dari proses perbandingan tersebut, setiap elemen diberi bobot secara numerik baik pada analisa manfaat ataupun biaya yang pada akhir analisa akan disatukan untuk menentukan tindakan yang layak atau tidak.

Hirarki Penentuan Fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu terdiri dari sisi positif dan negatif, yang terdiri atas:

Level 0	:	Fokus
Level 1	:	Periode Dampak
Level 2	:	Kategori Dampak
Level 3	:	Dampak
Level 4	:	Kebijakan



Hirarki Sisi Negatif
Penentuan Fokus Kebijakan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Bengkulu



3.2. Petunjuk Pengisian Kuesioner

- a. Penilaian (judgement) terhadap elemen-elemen dari setiap level hirarki didasarkan atas bobot prioritas atau kepentingannya. Penilaian responden dinyatakan secara numerik (skala 1 sampai 9), dengan devinisi verbal sebagai berikut:

Skala Perbandingan (Numerik)	Definisi Verbal	Keterangan
1	Sama penting (equal importance)	Dua elemen menyumbang sama besar terhadap tujuan
3	Sedikit lebih penting (moderate importance)	Pengalaman dan <i>judgement</i> agak menyukai sebuah elemen dibandingkan yang lainnya
5	Lebih penting (essential/strong importance)	Pengalaman dan <i>judgement</i> lebih kuat menyukai sebuah elemen dibandingkan yang lainnya
7	Sangat lebih penting (very strong importance)	Sebuah elemen sangat kuat lebih disukai dan dominasinya terlihat nyata dalam keadaan yang sebenarnya dibandingkan lainnya
9	Mutlak sangat penting (extreme importance)	Fakta bahwa sebuah elemen lebih disukai daripada elemen lainnya berada pada kemungkinan yang tertinggi
2,4,6 dan 8	Merupakan nilai intermediate antara dua judgement yang peringkatnya berdekatan	Bila kompromi diperlukan antara dua penilaian. Artinya jika ragu-ragu memilih skala. Misal antara 7 dan 9, maka nilai antara dapat digunakan.

- b. Proses penilaian kepentingan relatif antara dua elemen tersebut, berlaku aksioma reciprocal, artinya jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dibandingkan elemen j, maka elemen j harus sama dengan 1/3 kali lebih penting dibanding elemen i.
- c. Jika elemen pada kolom sebelah kiri (kolom A) lebih penting dibanding elemen pada kolom sebelah kanan (kolom B) maka nilai perbandingan ditulis pada belahan sebelah kiri, dan jika sebaliknya maka ditulis pada sebelah kanan.

DAFTAR KUESIONER

Berikan tanda silang (X) persepsi atau penilaian Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan berpedoman pada petunjuk pengisian angket kuesioner di atas.

Contoh:

Berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten/Kota dari tahun 2005, dalam periode manakah dampak positif lebih banyak ditimbulkan dari pembangunan tersebut?

(Bandingkan elemen-elemen periode dampak pada kolom A dengan elemen-elemen periode dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Jangka Pendek									X									Jangka Panjang
Jangka Pendek					X													Jangka Panjang
Jangka Pendek															X			Jangka Panjang

- 1) Jika jawaban yang diprioritaskan adalah dampaknya dalam Jangka Pendek sama besarnya dengan dampak dalam jangka panjang, maka tanda silang (X) diletakkan pada kolom angka 1
- 2) Jika jawaban yang diprioritaskan adalah dalam jangka pendek akan lebih banyak dampak positifnya dari dampak positif dalam jangka panjang, maka tanda silang (X) diletakkan pada kolom angka 5 belahan sebelah kiri.
- 3) Jika jawaban yang diprioritaskan adalah dalam jangka panjang dampak positifnya sangat lebih besar dari dalam jangka pendek, maka tanda silang (X) diletakkan pada kolom angka 7 belahan sebelah kanan.

A. LEMBAR PERTANYAAN SESI POSITIF

1. Berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten/Kota dari tahun 2005, dalam periode manakah dampak positif lebih banyak ditimbulkan dari pembangun tersebut?
 (Bandingkan elemen-elemen periode dampak pada kolom A dengan elemen-elemen periode dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Jangka Pendek																		Jangka Panjang

2. Berkaitan dengan pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, kategori dampak manakah yang paling besar pengaruh positifnya dalam jangka pendek?
 (Bandingkan elemen-elemen kategori dampak pada kolom A dengan elemen-elemen kategori dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Ekonomi																		Sosial
Ekonomi																		Lingkungan
Sosial																		Lingkungan

3. Berkaitan dengan pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, kategori dampak manakah yang paling besar pengaruh positifnya dalam jangka panjang?
 (Bandingkan elemen-elemen kategori dampak pada kolom A dengan elemen-elemen kategori dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Ekonomi																		Sosial
Ekonomi																		lingkungan
Sosial																		lingkungan

4. Untuk kategori dampak ekonomi, dampak positif manakah yang paling besar ditimbulkan dari pembangunan di Kabupaten/Kota?
 (Bandingkan elemen-elemen faktor dampak pada kolom A dengan elemen-elemen faktor dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Penyerapan Tenaga Kerja																		Penjualan Produk ke Luar Daerah
Penyerapan Tenaga Kerja																		Alokasi Sumber Daya
Penyerapan Tenaga Kerja																		PAD
Penjualan Produk ke Luar Daerah																		Alokasi Sumber Daya
Penjualan Produk ke Luar Daerah																		PAD
Alokasi Sumber Daya																		PAD

5. Untuk kategori dampak sosial, dampak positif manakah yang paling besar dirasakan masyarakat dari pembangunan di Kabupaten/Kota?
 (Bandingkan elemen-elemen faktor dampak pada kolom A dengan elemen-elemen faktor dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Kebanggaan Daerah																		Pendidikan
Kebanggaan Daerah																		Kesehatan
Pendidikan																		Kesehatan

6. Untuk kategori dampak Lingkungan, dampak positif manakah yang paling besar ditimbulkan dari pembangunan di Kabupaten/Kota?
 (Bandingkan elemen-elemen faktor dampak pada kolom A dengan elemen-elemen faktor dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Wawasan Lingkungan																		Keamanan Lingkungan

7. untuk memberikan dampak yang besar pada penyerapan tenaga kerja, maka kebijakan mana yang lebih tepat untuk diprioritaskan?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

8. untuk memberikan dampak yang besar pada peningkatan penjualan produk ke luar daerah, maka kebijakan mana yang lebih tepat untuk diprioritaskan?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

9. untuk memberikan dampak yang besar pada optimalisasi alokasi sumber daya yang dimiliki, maka kebijakan mana yang lebih tepat untuk diprioritaskan?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

10. untuk memberikan dampak yang besar pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan mana yang lebih tepat untuk diprioritaskan?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

11. untuk memberikan dampak yang besar pada kebanggaan terhadap daerah, maka kebijakan mana yang lebih tepat untuk diprioritaskan?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

12. untuk memberikan dampak yang besar pada peningkatan kualitas pendidikan, maka kebijakan mana yang lebih tepat untuk diprioritaskan?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

13. untuk memberikan dampak positif yang besar pada tingkat kesehatan masyarakat, maka kebijakan mana yang lebih tepat untuk diprioritaskan?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

14. untuk memberikan dampak yang besar pada wawasan lingkungan, maka kebijakan mana yang lebih tepat untuk diprioritaskan?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

15. untuk memberikan dampak yang besar pada keamanan lingkungan, maka kebijakan mana yang lebih tepat untuk diprioritaskan?
 (Bandingkan elemen-elemen kategori dampak pada kolom A dengan elemen-elemen kategori dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

B. LEMBAR PERTANYAAN SISI NEGATIF

1. Berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten/Kota dari tahun 2005, dalam periode manakah dampak negatif lebih banyak ditimbulkan dari pembangun tersebut?
 (Bandingkan elemen-elemen periode dampak pada kolom A dengan elemen-elemen periode dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Jangka Pendek																		Jangka Panjang

2. Berkaitan dengan pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah Daerah, kategori dampak manakah yang paling besar pengaruh negatifnya dalam jangka pendek?
 (Bandingkan elemen-elemen kategori dampak pada kolom A dengan elemen-elemen kategori dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Ekonomi																		Sosial
Ekonomi																		Lingkungan
Sosial																		Lingkungan

3. Berkaitan dengan pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, kategori dampak manakah yang paling besar pengaruh negatifnya dalam jangka panjang?
 (Bandingkan elemen-elemen kategori dampak pada kolom A dengan elemen-elemen kategori dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Ekonomi																		Sosial
Ekonomi																		Lingkungan
Sosial																		Lingkungan

4. Untuk kategori dampak ekonomi, dampak negatif manakah yang paling besar ditimbulkan dari pembangunan di Kabupaten/Kota?
 (Bandingkan elemen-elemen dampak pada kolom A dengan elemen-elemen dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Biaya Operasional																		Persaingan Produk Antar Daerah

5. Untuk kategori dampak sosial, dampak negatif manakah yang paling besar dirasakan masyarakat dari pembangunan di Kabupaten/Kota?
 (Bandingkan elemen-elemen dampak pada kolom A dengan elemen-elemen dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Penggunaan Tenaga Terja Luar																		Perubahan Gaya Hidup
Penggunaan Tenaga Kerja Luar																		Kesenjangan Sosial
Perubahan Gaya Hidup																		Kesenjangan Sosial

6. Untuk kategori dampak lingkungan, dampak negatif manakah yang paling besar ditimbulkan dari pembangunan di Kabupaten/Kota?
 (Bandingkan elemen-elemen dampak pada kolom A dengan elemen-elemen dampak pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Kerusakan Lingkungan																		Polusi

7. Berkenaan dengan dampak negatif yang diciptakan dari kebijakan yang diambil, kebijakan manakah yang paling besar menciptakan biaya operasional?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

8. Berkenaan dengan dampak negatif yang diciptakan dari kebijakan yang diambil, kebijakan manakah yang paling besar menciptakan terjadinya persaingan produk antar daerah?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

9. Berkenaan dengan dampak negatif dalam hal persaingan tenaga kerja dari kebijakan yang diambil, kebijakan manakah yang paling besar akan menyebabkan tingginya penggunaan tenaga kerja luar daerah?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

10. Berkenaan dengan dampak negatif yang diciptakan dari kebijakan yang diambil, kebijakan manakah yang paling besar mempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

11. Berkenaan dengan dampak negatif yang diciptakan dari kebijakan yang diambil, kebijakan manakah yang paling besar menyebabkan kesenjangan sosial?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

12. Berkenaan dengan dampak negatif yang diciptakan dari kebijakan yang diambil, kebijakan manakah yang paling besar menciptakan kerusakan lingkungan?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri

13. Berkenaan dengan dampak negatif yang diciptakan dari kebijakan yang diambil, kebijakan manakah yang paling besar menciptakan polusi?
 (Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada kolom A dengan elemen-elemen kebijakan pada baris yang sama pada kolom B)

A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Pariwisata
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor pertambangan
Mengembangkan Sektor Pertanian																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Pertambangan
Mengembangkan Sektor Pariwisata																		Mengembangkan Sektor Industri
Mengembangkan Sektor Pertambangan																		Mengembangkan Sektor Industri